

**PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL TAPE DALAM MENINGKATKAN
SEKTOR INDUSTRI UNGGULAN**

(Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten
Bondowoso)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

KLARA PRISTIKA ANGGRAINI

NIM. 125030100111140



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017

MOTTO

The starting point of all achievement is desire, not a hope, not a wish,
but a keen pulsating desire which transcends everything.

– Napoleon Hill –

Don't let others tell you what you can't do. Don't let the limitations of
others limit your vision. If you can remove your self-doubt and
believe in yourself, you can achieve what you never thought possible.

– Roy, T. Bennet –



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

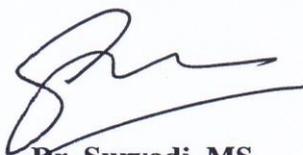
Hari : Kamis
Tanggal : 29 Desember 2016
Jam : 10.00-11.00
Skripsi atas nama : Klara Pristika Anggraini
Judul :Pemberdayaan Industri Kecil Tape Dalam Meningkatkan Sektor Industri Unggulan (Studi Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso)

Malang, 29 Desember 2016

Dan Dinyatakan LULUS

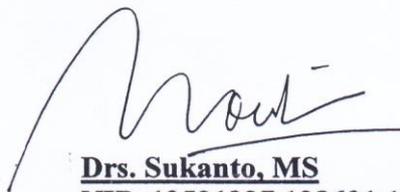
MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 003

Anggota



Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001

Penguji I



Dr. Siti Rochmah, M.Si
NIP. 19570313 198601 2 001

Penguji II



Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, MPA
NIP. 19740614 200501 1 001

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemberdayaan Industri Kecil Tape Di Kabupaten Bondowoso Dalam Mewujudkan Peningkatan Sektor Industri Unggulan (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso dan Sentra Industri Tape di Ds. Sumbertengah Kecamatan Binakal dan Sentra Industri Tape di Ds. Wringin Tengah Kecamatan Wringin)

Disusun oleh : Klara Pristika Anggraini

NIM : 125030100111140

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 01 Desember 2016

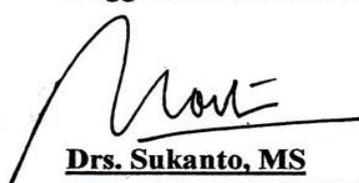
Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota Komisi Pembimbing



Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan 70

Malang, 02 Desember 2016



Klara Pristika Anggraini

125030100111140

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Industri Kecil Tape Dalam Meningkatkan Sektor Industri Unggulan (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso).”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang.
2. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Dr. Suryadi, MS dan Drs. Sukanto, MS selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Majelis penguji yang telah memberikan arahan dan kritik beserta sarannya demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi penulis.

7. Jajaran Dosen di Fakultas Ilmu Administrasi khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan bimbingan dan ilmu selama proses perkuliahan. Serta Pegawai di Universitas Brawijaya yang telah membantu dalam segala urusan akademik, keuangan dan kemahasiswaan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, pelaku industri tape di Kecamatan Binakal dan pelaku industri tape di Kecamatan Wringin yang telah memberi ilmu kepada penulis sebagai bekal dalam pembuatan skripsi ini.
9. Kedua orang tua yang telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis.
10. Teman-teman dan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam bentuk ide dan tenaga untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini agar berguna baik untuk sekarang maupun yang akan datang.

Malang
Penulis

RINGKASAN

Klara Pristika Anggraini, 2017. **Pemberdayaan Industri Kecil Tape Dalam Meningkatkan Sektor Industri Unggulan (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso)**, Dr. Suryadi, MS, Drs. Sukanto, MS.

Keberadaan industri kecil dan menengah (IKM) menjadi salah satu yang berperan dalam pembangunan ekonomi, khususnya industri kecil yang memanfaatkan potensi daerah. Industri kecil berbasis potensi daerah perlu diberdayakan, karena selain dapat mengangkat potensi daerah menjadi potensi unggulan, industri kecil berbasis potensi daerah juga dapat meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja yang juga secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Kabupaten Bondowoso, sedangkan situs penelitian di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Industri Tape di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder diperoleh dari dokumen terkait. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan industri kecil tape dalam meningkatkan sektor industri unggulan yang dilakukan Diskoperindag sudah baik karena program-program yang ada dapat membantu mengembangkan industri tape, tetapi kurang maksimal untuk dapat meningkatkan tape sebagai sektor industri unggulan. Pemberdayaan industri kecil tape meliputi: peningkatan kemampuan finansial, berupa pemberian peralatan penunjang produksi kepada pelaku industri tape. Dalam pengembangan pemasaran berupa kegiatan pameran produk unggulan dan promosi melalui media cetak dan media elektronik. Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan berupa pembinaan dan pelatihan terkait produk tape. Pelayan perijinan berupa pemberian rekomendasi survey bagi pelaku usaha. Faktor penghambat internal dalam pemberdayaan industri kecil tape yaitu minimnya anggaran dan minimnya ketersediaan aparatur Diskoperindag, serta faktor penghambat eksternal yaitu kurangnya semangat kewirausahaan pelaku usaha dan pola pikir yang belum dapat berubah, ketersediaan bahan baku tape, yaitu ubi kayu dan ketersediaan modal.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah 1.menciptakan iklim usaha yang kondusif; 2.kemitraan dengan petani ubi kayu; 3.pemberdayaan menyeluruh, meliputi industri tape dan industri pendukung; 4. fasilitasi permodalan bagi pelaku industri tape; 5. pembentukan asosiasi pelaku industri tape; 6. Branding Tape Bondowoso; 7.partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Kata kunci : **Potensi Daerah, Pemberdayaan, Industri Unggulan**

SUMMARY

Klara Pristika Anggraini, 2017. **The Small Industry Empowerment of Tapai In Improving The Leading Industrial Sector (Study at Agency of Cooperative, Industry, and Trading of Bondowoso Regency)**. Dr. Suryadi, MS dan Drs. Sukanto, MS.

The existence of small and medium industry (IKM) has role in the economic development, especially the small industry that uses the local potentials. Local potential based small industry should be empowered, because beside able to improve the local potentials become leading potentials, the local potential based industry also able to improve the economy and absorb the workers that directly influence to the societal welfare.

The research uses qualitative approach with descriptive research type. The research location at Bondowoso regency, while the research site at the Agency of Cooperative, Industry and Trading, Tapai industry at Binakal sub district and Tapai industry at Wringin sub district of Bondowoso regency. The primary data sources were obtained from interview and observation, while the secondary data obtained from the relevant documents. While data analysis in the research through data reduction, data display, and conclusion drawing.

Based on the results, the empowerment of small industry empowerment of Tapai in improving the leading industrial sector done by Diskoperindag is well because the program able to help to develop the Tapai industry, but less maximum to improve Tapai as the actor of leading industry. The small industry empowerment of Tapai including: improvement of financial ability, in the form of the supporting equipment giving to the tapai industry doers. In the marketing development in the form of education and training about the tapai product. The internal inhibiting factors in the empowerment survey recommendation giving for the businessmen. The external inhibiting factor in the empowerment of tapai small industry is the minimum budget and minimum apparatus of Diskoperindag, and external inhibiting factors such as the fewer enthusiasts of the entrepreneur and mindset which do not change, the raw material availability that is cassava and the capital availability.

The suggestions given by the researcher are 1. Creating conducive business climate 2.Partnership with the cassava farmers 3.Integrative empowerment, including Tapai industry and the supporting industries 4.Facilitation of capital for the Tapai industrial doers 5.Formation of Tapai industry doer association 6.Branding of Bondowoso Tapai 7.Societal participation in implementation of empowerment.

Keywords: Local Potentials, Empowerment, Leading Industry

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Administrasi Publik.....	13
1. Pengertian Administrasi.....	13
2. Administrasi publik.....	14
B. Pembangunan.....	16
1. Definisi Pembangunan.....	16
2. Pergeseran Paradigma Pembangunan.....	17
3. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	19
4. Ciri-Ciri Administrasi Pembangunan.....	20
C. Pemberdayaan.....	21
1. Pengertian Pemberdayaan.....	21
2. Tujuan Pemberdayaan.....	23
3. Tahap-Tahap Pemberdayaan.....	24
4. Indikator Pemberdayaan.....	26
5. Prinsip Pemberdayaan.....	27
6. Pendekatan Pemberdayaan.....	28
7. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.....	31
8. Pemberdayaan Industri kecil.....	34
D. Industri Kecil.....	41
1. Pengertian industri kecil.....	41
2. Klasifikasi Industri.....	43
3. Karakteristik Industri Kecil.....	44
4. Beberapa Permasalahan dalam Pemberdayaan Industri Kecil.....	45
E. Produk Unggulan Daerah (PUD).....	50

1. Pengertian Produk Unggulan Daerah.....	50
2. Faktor-Faktor Vital Produk Unggulan.....	52
3. Kriteria Produk Unggulan Daerah.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Fokus Penelitian.....	56
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	57
D. Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
F. Instrumen Penelitian.....	61
G. Analisis Data Penelitian.....	61
BAB IV PEMBAHASAN.....	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
1. Gambaran Umum Kabupaten Bondowoso.....	65
a. Letak Geografis Kabupaten Bondowoso.....	65
b. Makna Lambang Kabupaten Bondowoso.....	68
c. Visi dan Misi Kabupaten Bondowoso.....	70
2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.....	72
3. Gambaran Umum Kecamatan Binakal.....	80
4. Gambaran Umum Kecamatan Wringin.....	82
5. Gambaran Umum Industri Kecil Tape.....	84
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	91
1. Pemberdayaan Industri Kecil Tape Dalam Meningkatkan Sektor Industri Unggulan di Industri Tape Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.....	91
a. Peningkatan Kemampuan Finansial.....	91
b. Pengembangan Pemasaran.....	100
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	108
d. Pelayanan perijinan.....	114
2. Faktor penghambat dalam pemberdayaan industri kecil Tape di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.....	118
a. Faktor Penghambat Internal dalam pemberdayaan industri kecil Tape di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.....	118
b. Faktor Penghambat Eksternal dalam pemberdayaan industri kecil tape di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.....	120
1. Sumber daya Manusia (SDM).....	120
2. Bahan baku.....	123
3. Modal.....	126
C. Analisis Data Penelitian.....	128

1. Pemberdayaan Industri Kecil Tape Dalam Meningkatkan Sektor Industri Unggulan di Industri Tape Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.	128
a. Peningkatan Kemampuan Finansial	132
b. Pengembangan Pemasaran	135
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	142
d. Pelayanan Perijinan	146
2. Faktor penghambat dalam pemberdayaan industri kecil Tape di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.....	148
a. Faktor Penghambat Internal dalam pemberdayaan industri kecil Tape di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.....	149
b. Faktor Penghambat Eksternal dalam pemberdayaan industri kecil Tape di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.....	150
1. Sumber daya Manusia (SDM)	150
2. Bahan baku	152
3. Modal.....	154
BAB V_PENUTUP	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran	159
DAFTAR PUSTAKA	162
LAMPIRAN.....	166



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Potensi ubi kayu di Kabupaten Bondowoso	4
2.	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2013.....	67
3.	Jenis Tanah Kabupaten Bondowoso	68
4.	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2015	75
5.	Komoditi Industri Unggulan menurut Desa Tahun 2014.....	83
6.	Potensi Ubi Kayu di Kabupaten Bondowoso.....	84
7.	Produksi Tanaman Pangan Menurut Jenis Komoditi, 2015.....	85
8.	Peluang Pengembangan Potensi Komoditas Ubi Kayu	85
9.	Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (Persen), 2011-2015	87
10.	Jumlah Sentra Industri Kecil Tape di Kabupaten Bondowoso Tahun 2015/2016.....	88
11.	Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2014.....	89
12.	Data IKM Tape Penerima Bantuan Peralatan Tahun 2015-2016	96
13.	Kegiatan Pameran yang diikuti pelaku IKM Tape:	104

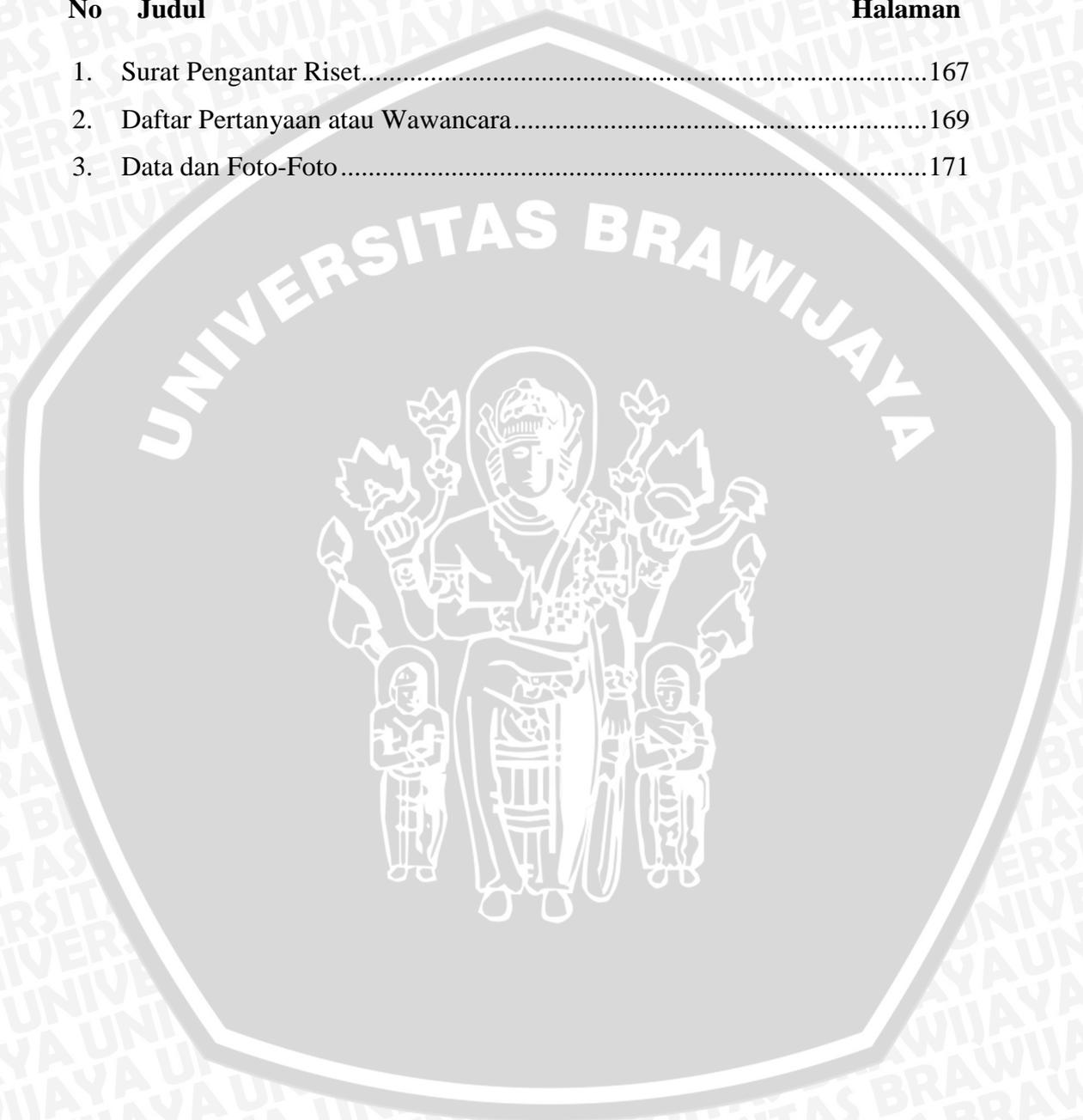


DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Tahap-tahap Analisis Data Interaktif.....	62
2.	Peta Kabupaten Bondowoso	65
3.	Lambang Dinas Daerah	68
4.	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso	78
5.	Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso	79
6.	Peta Kecamatan Binakal	80
7.	Peta Kecamatan Wringin	82
8.	Mesin Selep Ragi dan Kipas Angin, Bantuan Diskoperindag Bondowoso Tahun 2015	94
9.	Sealer dan Blender, Bantuan Diskoperindag Bondowoso Tahun 2015	95
10.	Pengupasan singkong bahan baku tape	99
11.	Profil dan Katalog UMKM.....	106
12.	Kegiatan Pelatihan IKM Tape 2016	112
13.	Kegiatan Pelatihan IKM Tape 2016	112
14.	Pelatihan Olahan Produk Tape (Jus Tape) 2016	112
15.	Contoh Label Merk dengan P-IRT	117

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Surat Pengantar Riset.....	167
2.	Daftar Pertanyaan atau Wawancara.....	169
3.	Data dan Foto-Foto.....	171



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan didefinisikan sebagai usaha yang ditempuh suatu negara untuk mewujudkan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik di berbagai aspek. Menurut kepustakaan ekonomi, pembangunan seringkali didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan *riil* per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan khususnya pada negara berkembang dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonominya sehingga terjadinya perubahan sosial tidak berarti apabila tidak memiliki nilai lebih.

Namun, gagasan-gagasan teori pembangunan ekonomi yang berkembang tidak dapat menciptakan pembangunan seperti yang diharapkan. Kegagalan teori pembangunan dan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan teori-teori tersebut di negara berkembang, memunculkan pemikiran untuk mencari alternatif lain untuk menciptakan pembangunan yang lebih berkeadilan, yakni pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) sebagaimana yang dikemukakan Korten (1984) (Mardikanto dan Soebianto, 2013:18) bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia, bukan pada pertumbuhan ekonomi melalui pasar maupun memperkuat negara. Pembangunan berpusat pada manusia menempatkan manusia bukan hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek pembangunan yang membuat

keputusan dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditentukannya. Mengacu pada hal tersebut, pembangunan berpusat pada manusia berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktor pembangunan.

Pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah, organisasi ataupun masyarakat untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah agar dapat mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kemandirian pada masyarakat agar dapat memutuskan dan mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai suatu negara berkembang juga melaksanakan pembangunan dengan menerapkan sistem penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi yang juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Paradigma desentralisasi menawarkan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni berupa pemberian wewenang atau otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah. Maka setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengembangkan daerahnya secara mandiri berdasarkan potensi yang ada di daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan potensi dan keunggulan lokal guna membangun daya saing. Potensi daerah juga akan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi potensi daerah dan bersama masyarakat harus bisa mengelola potensi daerahnya sebaik mungkin untuk kemajuan bersama. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mampu mendorong dan memfasilitasi munculnya produk unggulan daerah dengan mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimiliki daerah.

Produk unggulan daerah (PUD) adalah unggulan daerah yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. Produk unggulan berorientasi ramah lingkungan dan berorientasi pada pasar baik lokal maupun nasional dan regional (Cahyana Ahmadjayadi (2001) dalam Sugiatno, 2011 :15). Produk unggulan daerah tidaklah harus berupa hasil industri yang berteknologi canggih atau dengan investasi tinggi. Beberapa kriteria produk

unggulan ialah menggunakan bahan baku lokal, berkontribusi terhadap sumber daya, manusia dan masyarakat serta secara ekonomi mempunyai nilai tambah. Namun demikian, di sisi lain masih terdapat kendala dalam pengembangan produk unggulan daerah seperti belum dikelola secara optimal dan berorientasi mutu global. Hal ini menyebabkan masih rendahnya skala ekonomis yang menghambat masuknya produk unggulan daerah ke dalam pangsa pasar yang lebih luas (regional, nasional dan internasional) (Sugiatno, 2011 :15).

Salah satu potensi daerah yang dikembangkan menjadi produk unggulan adalah industri kecil Tape di Kabupaten Bondowoso. Tape adalah jenis makanan yang terbuat dari ubi kayu (singkong) yang difermentasi. Akibat proses fermentasi, tape memiliki cita rasa asam dan beraroma alkohol yang khas pada produk akhirnya. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah sentra produksi ketela pohon di Jawa Timur. Sebagai suatu daerah pertanian, Bondowoso sangat berpotensi sebagai wilayah pengembangan produksi ubi kayu. Hal ini disebabkan karena di daerah bondowoso banyak terdapat lahan kering yang dimanfaatkan untuk tanaman ketela pohon dan budidaya tanaman ini mudah hidup, meskipun pengairannya kurang. Produksi singkong di Kabupaten Bondowoso dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Potensi ubi kayu di Kabupaten Bondowoso

Produksi 2013 (Ton)	117.918
Produksi 2012 (Ton)	142.940
Produksi 2011 (Ton)	125.237
Produksi 2010 (Ton)	151.423
Produksi 2009 (Ton)	103.438
Produksi 2008 (Ton)	55.388

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, 2014

Pada tabel diatas, dapat dilihat produksi ubi kayu di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2011 dan 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, produksi ubi kayu (singkong) merupakan hasil pertanian yang menjadi unggulan dan cukup berpengaruh bagi Kabupaten bondowoso, dilihat pada besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Bondowoso, sumbangan terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 33,72%; terbesar kedua adalah lapangan usaha kategori Industri Pengolahan yaitu sebesar 20,84% (PDRB Kabupaten Bondowoso, 2010-2014). Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan salah satu yang berperan terhadap perekonomian Kabupaten Bondowoso.

Areal ubi kayu di Kabupaten Bondowoso tersebar di 21 kecamatan dari 23 kecamatan dengan produksi sebesar 121.076,10 ton/tahun (Badan Pusat Statistik Bondowoso, 2013). Kabupaten Bondowoso memiliki lahan kering cukup dan tersebar di setiap wilayah kecamatan, terutama di bagian barat seperti di Kecamatan Curahdami, Kecamatan Binakal dan Kecamatan Wringin (Kabupaten Bondowoso dalam angka, 2015). Hal ini mengakibatkan tanaman ubi kayu menjadi salah satu tanaman alternatif tanaman daerah kering yang menguntungkan dari tanaman lainnya.

Tabel. Peluang pengembangan potensi komoditas ubi kayu

No	Peluang pengembangan potensi komoditas ubi kayu		
	Bahan baku	Peluang industri	Produk
1.	Umbi ubi kayu	Industri tepung,	Tepung tapioka
		industri makanan	Tape, dodol, suwar-suwir, dan tiwul instan
2.	Ampas ubi kayu	Industri pakan ternak	Pakan ternak
3.	Tepung tapioka	Industri hidrolisi	Maltodekstrin, HFS, dan sorbitol
4.	Libah cair	Industri fermentasi	Cuka, asam cuka, asat sitrat, MSO

Sumber : Kabupaten Bondowoso, 2013.

Pada tabel diatas, dapat dilihat peluang pengembangan potensi ubi kayu yang dapat dikembangkan menjadi industri pengolahan makanan dan minuman salah satunya tape dan olahannya, seperti proll tape, brownies tape, suwar-suwir, dan dodol tape. Produk olahan ubi kayu yang paling terkenal adalah Tape singkong dan menjadi produk unggulan daerah sehingga Bondowoso lebih dikenal sebagai kota Tape. Prospek pengembangan industri Tape cukup cerah, karena selain dapat dikonsumsi dalam bentuk segar, tape juga dapat diolah lebih lanjut menjadi bentuk makanan lain, mislanya suwar-suwir, sirup fruktosa, brem, sari tape, tepung tape, dan sebagainya (Soebijakto, 1987 dalam Mujiyanti 2005).

Pembuatan tape cukup sederhana yaitu dimulai dengan mengupas dan membuang kulit singkong, mencuci umbi singkong kemudian direbus. Setelah matang umbi singkong didinginkan dan kemudian ditambahkan ragi dan didiamkan satu malam untuk memasuki tahapan peragian atau fermentasi. Terdapat dua jenis ubi kayu di Bondowoso yaitu ubi kayu berwarna kuning yang dikenal dengan ubi kayu mentega dan ubi kayu berwarna putih. Jenis ubi kayu

yang dipilih oleh para produsen tape adalah jenis ubi kayu kuning (mentega) karena ubi kayu mentega dapat menghasilkan tape berwarna kuning, tidak berserat dan tidak berair sehingga daya tahan tape dapat terjaga. Selain itu ubi kayu mentega memiliki rasa manis sehingga tape yang dihasilkan juga memiliki rasa manis. Jenis ubi kayu berwarna putih dimanfaatkan oleh para produsen sebagai bahan baku selain tape seperti tepung tapioka dan galek. Kualitas tape bergantung pada pemilihan bahan baku seperti ubi kayu dan ragi. Ubi kayu yang dipilih adalah ubi kayu dengan umur panen cukup yaitu 7-9 bulan dan dengan ukuran yang sedang atau besar (Octaviani, 2014).

Industri tape di Bondowoso memiliki peran potensial sebagai penarik pembangunan sektor pertanian, menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperbaiki distribusi pendapatan. Secara umum, produksi tape di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan setiap tahun seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Pada tahun 2010 produksi tape mencapai 7.659.169 ton dan meningkat pada tahun 2013 mencapai 86.203.726 ton dengan 506 unit usaha dan menyerap 1.747 tenaga kerja, dan pada tahun 2015 tenaga kerja meningkat menjadi 1.747 dengan produksi 86.225.000 kg (Badan Pusat Statistik Bondowoso, 2016).

Industri tape tersebar hampir disetiap kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Salah satu sentra industri tape berada Kecamatan Binakal dan Kecamatan Wringin. Unit usaha tape di dua kecamatan ini merupakan unit usaha tape terbanyak di Kabupaten Bondowoso, dibanding sentra industri tape yang lain. Menurut data Statistik Kecamatan Binakal (2015) pada tahun 2014 skala industri

pengolahan di Kecamatan Binakal di dominasi komoditas industri unggulan pembuatan besek ikan dan industri tape sebanyak 9 buah yang terpusat di Desa Sumber Tengah. Menurut data Statistik Kecamatan Wringin (2015), sektor Industri pengolahan, komoditas industri unggulan ke dua setelah keranjang ikan adalah Kerajinan industri tape sebanyak 353 Unit dengan jumlah tenaga kerja 1.236 orang.

Namun, seperti industri kecil pada umumnya, industri tape dalam perkembangannya juga mengalami permasalahan. antara lain: 1) ketersediaan bahan baku ubi kayu, Keterbatasan bahan baku juga menjadi salah satu kendala serius bagi kelangsungan produksi bagi banyak IKM di Indonesia; 2) kurangnya dukungan modal; 3) sarana dan prasarana, yaitu peralatan produksi yang menggunakan teknologi lama/tradisional ; 4) pemasaran, yaitu produk yang dapat kurang bersaing dengan produk lainnya; dan 5) sumber daya manusia (SDM) terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, pengembangan produk, kualitas dan mutu produk, teknik pemasaran dan sebagainya. Industri kecil dituntut untuk mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki karakteristik sehingga memiliki keunggulan dibandingkan produk pesaing. Sebagaimana disebutkan bahwa, pengelolaan yang kurang optimal menyebabkan masih rendahnya skala ekonomis yang menghambat masuknya produk unggulan daerah ke dalam pangsa pasar yang lebih luas (regional, nasional dan internasional) (Kemendagri.go.id)

Peran pemerintah diperlukan dalam pengembangan dan pemberdayaan industri kecil yang memanfaatkan potensi daerah sebagai salah satu yang

berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Industri kecil yang memanfaatkan Produk unggulan harus dikelola secara lebih serius mulai pengidentifikasian, pengelolaan sampai pengembangan produk serta diikuti kebijakan pemerintah daerah yang pro industri kecil. Oleh karena itu dibutuhkan aparatur daerah yang memiliki komitmen, kapasitas dan kompetensi yang baik. Pemberdayaan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku industri kecil, khususnya industri tape. Pelaksanaan pemberdayaan industri kecil dilaksanakan pemerintah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Bondowoso No. 45 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, yaitu: mengembangkan industri kecil, UMKM, dan kewirausahaan serta pemberdayaan UMKM dengan meningkatkan kapasitas kelembangaan dan usaha melalui pemanfaatan sumber daya lokal, teknologi tepat guna, pembinaan serta fasilitasi akses permodalan. Peran pemerintah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pengembangan industri tape secara maksimal, sehingga dapat mengangkat potensi daerahnya agar lebih berdaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tentang, **“Pemberdayaan Industri Kecil Tape Dalam Meningkatkan Sektor Industri Unggulan” (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso)**”.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan industri kecil tape dalam meningkatkan sektor industri unggulan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan industri kecil tape yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pemberdayaan industri kecil tape yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kendala pada pemberdayaan industri kecil tape yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.

D. Kontribusi Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan nilai tambah untuk pengembangan keilmuan berupa kontribusi akademis dan

realitas dilapangan berupa kontribusi praktis sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk terus memberdayakan dan mengembangkan industri kecil.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota lain dalam memberdayakan dan mengembangkan industri kecil.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemberdayaan Industri Kecil.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan info pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah lalu dan sebagai bahan referensi serta bahan masukan bagi penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dalam judul dan topik yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya dikemukakan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang dan alasan pemilihan judul, permasalahan yang akan dibahas dan pembatasannya, tujuan dan

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan digunakan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Membuat uraian tentang berbagai teori-teori yang berhubungan dengan pemberdayaan industri kecil. Teori-teori yang diberikan pada penelitian ini berupa teori administrasi pembangunan, dan teori pemberdayaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang prosedur penelitian, sumber dan jenis informasi serta teknik analisis data yang dilakukan untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Model penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga penulis dapat menjelaskan fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas pokok permasalahan yang diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian dan fokus penelitian serta penyajian hasil di lapangan.

BAB V : PENUTUP

Mengemukakan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan memberikan saran-saran tentang hasil penelitian sebagai bahan perbaikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Administrasi publik mengandung dua unsur kata yaitu administrasi dan publik. Secara etimologi *Administration* dalam bahasa Inggris berasal dari *ad* dan *ministrare* dalam bahasa Latin yang artinya “to serve”- memberikan jasa, pelayanan, bantuan, melayani, atau mengabdikan. Istilah tersebut mempunyai pengertian yaitu administrasi (terjemahan bahasa Latin) adalah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kepadanya. *The Liang Gie* (1993:2) dalam Pasolong (2014:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Administrasi dalam arti luas merupakan kerjasama, banyak orang (lebih dari satu orang), untuk mencapai tujuan bersama. Dalam arti sempit administrasi adalah tata usaha, yang memiliki unsur-unsur pelaksanaan: pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, perwakilan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan.

Sedangkan publik, pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Secara sederhana, Syafi'ie dkk. (1999:18) dalam Pasolong (2014:6) mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa publik adalah sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama.

2. Administrasi publik

Penyelenggaraan seluruh kepentingan dan masalah publik (*public interest and public affairs*) yang ada pada suatu negara merupakan ruang lingkup kegiatan administrasi publik (Mindarti, 2007 : 3). Sebagaimana dikemukakan Henry dalam Pasolong (2014:8) bahwa administrasi publik tidak hanya terkotak pada pemerintahan saja, Henry menjelaskan administrasi publik sebagai berikut :

Administrasi publik merupakan suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Berdasarkan pengertian di atas, administrasi publik merupakan proses atau upaya pemerintah untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakan. Dengan kata

lain, seperti yang dikemukakan Chandler dan Plano dalam Pasolong (2014:7) administrasi publik adalah :

“Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.”

Lebih lanjut Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Untuk memperjelas mengenai administrasi publik dapat juga melihat pendapat Felix A. Nigro dan Loyd G. Nigro dalam Pasolong (2014:8) yang mendefinisikan administrasi publik sebagai berikut :

(1)suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah, (2)meliputi bagian cabang pemerintah :eksekutif, legislatif dan serta hubungan diantara mereka, (3)mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik, (4)sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perseorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat, (5)dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan pengorganisasian atau pengkoordinasian sekelompok orang untuk mengatur dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah, diperlukan peran aktor, tujuan, dan sasaran yang hendak dicapai. Aktor yang dimaksud adalah pemerintah terbagi menjadi eksekutif dan legislatif yang memiliki kapasitas dalam membuat dan menetapkan kebijakan.

B. Pembangunan

1. Definisi Pembangunan

Upaya-upaya untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya "pembangunan". Pendek kata, pembangunan merupakan segala upaya yang terus-menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi (Mardikanto dan Soebianto, 2013:2). Kartasmita dalam Mardikanto dan Soebianto (2013: 9) menegaskan bahwa, pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sedangkan Tjokroamidjojo (1980:1) mengemukakan bahwa pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan

usaha yang tanpa akhir, “*development is not a static concept. It is continuously changing*”. Dalam hal ini pembangunan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses, karena dilaksanakan secara terus-menerus dan bertahap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana menuju kehidupan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2. Pergeseran Paradigma Pembangunan

Paradigma dapat diartikan sebagai pola, konsep, metode atau tindakan yang disepakati dalam memahami sesuatu. Paradigma pembangunan yang pada suatu waktu tertentu menjadi acuan pembangunan nasional dapat saja mengalami kegagalan, sementara paradigma-paradigma baru timbul menggantikannya. Berikut beberapa paradigma yang berkembang menurut Suryono (2006:15) :

a) Paradigma Pertumbuhan (*Growth Paradigm*)

Paradigma ini dimulai pada sekitar dasa warsa 1960-an, banyak negara-negara di dunia ketiga (termasuk Indonesia) meniru atau mengadopsi pendekatan “*growth priority*” yang memfokuskan diri pada akumulasi kapital nasional, dengan GNP (*Gross National Product*) sebagai ukuran keberhasilannya, yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang di hadapi negara dunia ketiga. Pendekatan ini, memang pada akhirnya terbukti berhasil meningkatkan akumulasi kapita dan pendapatan perkapita di banyak negara berkembang. Namun keberhasilan paradigma pertumbuhan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah membawa berbagai akibat yang negatif.

b) Paradigma Pertumbuhan Dengan Pemerataan (*Growth with Distribution Paradigm*)

Kegagalan strategi pertumbuhan ekonomi, pendekatan pembangunan di negara-negara berkembang kemudian bergeser pada *growth with distribution* dengan strategi utama “*employment-oriented-development*”. Paradigma ini digunakan untuk

menggambarkan empat pendekatan dasar yang apabila digunakan tersendiri atau dalam kombinasi dapat diharapkan akan bisa meningkatkan pendapatan golongan paling miskin. Namun pendekatan ini akhirnya terbukti gagal, karena “*World Employment Program*” yang dikenalkan oleh ILO (*international Labour Organization*) lebih bersifat “*comprehensif employment strategies*” dengan konsekuensi teknologi yang menyertainya adalah teknologi tinggi yang bersifat “*capital intensive*” sehingga hanya orang yang berpendidikan dan berketerampilan yang dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang diciptakan.

c) Paradigma Teknologi Tepat Guna (*Apropriate Technology Paradigm*)

Paradigma ini menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja tidak harus dilakukan melalui pengembangan pola-pola kebutuhan masyarakat, melainkan juga dapat dilakukan melalui penciptaan barang-barang produksi melalui cara-cara yang lebih bersifat padat karya. Namun, pendekatan ini juga dianggap tidak dapat memuaskan usaha-usaha penciptaan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan nasional.

d) Paradigma Kebutuhan Dasar Pembangunan (*Basic Need Development Paradigm*)

Pendekatan ini merupakan sarangan langsung terhadap kemiskinan (Haq dalam Suryono, 2010:19). Namun terjadi kemunduran ekonomi dari negara-negara OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) yang disebabkan oleh “*the first oil shock*” yang kemudian melahirkan yang disebut dengan “*the new international economic order*”.

e) Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Paradigm*)

Paradigma ini menjelaskan tentang kesadaran akan krisis lingkungan hidup di bumi yang telah melahirkan kesadaran akan konsekuensi transnasional dari pembangunan yang berlebihan (*overdevelopment*), dimana resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendak diwariskan kepada generasi mendatang.

f) Paradigma Pemberdayaan (*Empowerment Paradigm*)

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah nilai kolektif dari individual. Konsep “*empowerment*”, sebagai salah satu konsep alternatif pembangunan, pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung (Suryono, 2010:16-22).

3. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Secara sederhana administrasi diartikan sebagai suatu kegiatan kerjasama oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan, sedangkan pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat secara sadar dan berencana untuk memperbaiki kehidupannya dalam berbagai aspek. Berdasarkan hal tersebut, administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya.

Sebagaimana yang dikemukakan Siagian (2003:23) administrasi pembangunan adalah seluruh usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Untuk mewujudkan modernitas diperlukan peran serta pemerintah dan masyarakat. Administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu individu maupun sekelompok orang untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Keadaan yang dianggap lebih baik ini bagi negara-negara berkembang dinyatakan dengan usaha menuju modernitas atau pembangunan bangsa, atau dalam bentuk paling konkrit pembangunan sosial-ekonomi. Administrasi pembangunan memberikan uraian tentang keterkaitan administrasi dengan aspek-aspek usaha pembangunan di berbagai aspek. Seperti yang diungkapkan Tjokromidjojo (1974:13) bahwa “ pada intinya

administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan penumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk melakukan perubahan di berbagai aspek, yang telah direncanakan guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

4. Ciri-Ciri Administrasi Pembangunan

Ciri-ciri administrasi pembangunan yang diungkapkan oleh Afiffudin (2010:64) untuk membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain :

- a) ciri pokok pertama, adalah orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha-usaha perubahan keadaan yang ddanggap lebih baik. Bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong kearah perubahan-perubahan besar (*basic change*) di berbagai kegiatan atau dibidang kehidupan yang berhubungan dan akan memberi hasil akhir terhadap proses pembangunan. Pada administrasi pembangunan terdapat tingkat kepeloporan (*degree of pioneering*) dan merintis perubahan (*initiade changes*)
- b) ciri pokok kedua pendekatan administrasi pembangunan adalah bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain.

Berdasarkan hal diatas, administrasi pembangunan berorientasi pada usaha perbaikan kearah yang lebih baik. Ciri lain dari administrasi pembangunan diungkapkan Tjokroamidjojo (1974:14) dalam bukunya pengantar administrasi pembangunan sebagai berikut :

- a) lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.
- b) administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaannya yang efektif. bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.
- c) berorientasi pada usaha-usaha mendorong perubahan (*inovasi*) kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan.
- d) beorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembungan (*development function*) dari pemerintah administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai "*development agent*"
- e) administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.
- f) dalam administrasi pembangunan administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agent*)
- g) lebih berependekatan lingkungan (*ecological approach*) berorientasi kepada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*)

Jadi, administrasi pembangunan merupakan suatu usaha perubahan di bidang administrasi untuk lebih dapat mendukung usaha-usaha pembangunan kearah yang lebih baik diberbagai bidang. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan peran serta pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait guna melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual Suharto (2009 :57) menyatakan pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata "*power*" yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai

kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Dalam konteks ini pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga kelompok rentan dan lemah memiliki kebebasan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok rentan dan lemah meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang atau jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok rentan dan lemah.

Sementara itu Mardikanto dan Soebiato (2013:61) memberikan definisi pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan.

Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah, organisasi ataupun masyarakat untuk memperkuat dan atau

mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah agar dapat mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya.

2. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan (Mardikanto dan Soebianto, 2013:30). Berdasarkan hal tersebut Mardikanto dan Soebianto (2013:111) memaparkan tujuan pemberdayaan yang meliputi berbagai upaya perbaikan, antara lain:

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*)
Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai sesuatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup;
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)
Tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran;
- c. Perbaikan tindakan (*better action*)
Berebakal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik;
- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)
Perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha;
- e. Perbaikan usaha (*better business*)

- Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;
- f. Perbaikan pendapatan (*better income*)
Terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat;
 - g. Perbaikan lingkungan (*better environment*)
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;
 - h. Perbaikan kehidupan (*better living*)
Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keasaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;
 - i. Perbaikan masyarakat (*better community*)
Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pemberdayaan sebagai upaya perbaikan pendidikan dapat mendorong terjadinya perbaikan aksesibilitas, tindakan hingga perbaikan masyarakat menjadi lebih baik. Tujuan pemberdayaan ialah untuk menumbuhkan dan membentuk kemandirian pada individu baik dalam berpikir dan bertindak sehingga dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan dan dapat meningkatkan mutu kehidupannya menjadi lebih baik.

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu proses, melalui suatu masa yang bertahap mulai dari belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana dikemukakan Sumodiningrat (2004:41) bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan

kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi.

Adapun tahap-tahap pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004:83) meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses memberdayakan masyarakat, dimana tercipta pra kondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan wawasan terbuka dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap ini transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan berlangsung baik, penuh bersemangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Keterbukaan wawasan mulai nampak dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang dibutuhkan. Tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, yaitu sekedar pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian ini dapat berupa inovasi, kreasi oleh masyarakat. Dalam tahapan ini pemerintah hanya menjadi fasilitator karena masyarakat sudah dapat mandiri.

Sedangkan Pranarka dan Prijono (1996:2) menyatakan tiga fase dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan, yaitu :

- 1) Tahap inisiatif, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah dimana masyarakat mendapatkan keberdayaan dirinya dari pihak luar, dilakukan oleh pihak luar atau pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat.
- 2) Tahap partisipatoris, pada tahap ini dimana proses pemberdayaan mendapatkan dari pemerintah, dilakukan bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat.
- 3) Tahap emansipatif, pada tahap ini pemberdayaan berasal dari masyarakat atau telah mendapat keberdayaan dirinya oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pemerintah.

Pada tahap inisiatif, masyarakat bersifat pasif dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dan masih bergantung

kepada pemerintah. Pada tahap partisipatoris, masyarakat dilibatkan secara aktif atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang disusun dan direncanakan untuk menuju kemandirian. Selanjutnya pada tahap emansipatif, masyarakat sudah menemukan kekuatan dirinya yaitu masyarakat aktif memikirkan, merencanakan, dan menentukan kegiatan secara mandiri untuk mencapai harapan yang mereka inginkan

Menurut Adi (2008:84) pemberdayaan sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan. Proses pemberdayaan tidaklah berhenti pada satu titik tertentu, tetapi kegiatan pemberdayaan dilakukan secara berkesinambungan. Jadi, dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang terus-menerus dan berkesinambungan sepanjang masyarakat masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan.

4. Indikator Pemberdayaan

Indikator keberdayaan menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2009:63) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang disebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu :kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power*

over), dan kekuasaan dengan (*power with*). Adapun indikator pemberdayaan adalah sebagai berikut :

1. Kebebasan mobilitas
2. Kemampuan membeli komoditas kecil
3. Kemampuan membeli komoditas besar
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan
5. Kebebasan realtif
6. Kesadaran hukum dan politik
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga

Beberapa indikator di atas, dapat dijadikan pilihan untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara optimal. Indikator dalam pemberdayaan dapat dilihat dari kebebasan mobilitas, kemampuan membeli, kebebasan terlibat dalam pembuatan keputusan dan adanya kesadaran hukum dan politik. Indikator pemberdayaan harus didukung langkah yang strategis dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Leagans (1961) dalam Mardikanto dan Soebianto (2013:105) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Adapun prinsip pemberdayaan, yaitu:

- a. *Mengerjakan*, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan dan menetapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- b. *Akibat*, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena perasaan

senang/puas atau tidak senang/tidak puas akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa-masa mendatang;

- c. *Asosiasi*, artinya kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya. Misalnya dengan melihat cangkuk orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik, dll.

Lebih lanjut, Dahama dan Bhatnagar (1980) dalam Mardikanto dan Soebianto (2013:106) mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan, mencakup:

1. Minat dan kebutuhan
2. Organisasi masyarakat bawah
3. Keragaman budaya
4. Perubahan budaya
5. Kerjasama dan partisipasi
6. Demokrasi dalam penerapan ilmu
7. Belajar sambil bekerja
8. Penggunaan metoda yang sesuai
9. Kepemimpinan
10. Spesialis yang terlatih
11. Segenap keluarga
12. Kepuasan

Prinsip-prinsip pemberdayaan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, misalnya pemberdayaan disesuaikan dengan minat dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat berkeinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.

6. Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. yang dapat disingkat menjadi

5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan menurut Suharto (2009:67) :

1. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian masyarakat.
3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan
5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Secara sederhana, Kartasmita (1996:159-160) merumuskan kedalam

tiga strategi pokok, yaitu :

- 1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan, surat pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
- 3) Melindungi masyarakat, dalam proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah menjadi semakin lemah, karena kurang

berdaya dalam menghadapi pihak-pihak yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemikiran kepada masyarakat yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan. Dengan demikian untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, perlu adanya pemihakan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan langsung pada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Kartasasmita (1997:29) menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut :

1. Upaya harus terarah, yaitu ditujukan kepada yang memerlukan dan dirancang untuk mengatasi permasalahan serta sesuai dengan kebutuhan.
2. Pemberdayaan harus mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaatnya.
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi, juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas apabila penanganannya dilakukan secara individu.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan utama dalam pemberdayaan adalah masyarakat bukan objek melainkan subyek pembangunan. Pemberdayaan harus mengikutsertakan masyarakat, bahkan dilaksanakan masyarakat sebagai penerima manfaat, dan disesuaikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat.

7. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah, organisasi ataupun masyarakat untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah agar dapat mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya. Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan. Fasilitator adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat (Mardikanto dan Soebianto, 2013:139). Menurut Lipit (1958) dan Rogers (1983) dalam Mardikanto dan Soebianto (2013:139) menyebutnya sebagai “agen perubahan (*change agent*) yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Karena itu, fasilitator haruslah profesional, dalam artian memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, fasilitator dibedakan menjadi tiga berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja, antara lain:

1. Pegawai negeri sipil (PNS), yaitu pegawainegeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat.
2. Penyuluh swasta, fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta, termasuk penyuluh swasta yaitu penyuluh dari lembaga swadaya masyarakat (LSM)

3. Penyuluh swadaya, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat yang sukarela (tanpa imbalan) melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilingkungannya. Termasuk dalam kelompok ini adalah penyuluh/fasilitator yang diangkat dan atau memperoleh imbalan dari masyarakat dilingkungannya.

Secara konvensional, peran penyuluh hanya dibatasi pada kewajibannya untuk menyampaikan inovasi dan atau mempengaruhi penerima manfaat pemberdayaan untuk mengadopsi inovasi yang disampaikan. Mardikanto (2013:142) mengemukakan beragam peran penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Peran edukasi. Berperan sebagai pendidik dalam arti untuk mengembangkan proses belajar-mengajar bersama penerima manfaatnya.
2. Peran diseminasi inovasi. Peran penyebarluasan informasi/inovasi dari “luar” kepada masyarakat penerima manfaatnya, atau sebaliknya.
3. Peran fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan sumber-sumber yang diperlukan oleh penerima manfaat dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain.
4. Peran konsultasi, yaitu sebagai pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat penerima manfaat.
5. Peran advokasi, memberikan peran bantuan kaitannya dengan rumusan /pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
6. Peran supervisi. Berperan sebagai penyelia (supervisor) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
7. Peran pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi. Berperan untuk melakukan pengamatan, pengukuran dan penilaian atas proses dan hasil-hasil pemberdayaan masyarakat, baik selama kegiatan masih dilaksanakan, maupun sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Selaras dengan peran setiap penyuluh/fasilitator, Berlo (1960) dalam Mardikanto dan Soebianto (2013:143) mengemukakan 4 (empat) kualifikasi yang harus dimiliki setiap penyuluh/fasilitator:

1. Kemampuan berkomunikasi, termasuk kemampuan memilih inovasi, media komunikasi, metoda pemberdayaan yang efektif dan

- efisien, alat peraga serta kemampuan untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaat.
2. Sikap penyuluh/fasilitator yang:
 - a. Menghayati dan bangga terhadap profesinya, serta merasakan bahwa kehadirannya untuk melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat memang sangat dibutuhkan masyarakat penerima manfaatnya.
 - b. Meyakini bahwa inovasi yang disampaikan telah teruji kemanfaatannya, memiliki peluang keberhasilan untuk diterapkan di wilayah kerjanya, memberikan keuntungan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, serta meyakini bahwa inovasi yang disampaikan bahwa inovasi yang akan disampaikan benar-benar merupakan kebutuhan nyata.
 - c. Menyukai dan mencintaimasyarakat penerima manfaatnya dalam artian selalu siap memberika bantuan dan melaksanakan kegiatan demi berlangsungnya perubahan kehidupan masyarakat penerima manfaat.
 3. Kemampuan pengetahuan penyuluh/fasilitator tentang:
 - d. Isi, fungsi, manfaat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan, secara konseptual dan praktisnya.
 - e. Latar belakang keadaan dan keadaan masyarakat penerima manfaatnya, baik perilaku nilai sosial-budaya, keadaan alam maupun kebutuhan nyata yang diperlukan masyarakat penerima manfaatnya
 - f. Segala sesuatu yang menyebabkan masyarakat suka atau tidak suka menghendaki terjadinya perubahan maupun segala sesuatu yang menyebabkan masyarakat cepat/lamban mengadopsi inovasi
 4. Karakteristik sosial-budaya penyuluh/fasilitator
Keberhasilan penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kualifikasi penyuluh/fasilitator seperti keterampilan, sikap dan pengetahuan saja, melainkan juga diimbangi dengan keadaan latar belakang sosial-budaya (bahasa, agama, kebiasaan-kebiasaan). Fasilitator yang baik, sejauh mungkin memiliki latar belakang sosial budaya yang sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat penerima manfaatnya.

Penyuluh atau fasilitator sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat yang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi, diperlukan penyuluh atau fasilitator yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan optimal.

8. Pemberdayaan Industri kecil

Pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian kepada masyarakat sehingga dapat mengembangkan usahanya. Menurut Erwan sebagaimana yang dikutip oleh Sulaksana (2014:25) bahwa “tujuan pemberdayaan usaha kecil adalah membentuk usaha kecil yang mandiri sehingga dapat berkembang menjadi usaha menengah. Kemandirian usaha ini diukur dari tingkat ketergantungan usaha kecil terhadap faktor-faktor luar yang mempengaruhi usaha kecil seperti mitra usaha, *supplier*, pemberi modal dan sebagainya”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; serta;
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Adapun indikator yang menjadi tolak ukur keberdayaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, antara lain melalui penumbuhan iklim usaha dan pengembangan serta pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penumbuhan iklim usaha, diwujudkan melalui beberapa aspek, yang meliputi:

- a. Pendanaan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Informasi usaha;
- d. Kemitraan;

- e. Perizinan usaha;
- f. Kesempatan berusaha;
- g. Promosi dagang; dan
- h. Dukungan kelembagaan

Sementara itu pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dilakukan berdasarkan beberapa bidang, yaitu:

- a. Produksi dan Pengolahan;
- b. Pemasaran;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Desain dan teknologi;

Dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan usaha kecil, berpegang pada prinsip pemberdayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, yaitu:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarya sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Berdasarkan uraian diatas prinsip-prinsip pemberdayaan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pemberdayaan bagi industri kecil. Pemberdayaan industri kecil dan menengah diatur dalam Undang-undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 72 ayat 2, pemberdayaan dilakukan dengan :

- a. Perumusan kebijakan, dalam perumusan kebijakan prioritas pengembangan industri kecil dan menengah mengacu pada:
 - 1. Sumber daya industri daerah.
 - 2. Penguatan dan pendalaman struktur industri nasional.

3. Perkembangan ekonomi nasional dan global.
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan, dilakukan melalui :
 1. Peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan industri kecil dan menengah
 2. Kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait.
- c. Pemberian fasilitas, diberikan dalam bentuk:
 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi.
 2. Bantuan dan bimbingan teknis.
 3. Bantuan bahan baku dan bahan penolong.
 4. Bantuan mesin atau peralatan
 5. Pengembangan produk.
 6. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau.
 7. Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran.
 8. Akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru.
 9. Penyediaan kawasan industri untuk industri kecil dan industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
 10. Pengembangan, penguatan, dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, dan industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Pendapat lain mengenai pemberdayaan industri kecil juga dikemukakan Syaifudin (1995 : 66-75) dalam Firmansyah (2014:43) terdapat beberapa strategi pemberdayaan Industri kecil antara lain :

- a. Peningkatan Kemampuan Finansial.
Upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui modal sementara.
- b. Pengembangan Pemasaran
Pada era pasarbebas dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. Hal ini merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi pengusaha kecil. Maka dari itu terdapat dua dalam strategi pengembangan pemasaran, yaitu:
 - 1) Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar.
Caranya adalah dengan menciptakan pola hubungan sub-kontrak

dan promosinya yang berkaitan dengan pola sub-kontrak yang lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri secara vertikal. Pola sub-kontrak memberikan manfaat positif bagi pengusaha kecil karena secara ekonomi usaha kecil menjadi subkontraktor memperoleh jaminan pasar dan kontinuitas produksi.

2) Proteksi Pasar

Bentuk proteksi dalam hal ini melalui konsumsi sekitar 10 % dari total anggaran pemerintah digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk badan usaha kecil.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan pendidikan formal dan non formal. Sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar kerja melalui sistem permagangan pada pusat-pusat penelitian dan pengembangan SDM dan teknologi seperti melakukan pembinaan terhadap industri kecil secara rutin dan berkelanjutan harus ada dalam setiap program kerja pemerintah.

d. Pengendalian dan Pengaturan

1) Pengendalian perizinan.

Secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memantau perkembangan usaha kecil. Ada tiga jenis perizinan yang harus dipenuhi, antara lain ijin tempat usaha (kelayakan, lokasi serta dampak terhadap lingkungan), Ijin Usaha Industri serta Ijin Perdagangan. Pada lokasi tertentu usaha kecil tidak wajib memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), namun sertifikasi masih tetap harus dipenuhi antara lain melalui Surat Ijin Bebas Tempat Usaha (SIBTU) untuk usaha kecil yang terdeteksi di lokasi industri usaha serta surat tanda daftar industri kecil untuk sentra-sentra produksi.

2) Perencanaan Tata Ruang

Mewujudkan gagasan untuk lebih memperhatikan kepentingan usaha kecil melalui keterlibatan kepentingan usaha kecil dalam perencanaan kota, proses konsultasi sebagai mekanisme untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan, pengaturan sungguh-sungguh terhadap peran dan fungsi usaha kecil tersebut bagi lingkungan masyarakat luas.

3) Fungsi kelembagaan

Fungsi kelembagaan terkait pembinaan usaha kecil secara terpadu dan berjangka panjang harus lebih diefektifkan dengan cara: pembinaan, pengawasan dan memberi peluang bagi swasta maupun lembaga non-pemerintah lainnya untuk terlibat dalam pengembangan usaha kecil secara bersama-sama.

Kartasmita (1996:5) dalam Sulaksana (2014:36), menyebutkan beberapa langkah strategis yang harus ditempuh untuk mengembangkan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan, meliputi aspek-aspek berikut ini :

- a. Peningkatan akses kepada aset produktif, terutama modal, di samping teknologi, manajemen dan segi lainnya.
- b. Pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Namun, bersamaan juga perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha.
- c. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat pasar sangatlah penting., hal tersebut harus disertai dengan pengendalian agar proses yang berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan. Untuk itu diperlukan intervensi-intervensi yang tepat dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mendasar dalam suatu ekonomi bebas, tetapi menjamin terjadinya pemerataan sosial (*social equity*)
- d. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat

Sebagaimana pendapat Syaifudin (1995 : 66-75) dalam Firmansyah (2014:43) terkait pemberdayaan industri kecil, Kartasmita (1996:5) dalam Sulaksana (2014:36) juga mengemukakan bahwa salah satu aspek pemberdayaan adalah melalui peningkatan akses kepada aset produktif, terutama modal, disamping teknologi, manajemen dan segi lainnya. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Pengembangan usaha juga ditunjang oleh peralatan yang memadai.

Selain aspek finansial, pengembangan pemasaran, menurut Kartasmita (1996:5) dalam Sulaksana (2014:36) juga penting, namun harus disertai dengan pengendalian agar proses yang berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan.

Pasar merupakan wadah bagi produsen untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Akses pasar dan jaringan usaha yang luas dapat meningkatkan daya saing industri kecil. Menurut William J. Stanton dalam Basu Swastha (2008:179), dengan adanya pasar maka suatu usaha dapat merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumennya. Oleh karena itu, diperlukan informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi, misalnya : Jenis barang atau produk yang dibutuhkan konsumen, daya beli masyarakat, harga pasar, dan selera konsumen. Sedangkan informasi pasar faktor produksi juga diperlukan untuk mengetahui : sumber bahan baku yang dibutuhkan, harga bahan baku, dimana dan bagaimana memperoleh modal usaha, bagaimana memperoleh tenaga kerja profesional, tingkat upah layak, dan dimana memperoleh alat-alat yang diperlukan (Ishak, 2005 dikutip <http://agungwybawa.blogspot.co.id>) Secara sederhana, Prawirokusumo (2001:97) menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran adalah dengan melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, penyediaan sarana serta dukungan promosi serta memasarkan produk usaha kecil. Namun, akses pasar juga harus disertai dengan pengendalian dan pengaturan sehingga terjadi persaingan yang sehat dan pemerataan antara industri kecil, menengah dan besar.

Pemberdayaan melalui pengembangan sumber daya manusia berupa pendidikan formal maupun informal dapat meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuannya. Namun, bersamaan juga perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha. Adanya semangat kewirausahaan akan mendorong semangat belajar dan meningkatkan kualitas diri serta terbuka terhadap inovasi-inovasi baru sehingga dapat mengembangkan usaha menjadi lebih maju.

Pemberdayaan dalam aspek pengendalian dan pengaturan dibutuhkan untuk mengatur dan memantau perkembangan industri kecil. Perijinan industri kecil juga diatur dalam Peraturan Presiden No 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) disebutkan bahwa tujuan pengaturan izin usaha adalah untuk :

- 1) Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- 2) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- 3) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan bank dan non bank; dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah/atau lembaga lainnya.

Selain itu, Kartasmita (1996:5) dalam Sulaksana (2014:36) juga menyebutkan pentingnya kemitraan usaha, sebagai jalur yang penting dan strategis bagi pengembangan ekonomi rakyat. Kemitraan diartikan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Hafsah, 2000:43). Adanya kemitraan usaha dapat meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan

kemampuan usaha kelompok mitra mandiri (Martodireso dan Widada, 2001 : 30). Untuk mencapai model kemitraan yang menguntungkan, yang perlu diperhatikan adalah pihak-pihak yang terlibat dengan peran masing-masing sebagai berikut.

1. Perusahaan penjamin pasar dan penyedia saprodi (benih, pupuk, organik, dan pestisida)
2. Investor alsintan seperti traktor, pompa air, drayer, dan pemipil.
3. Koperasi atau kelompok tani merupakan penyedia lahan pertanian dan tenaga kerja.
4. Petani sebagai pemilik lahan sekaligus tenaga kerja.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan terdapat beberapa upaya alternatif yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberdayakan industri kecil, antara lain peningkatan kemampuan finansial, pengembangan pemasaran, meliputi : a). promosi; b) kemitraan; pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan perijinan,.

D. Industri Kecil

1. Pengertian industri kecil

Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang dimaksud industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut Dumairy (1996:227) istilah industri mempunyai dua arti, yaitu:

Pertama, industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Dalam konteks ini sebutan industri kosmetika, misalnya, berarti himpunan perusahaan penghasil produk-produk kosmetik;

industri tekstil maksudnya himpunan pabrik atau perusahaan tekstil. Kedua, industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.

Berdasarkan pengertian diatas, industri adalah bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga memiliki nilai tambah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM pasal 5 kriteria usaha kecil, antara lain :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling Banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
4. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Arsyad (2004:176) membedakan skala industri menjadi empat golongan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha, yaitu :

1. Industri skala besar dengan jumlah tenaga kerja 100 orang/lebih.
2. Industri sedang dengan jumlah tenaga kerja 20 – 99 orang.
3. Industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5 – 19 orang.
4. Industri kerajinan rumah tangga dengan tenaga kerja kurang dari 5 orang.

Pengertian industri kecil dari berbagai literatur memiliki beberapa persamaan, sehingga dari pendapat-pendapat tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa industri kecil adalah industri milik warga Negara Indonesia, baik berbadan hukum maupun tidak, yang mengolah atau

memanfaatkan sumber daya industri, dengan jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang, dan mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta serta nilai penjualan maksimal Rp. 2,5 milyar per tahun.

2. Klasifikasi Industri

Klasifikasi industri berarti penggolongan/pengelompokan industri. Menurut Departemen Perindustrian, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu :

- a) Industri Dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar dan kelompok kimia dasar. Ditinjau dari misinya, industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur industri, dan bersifat padat modal. Teknologi tepat gunayang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara besar sejajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan ekonomi lainnya.
- b) Industri Kecil yang meliputi antara lain industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, barang dan kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet plastik dan lain-lain), industri kerajinan umum (rotan, kayu, bambu, bahan-bahan galian bukan logam), industri logam (mesin-mesin listrik, alat-alat ilmu pengetahuan dan barang-barang dari logam sebagainya)
- c) Industri Hilir yaitu kelompok usaha anakea industri yang meliputi industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, industri hasil pertanian dan sebagainya (Arsyad, 2004:307)

Selain pengelompokan di atas, menurut Saleh (1986:51-53), di Indonesia terdapat tiga jenis industri kecil, yaitu :

- a) Industri lokal, adalah kelompok jenis industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya pada pasar setempat yang terbatas, secara relatif tersebar dari segi lokasinya. Skala usahanya sangat kecil dan mencerminkan pola perusahaan yang bersifat subsistem. Target pemasaran sangat terbatas sehingga pada umumnya mempergunakan sarana transportasi sederhana (misalnya

- : sepeda, gerobak, dan pikulan). Adapun karena pemasaran hasil produknya ditangani sendiri, maka jasa pedagang perantara boleh dikatakan kurang menonjol.
- b) Industri yang berkelompok atau sentra industri kecil adalah kelompok jenis industri yang dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan/ kawasan produksi yang terdiri dari segi kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis. Ditinjau dari segi tempat pemasarannya kategori yang kedua ini umunya menjangkau pasar yang lebih luas daripada kategori yang pertama. Sehingga peranan pedagang/ pengumpul menjadi cukup menonjol.
 - c) Industri mandiri yaitu kelompok jenis industri yang mempunyai sifat-sifat industri kecil, namun telah berkemampuan mengadaptasi teknologi produksi yang cukup canggih. Pemasaran hasil produksi kelompok ini relatif tidak tergantung pada peranan pedagang perantara. Dimaksudkan dengan sifat-sifat industri kecil yang masih dipunyai oleh kelompok industri ini adalah skala unit usaha yang relatif kecil atau sistem manajemen yang digunakan masih sederhana. Pada dasarnya kelompok industri mandiri ini tidak sepenuhnya dapat dinisbahkan sebagai bagian dari industri kecil, mengingat kemampuannya yang terlampaui tinggi dalam mengakomodasi berbagai aspek modernisasi. Dan sesungguhnya hanya dasar skala penyerapan tenaga kerja semata, maka kelompok ini menjadi termasuk ke dalam bagian dari sub sektor industri kecil.

Adanya pengelompokan industri kecil tersebut maka dapat mendeskripsikan dan memantau perkembangannya secara lebih spesifik.

3. Karakteristik Industri Kecil

Karakteristik dan peranan industri kecil menurut Kuncoro (1997:325) adalah :

1. Tidak adanya pembagian tugas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
2. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal, sehingga mereka cenderung menggantung pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang, perantara bahkan rentenir.

3. Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum.
4. Ditinjau menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman atau tembakau (ISIC31), diikuti kelompok industri barang galian bukan logam (ISIC36), industri tekstil (ISIC32) dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga (ISIC33). Masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada.

4. Beberapa Permasalahan dalam Pemberdayaan Industri Kecil

Menurut Hardjanto (2009:60-61) industri kecil memiliki kekuatan dan kelemahan. Kelebihan industri kecil yaitu :

- a. Memiliki kebebasan untuk bertindak. Bila ada perubahan, misalnya perubahan produksi baru, teknologi baru dan perubahan mesin baru, usaha kecil bisa bertindak dengan cepat untuk menyesuaikan dengan keadaan yang berubah tersebut.
- b. Fleksibel. Perusahaan kecil sangat luwes, ia dapat menyesuaikan dengan kebutuhan setempat. Bahan baku, tenaga kerja dan pemasaran produk usaha kecil pada umumnya menggunakan sumber-sumber setempat yang bersifat lokal. Beberapa perusahaan kecil diantaranya menggunakan bahan baku dan tenaga bukan lokal yaitu dari daerah lain atau impor.
- c. Tidak mudah goncang. Karena bahan baku dan sumber daya lainnya kebanyakan lokal, maka perusahaan kecil tidak rentan terhadap fluktuasi bahan baku impor. Bahkan bila bahan baku impor sangat mahal sebagai akibat tingginya nilai mata uang asing, maka kenaikan mata uang asing tersebut dapat dijadikan peluang oleh perusahaan kecil yang menggunakan bahan baku lokal dengan memproduksi barang-barang untuk keperluan ekspor.

Sedangkan kelemahan-kelemahan industri kecil, antara lain :

- a. Kelemahan struktural, yaitu kelemahan dalam struktur perusahaan, semisal, kelemahan manajemen, pengendalian mutu, penguasaan struktural yang satu saling terkait dengan faktor lain kemudian membentuk lingkaran ketergantungan yang tidak berujung pangkal dan membuat usaha kecil terdormansi dan rentan.
- b. Kelemahan kultural, yaitu merupakan kelemahan yang menyebabkan kelemahan-kelemahan struktural. Kelemahan kultural mengakibatkan

kurangnya akses informasi dan lemahnya berbagai persyaratan lain guna memperoleh akses permodalan, pemasaran, dan bahan baku, seperti :

1. Informasi peluang dan cara memasarkan produk
2. Informasi untuk mendapatkan bahan baku yang baik, murah dan mudah diperoleh
3. Informasi untuk memperoleh fasilitas dan bantuan pengusaha besar dalam menjalin hubungan kemitraan untuk memperoleh bantuan permodalan dan pemasaran.
4. Informasi tentang tata cara pengembangan produk, baik desain, kualitas, maupun kemasannya.
5. Informasi untuk menambah sumber permodalan dengan persyaratan terjangkau.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa industri kecil memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan industri kecil, dilakukan upaya pengembangan dan pemberdayaan. Namun, pemberdayaan industri kecil dan menengah pada umumnya masih kurang menyelesaikan permasalahan yang paling krusial. Penyelesaian terhadap segala permasalahan dalam industri kecil hanya bersifat parsial dan sementara. Menurut Jafar (2004:41) dalam Akbar (2014:20-35) pada umumnya permasalahan yang dihadapi industri kecil dan menengah antara lain adalah:

A. Faktor internal

1. Kurangnya permodalan

Kurangnya permodalan UKM, dikarenakan pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan administratif dan teknis yang diminta pihak bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai angunan

karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan angunan. Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya angunan. Terhadap akses pembiayaan seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang umumnya merupakan unit usaha keluarga mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.

B. Faktor eksternal

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Perkembangannya produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi) selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan. Kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus

disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

3. Implikasi otonomi daerah

Dengan berlakunya UU No 32 tahun 2004, daerah mempunyai otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM.

4. Implikasi Perdagangan Bebas

Berlakunya AFTA pada tahun 2003 dan APEC tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas. Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

5. Sifat Produk Dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang

pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

6. Terbatasnya akses pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional.

Selaras dengan hal tersebut diatas, Tambunan (2002:70) menyatakan bahwa masalah umum dari usaha kecil di Indonesia adalah hampir semua usaha kecil di Indonesia masih menggunakan teknologi lama/tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat yang sifatnya manual. Berikut masalah-masalah yang dihadapi usaha kecil, menurut Tambunan (2002:73):

- 1) Masalah kesulitan pemasaran
Masalah umum yang dihadapi oleh UKM dalam aspek pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor. Selain itu, kurangnya informasi yang akurat dan *up to date* mengenai peluang-peluang pasar di dalam maupun di luar negeri, peraturan dan aspek-aspek legal yang lain.
- 2) Masalah keterbatasan finansial
UKM (usaha kecil dan menengah) khususnya usaha kecil di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, yaitu mobilisasi modal awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.
- 3) Masalah keterbatasan sumber daya manusia
Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala serius UKM di Indonesia terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar.
- 4) Masalah bahan baku
Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak UKM di Indonesia.

5) Masalah keterbatasan teknologi

UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama/tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya *total factor productivity* dan efisiensi didalam proses produksi, tetapi juga menjadikan rendahnya kualitas produk yang dibuat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa industri kecil memiliki kelebihan dan kelemahan, serta beberapa permasalahan yang berasal dari internal maupun eksternal. Penyelesaian terhadap segala permasalahan dalam industri kecil masih bersifat parsial dan sementara. Sehingga dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi industri kecil dapat ditemukan solusi penyelesaian yang tepat.

E. Produk Unggulan Daerah (PUD)

1. Pengertian Produk Unggulan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, yang dimaksud dengan produk unggulan daerah adalah produk, berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Sementara itu, daya saing daerah

merupakan kemampuan daerah dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan yang tinggi dan berkelanjutan serta tetap terbuka terhadap persaingan baik regional, nasional maupun internasional.

Menurut Dedidwitagama (2007) dalam Rochmawati (2015:37) keunggulan lokal atau produk unggulan daerah adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa sumber daya alam, sumber daya alam dan sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah. Produk unggulan sebagai hasil pemanfaatan sumber daya daerah harus ditingkatkan nilainya sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk enangkal produk pesaing dipasar domestik dan/atau menembus pasar ekspor (Anonim, 2000 dalam Sugiatno (2011:15). Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Cahyana Ahmadjayadi (2001) dalam Sugiatno (2011:15) produk unggulan daerah (PUD) adalah unggulan daerah yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. produk unggulan daerah juga berorientasi ramah lingkungan dan beorientasi pada pasar baik lokal maupun nasional dan regional.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa produk unggulan daerah adalah produk, berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan semua sumber daya secara nyata, memiliki ciri khas, menyerap tenaga kerja, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah

2. Faktor-Faktor Vital Produk Unggulan

Faktor-faktor vital produk unggulan daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah produk atau potensi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sugiarno (2011:17-21) menyebutkan faktor-faktor tersebut, antara lain :

a) Pendapatan

Tujuan pokok perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau pendapatan maksimal, disamping ada tujuan lain yaitu pertumbuhan skala usaha dalam jangka panjang, kepentingan sosial dan sebagainya. Dengan demikian untuk melihat keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dengan tercapai tidaknya tujuan dari perusahaan. Demikian pula dengan keberhasilan pengusaha produk unggulan dapat diukur dengan melihat keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.

Kegiatan perusahaan dalam menciptakan keuntungan diperoleh dengan cara mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga, dan sewa tanah. Hasil penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya tersebut diperolehkan keuntungan.

b) Modal kerja

Pada fase merkantilis, pengertian modal dihubungkan dengan pengertian uang, sebagai relevansi dari pandangan merkantilis tersebut, maka Adam Smith dan David Hume atau yang dinamakan fase klasik, muncul pengertian modal dipandang dari sudut barang. Jenis modal ditinjau dari segi sumbernya meliputi (Riyanto, 2001: 171-181) dalam Rochmawati (2015:37):

- 1) Modal asing adalah modal yang berasal dari luar, sifatnya sementara sehingga modal tersebut merupakan hutang dimana pada saatnya harus dibayar kembali.
- 2) Modal sendiri adalah usaha yang berasal dari pemilik dan

yang tertanam didalam usaha tersebut untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya.

c) Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat dominan dalam kegiatan produksi, karena tenaga kerja itulah yang berperan mengalokasikan dan memanfaatkan faktor-faktor produksi lain guna menghasilkan suatu output yang bermanfaat.

Faktor produksi tenaga kerja, merupakan faktor produksi yang penting dan harus diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan Cuma dilihat dari segi jumlah tenaga kerjanya tetapi juga dari segi kualitas dan macam tenaga kerja yang memadai.

d) Bahan baku

Bahan baku atau bahan mentah merupakan faktor produksi yang dibutuhkan dalam proses produksi. Menurut prinsip akuntansi, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk mendapatkannya dalam keadaan siap olah, merupakan harga pokok bahanbaku atau nilai bahan baku.

Harga pokok bahan baku meliputi harga beli yang tercantum dalam faktur penjualan, biaya angkutan, biaya-biaya pembelian, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap diolah. Namun pada kenyataannya harga poko bahan baku hanya dicatat sebesar harga beli menurut faktur dari pemasok. Hal ini dilakukan karena pembagian biaya pada masing-masing jebis bahanbaku dalam faktur seringkali memerlukan biaya akuntansi yang lebih besar bila dibanding dengan manfaat ketelitian perhitungan harga pokok yang diperoleh.

3. Kriteria Produk Unggulan Daerah

Menurut Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) ciri-ciri produk unggulan, yaitu :

- 1) Memiliki akses potensial ke berbagai pasar dan produk unggulan daerah harus mengembangkan produk-produk jasa baru;
- 2) Produk unggulan harus dapat menciptakan kontribusi untuk mendapatkan manfaat produk akhir dan;
- 3) Produk unggulan yang memiliki sesuatu yang sulit ditiru atau bersifat unik.

Pendapat lain mengenai kriteria produk unggulan menurut Deperindag (2008) mencakup sejumlah aspek, antara lain:

- 1) Kandungan lokal yang cukup menonjol dan inovatif baik sektor agribisnis, industri maupun jasa;
- 2) Memiliki daya saing tinggi dipasaran, baik ciri, kualitas maupun harga yang kompetitif, serta jangkauan pemasaran yang luas baik lokal, nasional maupun global.
- 3) Mempunyai ciri khas daerah karena melibatkan masyarakat (tenaga kerja setempat).
- 4) Mempunyai jaminan dan kandungan bahan baku lokal yang cukup banyak dan berkelanjutan.
- 5) Difokuskan pada produk yang memiliki nilai tambah tinggi (kemasan dan pengolahannya).
- 6) Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumber daya, manusia, dan masyarakat.
- 7) Ramah lingkungan (tidak merusak lingkungan) serta tidak merusak budaya setempat.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan kriteria produk unggulan menggunakan bahan baku lokal, berkontribusi terhadap sumber daya, manusia dan masyarakat serta secara ekonomi mempunyai nilai tambah. Produk unggulan harus dapat memberi dampak yang besar, memberi stimulus ekonomi dan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan sumber daya daerah. Dalam usaha membangun produk unggulan seharusnya juga memperhatikan kriteria yang relevan dengan kebutuhan peningkatan daya saing yaitu, keunikan, kemampuan memberi manfaat lebih atau kemampuan memberi keuntungan dengan korbanan yang lebih efisien (Sugiatno (2011)).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mendiskripsikan fenomena maupun peristiwa di lapangan secara mendalam baik berupa kata-kata yang berkaitan dengan pemberdayaan industri kecil yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso. Sependapat dengan pernyataan yang disampaikan Meloeng (2005:11) penelitian deskripsi merupakan “data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata (kalimat), gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti”.

Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Pasolong (2012:72) yaitu nilai dari perubahan-perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka. Jenis data kualitatif adalah data yang berupa kata dan atau kalimat, gambar, skema, yang belum diangkakan. Sependapat dengan pernyataan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti ingin menggunakan penelitian secara mendalam baik melalui pengamatan langsung, observasi, maupun wawancara dengan para informan yang bisa memberikan pemahaman dan bisa menjawab permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan membatasi permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan dalam mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah atau terukur dan dapat mencapai hasil yang diinginkan, atau lebih tegasnya fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi, yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penelitian menjadi terbatas dan spesifik. Kedua adalah penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.

Dalam meningkatkan sektor industri unggulan ditinjau dari beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian, antara lain:

1. Pemberdayaan industri kecil tape dalam meningkatkan sektor industri unggulan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, meliputi:
 - a. Peningkatan Kemampuan Finansial
 - b. Pengembangan pemasaran
 1. Promosi
 2. Kemitraan
 - c. Pengembangan sumber daya manusia
 - d. Pelayanan Perijinan

2. Faktor penghambat dalam pemberdayaan industri kecil yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.
 1. Faktor internal.
 2. Faktor eksternal.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti nantinya akan mendapat data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Lokasi dimaksud dengan lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat yang dipilih sebagai objek penelitian. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti guna memperoleh data.

Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan penelitian adalah Kabupaten Bondowoso. Sedangkan situs penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, Sentra Industri Tape di Kecamatan Binakal, dan Sentra Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Alasan pemilihan lokasi dan situs ini diantaranya mempertimbangkan Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu sentra industri tape singkong di Jawa Timur. Pemilihan situs di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso karena dinas inilah yang menangani urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk pelaksanaan

pemberdayaan industri tape sebagai produk unggulan, dan pemilihan Kecamatan Binakal sebagai situs penelitian didasarkan informasi dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang menyatakan bahwa Kecamatan Binakal dengan jumlah pengusaha tape sebanyak 67 unit usaha tape, merupakan sentra produksi tape di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan pemilihan Kecamatan Wringin dilatarbelakangi oleh jumlah pengusaha tape terbanyak di Kabupaten Bondowoso terdapat di Kecamatan Wringin, yaitu berjumlah 90 unit usaha tape.

D. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, maka perlu ditetapkan sumber-sumber data yaitu seseorang yang bertindak sebagai informan yang sesuai dijadikan atau dipilih sebagai sumber untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian. Sedangkan sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2009 : 225), yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya yang berupa kata-kata dan tindakan-tindakan orang-orang yang dipilih atau dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, pelaku industri tape di Sentra Industri Tape di Kecamatan Binakal dan pelaku industri tape di Sentra Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain di luar penelitian. Sumber data sekunder adalah berupa dokumen, catatan, laporan serta arsip yang dianggap semakin menjelaskan realitas yang terjadi berkenaan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2011:224). Dalam penelitian, data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan, meliputi :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan baik secara terbuka dan terstruktur, dan pertanyaan yang memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap. Wawancara dilakukan pada waktu dan saat yang tepat untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan dapat mengungkap tentang pemberdayaan industri kecil tape di Kabupaten Bondowoso dan hambatan hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah Kepala Seksi Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, Sub seksi Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, pelaku industri tape di Industri Tape di Kecamatan Binakal dan pelaku industri tape di Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan atau melihat dari dekat obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan melihat kondisi industri tape di Kabupaten Bondowoso dan pemberdayaan industri tape yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara pencatatan dan pemanfaatan data-data yang tersedia yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tersebut dapat berupa monografi, arsip, peta, majalah, surat kabar, buku, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Data dokumentasi ini berupa jenis data umum berbentuk prespektif pelaku industri kecil dan menengah dan data tentang kebijakan yang dikeluarkan mengenai hal ini baik yang telah maupun yang dilaksanakan di wilayah Pemkab Bondowoso. Selain itu, dokumentasi dalam bentuk angka juga dibutuhkan dalam penelitian ini. Dokumentasi lain yang mungkin juga diperlukan

adalah seperti foto-foto, kliping, kliping berita, koran, hasil-hasil penelitian dan sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah penelitian sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikemungkinan akan dikembangkan instrumen peneliti sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

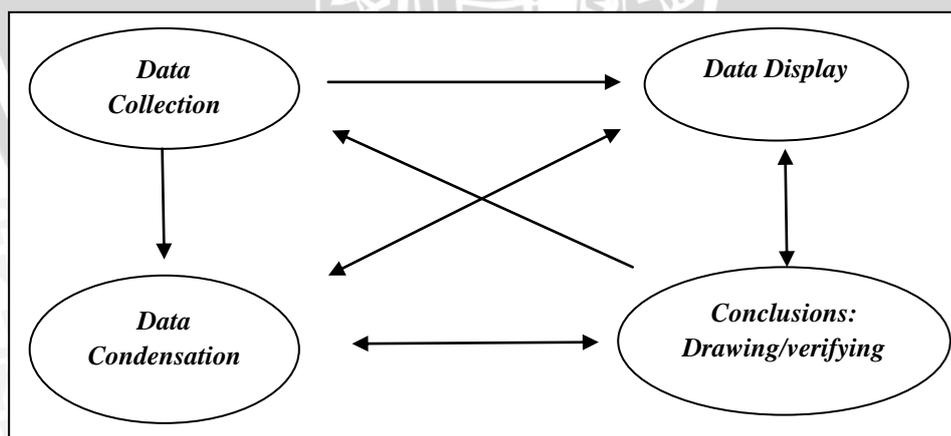
Instrumen penelitian yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian ini antara lain: peneliti sendiri sebagai instrumen utama didukung dengan *interview guide*, file note, alat tulis menulis, serta alat-alat lain yang digunakan dalam penelitian ini. *Interview guide* digunakan sebagai pedoman wawancara dalam pengumpulan data.

G. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendetail dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, yang kemudian akan ditarik satu kesimpulan, dan pada akhirnya dapat menjawab masalah yang diangkat dalam perumusan masalah. Analisis data sangat penting karena dengan melakukan analisis data, maka data dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Analisa terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga mencapai kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas.

Sebagaimana diungkap Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011:246-252) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun kegiatan dalam analisis data yang akan dilakukan penelitian ini terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yang digambarkan dibawah ini.



Gambar 1 Tahap-tahap Analisis Data Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman dalam Saldana (2014:14)

a) *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif, sehingga peneliti selama melakukan pengumpulan data harus bergerak bolak-balik diantara kegiatan kondensasi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan selama waktu penelitiannya hingga data terkumpul.

b) *Data Condensation* (Kondensasi Data)

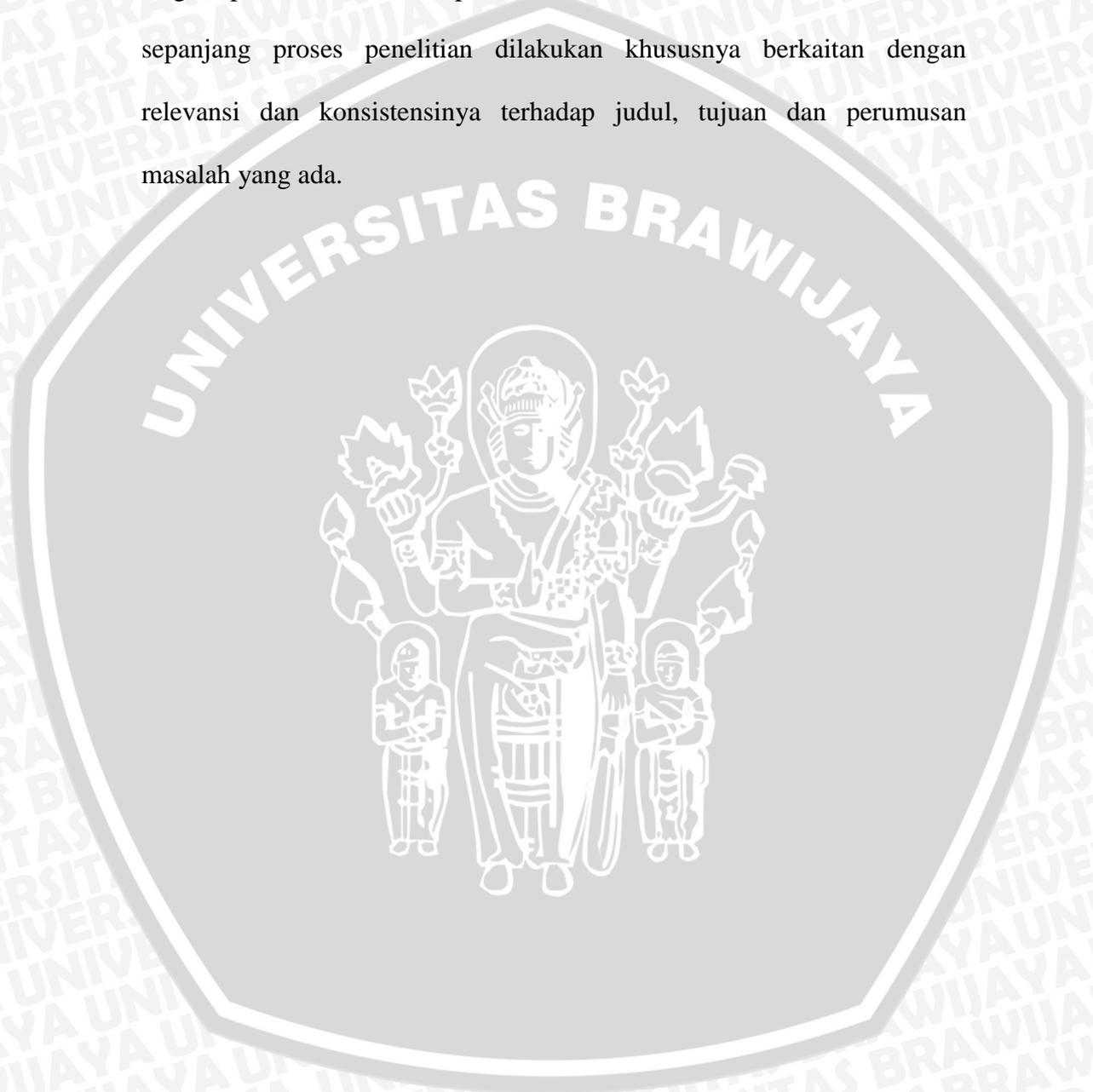
Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, fokus, menyederhanakan, abstrak, dan/atau mengubah data yang muncul dalam sumber di lapangan, daftar wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya menjadi rangkuman, tabel maupun gambar. Dengan kondensasi/proses transformasi berlanjut setelah penelitian di lapangan selesai, hingga laporan akhir selesai. Kondensasi data adalah bentuk analisis yang mempertajam berbagai fokus, mengevaluasi, dan mengatur data sedemikian rupa bahwa kesimpulan akhir dapat ditarik atau diverifikasi.

c) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dimaksudkan mempermudah peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan dari data penelitian dengan mengumpulkan dan menyusun informasi berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian yang paling sering dilakukan adalah bentuk teks naratif.

d) *Drawing /Verifying Conclusions* (Penarikan Kesimpulan / Verifikasi)

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah dipahami, serta dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 2 Peta Kabupaten Bondowoso

Sumber: <http://www.kabupatenbondowoso.go.id>

1. Gambaran Umum Kabupaten Bondowoso

a. Letak Geografis Kabupaten Bondowoso

Secara geografis Kabupaten Bondowoso berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur berjarak sekitar 200 km dari ibukota provinsi (Surabaya) dan terletak pada posisi $113^{\circ}48'10''$ - $113^{\circ}48'26''$ BT dan $7^{\circ}50'10''$ - $7^{\circ}56'41''$ LS. Kabupaten Bondowoso berbatasan dengan Kabupaten Situbondo disebelah utara dan barat, Kabupaten Banyuwangi disebelah timur, dan Kabupaten Jember disebelah selatan. Wilayah Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalur utama Pantura yang



menghubungkan Banyuwangi – Situbondo – Probolinggo – Pasuruan – Surabaya, juga tidak dilalui jalur selatan yang menghubungkan Banyuwangi – Jember – Lumajang – Probolinggo – Pasuruan – Surabaya. Kabupaten bondowoso hanya dilalui jalur provinsi antara Situbondo – Bondowoso – Jember atau sebaliknya. Kabupaten Bondowoso terletak di daerah tapal kuda yang tidak memiliki garis pantai.

Wilayah Kabupaten Bondowoso berada pada ketinggian rata-rata sekitar ± 253 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan puncak tertinggi 3.287 meter dpl dan terendah 73 meter dpl serta dikelilingi oleh gugusan Pegunungan Ijen di sebelah Timur dan pegunungan Argopuro disebelah barat. Secara topografi Kabupaten Bondowoso merupakan daratan, dimana 44,4% wilayahnya merupakan pegunungan dan perbukitan, 30,7% merupakan dataran rendah, dan 24,9% merupakan dataran tinggi dari luas wilayah keseluruhan.

Luas wilayah Kabupaten Bondowoso mencapai 1.560,10 Km² atau sekitar 3,26% dari luas total Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014 sebanyak 759.122 jiwa. Secara administratif Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 23 kecamatan, 10 kelurahan, 209 desa dan 1.409 dusun (Tabel 5).

Tabel 2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Maesan	-	12	62
2	Grujugan	-	11	47
3	Tamanan	-	9	52
4	Jambesari DS	-	9	41
5	Pujer	-	11	80
6	Tlogosari	-	10	98
7	Sukosari	-	4	31
8	Sbr. Wringin	-	6	71
9	Tapen	-	9	52
10	Wonosari	-	12	72
11	Tenggarang	1	11	69
12	Bondowoso	7	4	19
13	Curahdami	1	11	111
14	Binakal	-	8	51
15	Pakem	-	8	47
16	Wringin	-	13	92
17	Tegalampel	7	7	54
18	Taman Krocok	-	7	47
19	Klabang	-	11	49
20	Botolinggo	-	8	100
21	Sempol	-	6	38
22	Prajejan	-	7	43
23	Cermee	-	15	92
	Jumlah	10	209	1.409

Sumber: Kabupaten Bondowoso, 2014

Lokasi Kabupaten Bondowoso berada di sekitar garis khatulistiwa sehingga secara langsung mempengaruhi kondisi iklim. Wilayah Kabupaten Bondowoso termasuk beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson. Kabupaten Bondowoso hanya mengenal dua musim yaitu kemarau dan musim penghujan. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Bondowoso sebesar 5.058,3 mm/tahun dan lama hujan rata-rata 264 hari/tahun.

Sedangkan menurut tinjauan geologis, stratigrafi wilayah kabupaten bondowoso disusun oleh batuan endapan vulkanik hasil gunung api kuartel 21,6% dan hasil gunung api kuartel muda 62,8%, yang banyak mengandung leusit, tufa dan batupasir (5,6%), endapan alluvium 8,5% dan fasies sedimen miosen 1,5% dengan komposisi ukuran dominan lempung, lanau berpasir dan pasir halus ($\pm 96,9\%$) dan ukuran pasir kasar, kerikil, kerakal dan bongkah ($\pm 3,1\%$).

Tabel 3 Jenis Tanah Kabupaten Bondowoso

No	Jenis tanah	Luas	
		Km ²	%
1	Litosol	49,00	3,14%
2	Regosol	782,87	50,18%
3	Andosol	328,59	21,06%
4	Gromosol	5,10	0,33%
5	Mediteran	112,30	7,20%
6	Latosol	282,24	18,09%
Jumlah		1.560,10	100,00

Sumber : Kabupaten Bondowoso Dalam Angka, 2013

b. Makna Lambang Kabupaten Bondowoso



Gambar 3 Lambang Dinas Daerah

Sumber: <http://www.kabupatenbondowoso.go.id>

Semboyan Daerah Kabupaten Bondowoso yang berbunyi “SWASTI BHUWANA KRTA”. Adapun artinya dijabarkan sebagai berikut :

1) *Swasti*, artinya : Selamat, bahagia lahir dan batin ; Merdeka ;

Menyatu diri dengan Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin/keselamatan dunia akhirat.

2) *Bhuwana Krta*, artinya kemakmuran dunia/kesempurnaan dunia.

Jika diartikan SWASTI BHUWANA KRTA berarti barang siapa di dunia melakukan amal perbuatan yang baik dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa akan mendapatkan kesempurnaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Pada lambang daerah kabupaten bondowoso terdapat beberapa simbol yang mengandung makna didalamnya dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Perisai* melambangkan kesatuan pertahanan dari rakyat daerah, warna kuning emas melambangkan keluhuran budi.

2) *Pohon Beringin* melambangkan suatu pemerintahan yang senantiasa berusaha memberikan pengayoman kepada rakyat.

3) *Atas Kepala Kereta Api* (lokomotif) mengepul dalam bentuk garis-garis hitam yang mewujudkan dua sapi beradu muka, menunjukkan kebudayaan khusus serta kegemaran rakyat Bondowoso akan aduan sapi.

- 4) *Kepala Kerbau Putih* berbentuk dangkal melambangkan kerbau yang menunjukkan letak kota sewaktu pembabatan Kota Bondowoso.
- 5) *Kepala Kereta Api* (Lokomotif) melambangkan keberanian perjuangan rakyat Bondowoso, warna hitam yang tak pernah luntur melambangkan kekuatan serta ketetapan hati.
- 6) *Cemeti, Parang, dan Tasbeh*, merupakan pegangan Ki Ronggo yang kewibawaannya dicerdaskan atas ketekunan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 7) *Jagung, Seni Karya, Padi, Daun Tembakau*, menunjukkan hasil utama Kabupaten Bondowoso.
- 8) *Tulang Daun Tembakau Membagi Daun Tembakau Sebelah Luar Menjadi Lima Bagian*, melambangkan dasar negara Pancasila. Tulang Daun Tembakau Membagi Daun Tembakau Sebelah Dalam Menjadi Empat Bagian dan Sebelah Luar Menjadi Lima Bagian, melambangkan Undang-Undang Dasar 1945.
- 9) *Gunung dan Air* menunjukan letak geografis daerah yang dikelilingi oleh gunung-gunung dengan pengairan cukup, warna biru melambangkan harapan atas kesuburan daerah.

c. Visi dan Misi Kabupaten Bondowoso

Visi merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Bondowoso berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2014-2018 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Bondowoso yang Berimana, Berdaya, dan Bermartabat Secara Berkelanjutan”.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Bondowoso, maka harus ada misi yang menyertainya. Misi merupakan tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditentukan. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Bondowoso, maka misi yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bermartabat.
- 2) Melanjutkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan.
- 3) Melanjutkan akselerasi kebangkitan ekonomi yang didukung optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing tinggi, kemitraan strategis, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
- 4) Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif.
- 5) Mewujudkan masyarakat yang responsif gender, menjunjung tinggi HAM serta penegakan hukum.
- 6) Melanjutkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan hidup.

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan pilihan.

Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Bupati/walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas dan fungsi. Tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso yaitu: melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun mendatang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan merupakan dokumen publik yang memiliki peran strategis dalam menjabarkan secara operasional visi dan misi perlu dirumuskan rencana strategis yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang tepat untuk merealisasikan target-target tersebut, adapun uraian sasaran dan indikator sasaran akan diwujudkan dengan pelaksanaan kebijakan dan strategis melalui program dan kegiatan

Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- 3) Perencanaan penyusunan pedoman tehknis pengembangan kelembagaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 4) Pembinaan dan fasilitas bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- 5) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian Badan Hukum, Koperasi serta pengembangan pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 6) Penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran neraca dan catatan atas laporan keuangan.
- 7) Pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- 8) Pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pemberdayaan Simpan Pinjam Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 9) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 10) Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun jumlah pegawai yang ada pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso tahun 2015 adalah 99 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso secara jelas dan terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2015

No	Satuan Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	99
2	Honorar daerah	-
Jumlah Total		99

Sumber : Data Rekapitulasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso mempunyai visi dan misi yaitu:

Visi : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso yaitu terwujudnya koperasi dan UMKM, perindustrian serta perdagangan yang berkualitas, mandiri, tangguh dan berdaya saing.

Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso adalah :

- 1) Mewujudkan koperasi yang berkualitas
- 2) Mewujudkan usaha mikro kecil dan menengah yang mandiri
- 3) Mewujudkan industri yang tangguh
- 4) Menciptakan usaha perdagangan yang berdaya saing

Selain tugas pokok dan fungsi seperti yang tersebut diatas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso juga memiliki peran dalam pengentasan masyarakat miskin di Kabupaten Bondowoso. Bersama dengan Tim penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengambil peran

melalui kinerja sektor koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan sebagai berikut:

a) Peran koperasi dalam pengentasan kemiskinan adalah:

- 1) Warga masyarakat miskin dapat menjadi anggota koperasi maupun embrio koperasi yang ada di lingkungan tempat tinggalnya
- 2) Adanya kemudahan masyarakat miskin mendapatkan modal usaha pada koperasi maupun embrio koperasi yang tersebar hampir di seluruh pelosok desa

b) Peran Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengentasan kemiskinan adalah:

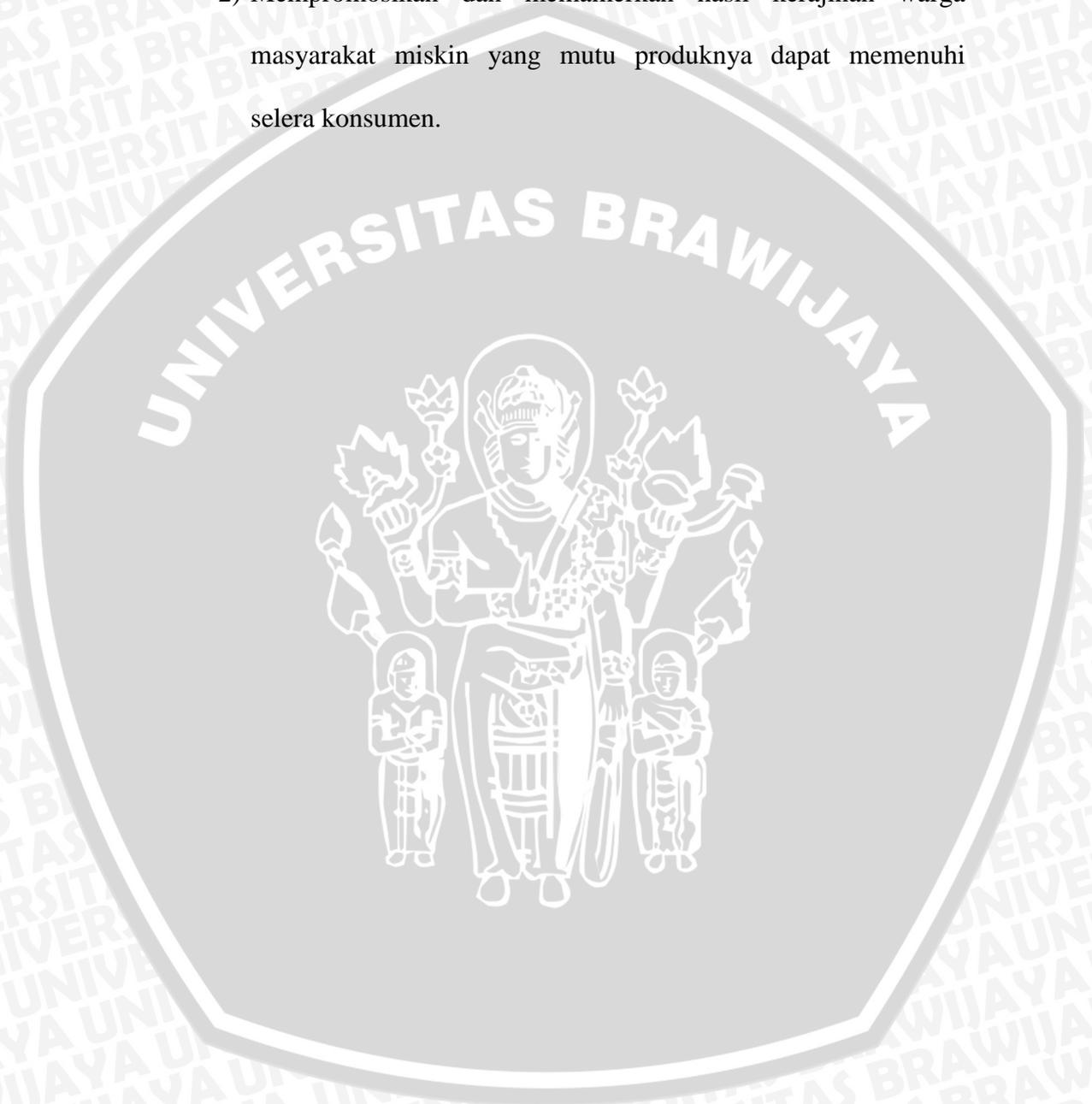
- 1) Pelatihan pengelolaan usaha produktif bagi warga masyarakat miskin, sehingga mereka berdaya dalam berwirausaha secara mandiri
- 2) Peningkatan keterampilan usaha produktif serta peningkatan sarana-prasarana usaha
- 3) Adanya bantuan ekonomi produktif bagi warga miskin

c) Peran sektor perindustrian dalam pengentasan kemiskinan adalah:

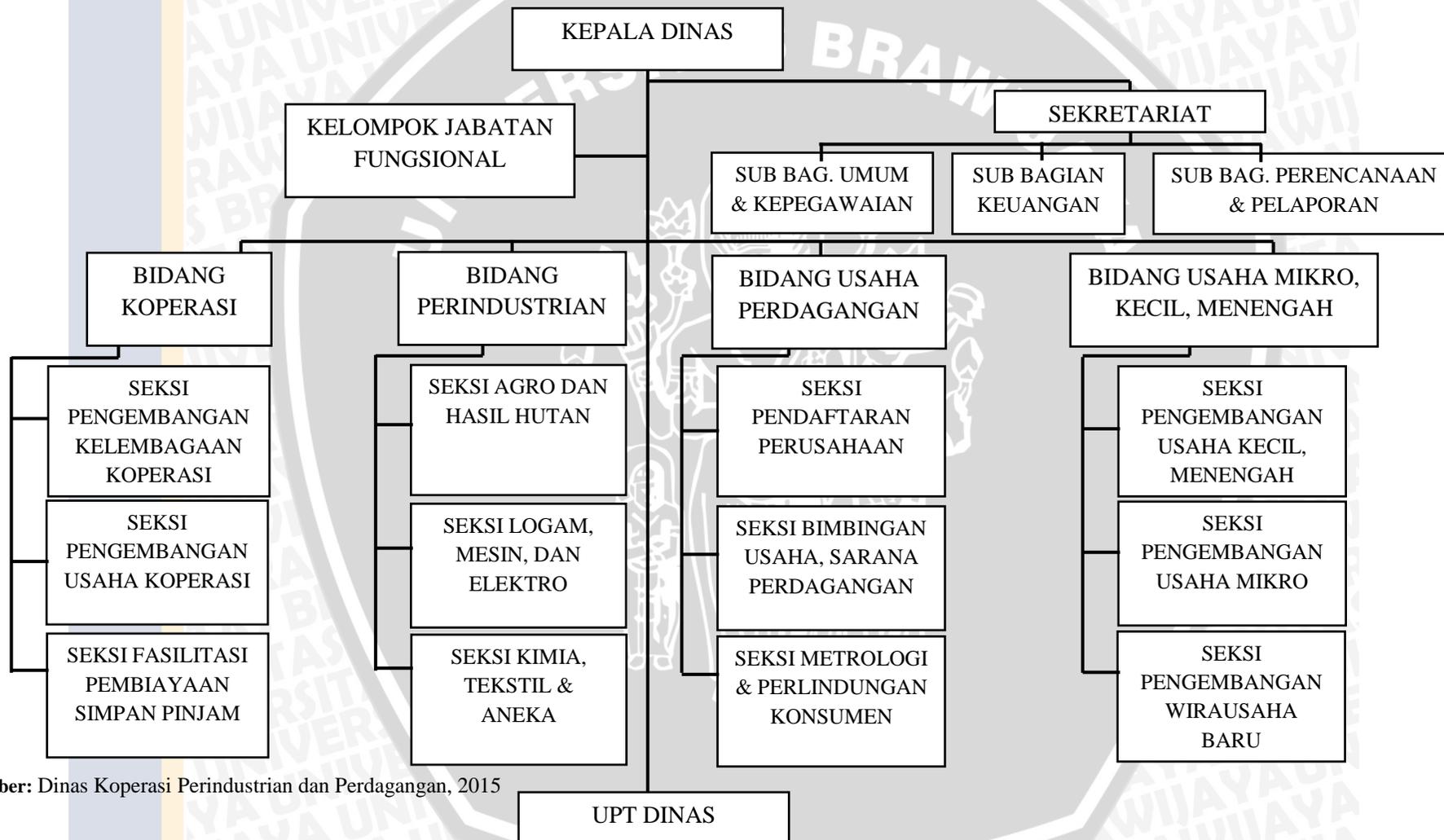
- 1) Menumbuh kembangkan sentra-sentra industri potensial, sehingga warga masyarakat miskin dapat terlibat di dalamnya
- 2) Peningkatan produktifitas, efesiensi, dan diversifikasi produk serta bantuan mesin peralatan bagi masyarakat miskin

d) Peran usaha perdagangan dalam pengentasan kemiskinan adalah :

- 1) Penataan dan pengembangan pedagang kaki lima dan asongan bagi masyarakat miskin, sehingga mereka dapat berusaha secara tertib dan berkembang dengan baik
- 2) Mempromosikan dan memamerkan hasil kerajinan warga masyarakat miskin yang mutu produknya dapat memenuhi selera konsumen.



Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso



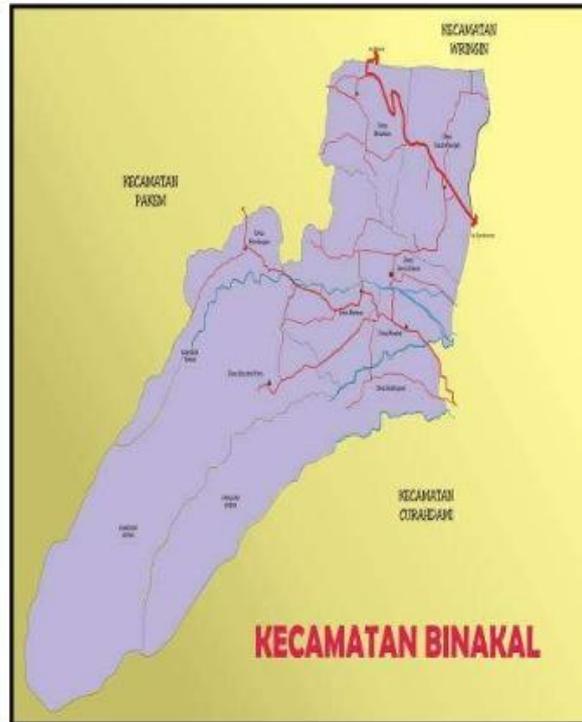
Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, 2015

Gambar 5 Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso

Visi : Terwujudnya Koperasi dan UMKM, Perindustrian serta Perdagangan yang Berkualitas, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing			
Misi I : Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemberdayaan koperasi	Meningkatnya lembaga koperasi yang sehat dan berdaya saing	Penguatan kelembagaan koperasi	Penguatan manajemen koperasi dan peningkatan fasilitasi pengembangankoperasi
Misi II : Mewujudkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Mandiri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemberdayaan UMKM	Meningkatnya produktivitas UMKM	Menumbuhkan dan mengembangkan UMKM serta meningkatkan fasilitasi akses permodalan	Penumbuhan wirausaha baru, penguatan wirausaha dan kelembagaan serta peningkatan fasilitasi akses permodalan bagi UMKM
Misi III : Mewujudkan Industri yang Tangguh			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemberdayaan industri	Meningkatnya produktivitas industri	Mengembangkan industri berbasis sumberdaya lokal	Peningkatan kapasitas produksi IKM dengan memanfaatkan teknologi berbasis sumberdaya lokal
Misi IV : Menciptakan Usaha Perdagangan yang Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif	Meningkatnya aktivitas perdagangan yang dinamis	Meningkatkan sarana pendukung perdagangan, perlindungan konsumen, dan pengamanan perdagangan serta pemasaran	Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan serta pengembangan pasar melalui revitalisasi pasar tradisional

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, 2015

3. Gambaran Umum Kecamatan Binakal



Gambar 6 Peta Kecamatan Binakal

Sumber: Kecamatan Binakal dalam Angka, 2015

Kecamatan Binakal merupakan salah satu kecamatan dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso berada ± 7 km dari ibukota kabupaten. Secara geografis Kecamatan Binakal terletak pada ketinggian antara 235 s/d 572 m di atas permukaan laut. Kecamatan Binakal berbatasan dengan Kecamatan Pakem di sebelah barat dan utara, Kecamatan Curahdami di sebelah selatan dan timur. Kecamatan Binakal memiliki luas wilayah 26,770 ha yang terdiri dari persawahan 840,1 ha; tanah tegalan 732,3 ha; tanah pekarangan 245,0 ha; Hutan negara dan tanah kering lainnya 861,6 ha.

Secara administratif, Kecamatan Binakal terdiri dari 8 desa, 51 dusun/pendukuhan, 32 rukun warga dan 77 rukun tetangga, dengan jumlah

penduduk 15.235 jiwa per akhir tahun 2014. Sebagian besar penduduk Kecamatan Binakal bekerja di bidang pertanian khususnya palawija/tanaman pangan. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan jumlah rumah tangga yang berpenghasilan utama di sektor pertanian sebesar 5.825 rumah tangga (Kecamatan Binakal dalam angka, 2015). Secara umum penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Binakal berupa tegalan dengan komoditi pertanian paling tinggi adalah padi, jagung dan ubi kayu. Adapun komoditi industri unggulan menurut data Kecamatan Binakal dalam angka (2015), secara berturut-turut adalah industri meubel, industri pandai besi, industri tape dan industri bordir. Menurut data BPS Kabupaten Bondowoso (2016), total jumlah pengusaha tape di Kecamatan Binakal adalah 9 unit usaha tape yang tersebar di Desa Jeruk Sok-sok (2unit) dan Desa Sumber Tengah (7 unit).

Tabel. Komoditi industri unggulan

Desa	Komoditi industri unggulan			
	Tape	Bordir	Pandai besi	Meubel
Gadingsari			1	3
Binakal			5	3
Sumberwaru				2
Kembangan				-
Baratan		1		3
Jeruk sok-sok	2	1		6
Bandelan				5
Sumbertengah	7			11
Total	9	2	6	33

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Binakal, 2015 (BPS, Kabupaten Bondowoso, 2016)

4. Gambaran Umum Kecamatan Wringin



Gambar 7 Peta Kecamatan Wringin

Sumber: Kecamatan Wringin dalam Angka, 2015

Kecamatan Wringin merupakan salah satu kecamatan dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso dengan jarak ± 16 km dari ibukota kabupaten. Secara geografis Kecamatan Wringin terletak pada ketinggian 458-516 m di atas permukaan laut. Kecamatan Wringin berbatasan dengan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo disebelah barat, Kecamatan Pakem disebelah timur, dan Kecamatan Tegalampel di sebelah timur.

Secara administratif Kecamatan Wringin terdiri dari 13 desa, 90 dusun/pendukuhan, 81 rukun warga dan 240 rukun tetangga. Jumlah penduduk Kecamatan Wringin berdasarkan hasil proyeksi penduduk akhir tahun 2015 adalah sebanyak 41.354 ribu jiwa. Sebagian besar penduduk Kecamatan Wringin bekerja di sektor pertanian sebesar 13.598 jiwa.

Luas wilayah Kecamatan Wringin 5.801,00 ha terdiri dari persawahan 1173,00 ha; tanah tegalan /kebun 2601,93 ha; tanah pekarangan 397,15 ha; tanah kering lainnya dan hutan negara 638,92 ha. Secara umum penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Wringin berupa tegalan dengan komoditi pertanian paling tinggi adalah padi, jagung dan ubi kayu.

Sedangkan pada sektor industri pengolahan di Kecamatan Wringin, komoditas industri unggulan secara berurutan keranjang ikan, industri tape dan meubel. Jumlah industri tape terbanyak di Kabupaten Bondowoso terdapat di Kecamatan Wringin, yakni 359 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.256 orang berdasarkan statistik daerah kecamatan wringin (BPS, 2016). Industri tape tersebar di Desa Bukor (1 unit), Desa Jambe Wungu (33 unit), Desa Banyuwulu (17 unit), Desa Jatitamban (16 unit), Desa Wringin (138 unit), dan Desa Sumber Canting (154 unit).

Tabel 5 Komoditi Industri Unggulan menurut Desa Tahun 2014

Desa	Komoditi Industri Unggulan		
	Rantang ikan	Tape	Maubel
Ambulu	649	-	3
Bukor	641	1	11
Sumber malang	771	-	11
Jambe wungu	514	33	1
Gubrih	298	-	12
Ampelan	796	-	1
Banyuwulu	1.546	17	6
Jatitamban	572	16	5
Jatisari	761	-	4
Glingseran	632	-	14
Banyuputih	677	-	14
Wringin Tengah	414	138	6
Sumbercanting	68	154	6

Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Wringin (BPS Kabupaten Bondowoso, 2016)

5. Gambaran Umum Industri Kecil Tape

Tape merupakan salah satu olahan makanan dari singkong (ubi kayu) yang di fermentasikan dengan cara menambahkan ragi dalam proses pembuatannya. Adanya bakteri *Saccharomices Cereviseae* pada ragi akan mengubah bentuk fisik singkong yang tadinya keras menjadi lembek, beraroma manis, sedikit asam dan mempunyai aroma alkohol. Industri tape tersebar di beberapa daerah dengan nama yang berbeda-beda. Salah satunya industri tape di Kabupaten Bondowoso yang menjadi makanan khas daerah, sehingga Kabupaten Bondowoso juga sering disebut sebagai “Kota Tape”.

Industri tape di Kabupaten Bondowoso sudah ada sejak tahun 1960-an, dilatarbelakangi oleh kondisi alam Kabupaten Bondowoso yang 35,77 persen berupa hutan dan penggunaan lahan untuk tegalan sebesar 27,74 persen (Kabupaten Bondowoso dalam Angka, 2013) yang cocok untuk membudidayakan ubi kayu.

Tabel 6 Potensi Ubi Kayu di Kabupaten Bondowoso

Produksi 2013 (Ton)	117.918
Produksi 2012 (Ton)	142.940
Produksi 2011 (Ton)	125.237
Produksi 2010 (Ton)	151.423
Produksi 2009 (Ton)	103.438
Produksi 2008 (Ton)	55.388

Sumber Data: Jawa Timur Dalam Angka 2014 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur)

Pada tabel diatas, dapat dilihat produksi ubi kayu di Kabupaten Bondowoso yang mengalami peningkatan, meskipun sempat menurun pada tahun

2011 dan 2013. Produksi ubi kayu masih tinggi dibandingkan sektor tanaman lainnya.

Tabel 7 Produksi Tanaman Pangan Menurut Jenis Komoditi, 2015



Sumber : Kabupaten Bondowoso dalam Angka, 2016

Hal ini mengakibatkan tanaman ubi kayu menjadi salah satu tanaman alternatif tanaman daerah kering yang menguntungkan dari tanaman lainnya. Ubi kayu dapat dikembangkan menjadi beberapa macam.

Tabel 8 Peluang Pengembangan Potensi Komoditas Ubi Kayu

No	Peluang pengembangan potensi komoditas ubi kayu		
	Bahan baku	Peluang industri	Produk
1.	Umbi ubi kayu	Industri tepung,	Tepung tapioka
		industri makanan	Tape, dodol, suwar-suwir, dan tiwul instan
2.	Ampas ubi kayu	Industri pakan ternak	Pakan ternak
3.	Tepung tapioka	Industri hidrolisi	Maltodekstrin, HFS, dan sorbitol
4.	Limbah cair	Industri fermentasi	Cuka, asam cuka, asat sitrat, MSO

Sumber : Kabupaten Bondowoso, 2013.

Pada tabel diatas, dapat dilihat peluang pengembangan potensi ubi kayu yang dapat dikembangkan menjadi industri pengolahan makanan, hidrolisi maupun pakan ternak. Produk olahan ubi kayu yang paling terkenal adalah Tape singkong dan menjadi produk unggulan daerah sehingga Bondowoso lebih dikenal sebagai kota Tape.

Produk unggulan daerah adalah produk, berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan semua sumber daya secara nyata, memiliki ciri khas, menyerap tenaga kerja, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah.

Apabila merujuk pada pendapat diatas, Tape sebagai salah satu industri pengolahan makanan, dalam pembuatannya memanfaatkan sumber daya secara nyata baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dari segi sumber daya alam, yakni memanfaatkan ubi kayu sebagai bahan baku utama yang juga merupakan sektor pertanian unggulan, dan memanfaatkan masyarakat sekitar industri tape sebagai tenaga kerja. Adapun ciri khas tape Bondowoso terletak pada ubi kayu yang digunakan sebagai bahan baku tape. Jenis ubi kayu yang dipilih oleh para produsen tape adalah jenis ubi kayu kuning (mentega) karena ubi kayu mentega dapat menghasilkan tape berwarna kuning, tidak berserat dan tidak berair sehingga daya tahan tape dapat terjaga. Selain itu ubi kayu mentega memiliki rasa manis sehingga tape yang dihasilkan juga memiliki rasa manis.

Tabel 9 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (Persen), 2011-2015

Lapangan Usaha/Industry	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas/ <i>Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products</i>	-	-	-	-	-
2 Industri Makanan dan Minuman/ <i>Manufacture of Food Products and Beverages</i>	34.43	30.74	37.80	38.95	40,35
3 Industri Pengolahan Tembakau/ <i>Manufacture of Tobacco Products</i>	8.10	8.13	8.03	8.21	8,25
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/ <i>Manufacture of Textiles; and Wearing Apparel</i>	0.45	0.47	0.48	0.49	0,50
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/ <i>Manufacture of Leather and Related Products and Footwear</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : PDRB Kabupaten Bondowoso, 2011-2015 (BPS Kabupaten Bondowoso)

Pada tabel diatas, dapat diketahui sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bondowoso 37,80 % pada tahun 2013. Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu sentra industri tape di Jawa Timur tercatat memiliki 506 unit usaha tape dengan jumlah tenaga kerja 1.745 orang pada tahun 2013. Potensi ekonomi perajin tape sekitar rp 938 juta per hari. Selain itu, serapan tenaga kerja juga sangat besar. Jika untuk memproduksi satu ton tape diperlukan 25 tenaga kerja, maka produksi tape di Bondowoso menyerap sekitar 7.508 tenaga kerja (InfoBondowoso.net, 2014) selain itu, kegiatan industri kecil tape di Kabupaten Bondowoso dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar maupun bagi

masyarakat pelaku industri penunjang, seperti pengrajin besek, petani ubi kayu, dan petani bambu. Berdasarkan data Diskoperindag jumlah industri tape dan turunannya terbagi menjadi 23 sentra yang tersebar di beberapa daerah, sebagai berikut :

Tabel 10 Jumlah Sentra Industri Kecil Tape di Kabupaten Bondowoso

Tahun 2015/2016

Kecamatan	Jumlah Sentra	Kecamatan	Jumlah sentra
Binakal	2	Curahdami	1
Bondowoso	1	grujugan	1
Jambesari	1	Tlogosari	1
Tegalampel	1	Sukosari	1
Tenggarang	1	Tapen	2
Wonosari	1	Pakem	1
Maesan	1	Wringin	2
Jambesari darus sholah	3	botolinggo	1
Pujer	1		
Tamanan	3		

Sumber :Data Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso tahun 2015/2016

Mayoritas usaha tape merupakan usaha keluarga secara turun-temurun. Ada beberapa industri tape yang telah memulai usaha tape sejak puluhan tahun, tetapi ada juga pelaku industri tape yang baru memulai usaha sejak beberapa tahun yang lalu. Pada umumnya pelaku industri tape mendirikan usahanya dengan melihat prospek perkembangan usaha tape yang cukup cerah dan di dukung dengan kondisi wilayah yang memungkinkan serta strategis. Selain menjadi pelaku industri tape mereka juga memiliki usaha sampingan yang mayoritas usaha sampingannya adalah sebagai petani.

Tabel 11 Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2014

Penduduk umur 15 tahun keatas yang Bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Tahun 2014		
No.	Uraian	Jumlah
1	Pertn,perkeb, kehut,peternk,perikn	165.985
2	Pertambangan dan Penggalian	5.171
3	Industri Pengolahan	49.113
4	Listrik, Gas dan Air	371
5	Bangunan	20.118
6	Perdag. Besar,Eceran,RM dan Hotel	74.643
7	Angkutan,Pergudang dan Komunikasi	1.929
8	Keuangan,Asuransi, usaha persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	3.784
9	Jasa Kemasy, Sosial dan Perorangan	70.399
Jumlah		400.655

Sumber : Kabupaten Bondowoso dalam Angka, 2015

Bila ditinjau dari sisi jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, maka sebagian besar penduduk Kabupaten Bondowoso bekerja di sektor Pertanian jumlahnya mencapai 165.985 orang atau 41,43 persen sehingga menduduki posisi teratas dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di sektor yang lain. Tenaga kerja pada industri pengolahan juga menempati posisi ke-4, setelah sektor Perdagangan dan sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan besarnya 17,57 persen.

Modal awal untuk mendirikan usaha tape bersala dari modal sendiri. Tingkat sumber daya manusia dilihat dari aspek pendidikan tergolong rendah, dilihat dari pengelolaan usaha yang sederhana dan tidak adanya struktur organisasi yang jelas. Dalam kegiatan produksinya diterapkan pembagian kerja meliputi bagian pengupasan, pencucian, pengukusan, peragian,

penimbangan dan pengemasan. Peralatan yang digunakan selama proses produksi masih sederhana, yaitu pisau, tungku, tempat pencucian singkong, bak (keranjang), timbangan dan blower (kipas angin). Bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi khususnya singkong (ubi kayu) berasal dari pelaku industri tape, yakni menanam sendiri singkong (ubi kayu), atau memasok singkong dari daerah lain di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Bondowoso, sedangkan bahan baku lainnya seperti besek berasal dari pemasok tetap industri. Jumlah bahan baku singkong (ubi kayu) yang diperlukan rata-rata 1 ton untuk setiap kali produksi, dan menghasilkan 4 kwintal tape dengan biaya produksi $\pm 4-5$ juta.

Pemasaran yang dilakukan oleh pelaku industri tape skala kecil adalah dengan menjual langsung tape di pasar. Untuk usaha tape skala sedang dan besar cakupan pemasarannya lebih luas yakni dipasarkan ke luar daerah Kabupaten Bondowoso, seperti ke Situbondo, Jember, Madura, dan Surabaya. Rata-rata harga tape yang dipasarkan berkisar Rp. 5000-7500 per kg sedangkan untuk tape yang dibungkus menggunakan besek berkisar Rp. 5000-20.000 per besek.

Adapun tahapan pembuatan tape singkong adalah sebagai berikut :

1. Persiapan bahan baku

Pada tahap persiapan, bahan baku yakni ubi kayu (singkong) dikupas terlebih dahulu. Kulit ubi kayu dan kulit arinya dikupas dan dicuci sampai bersih.

2. Pemasakan

Setelah di bersihkan, ubi kayu dikukus hingga matang selama $\pm 1-2$ jam dan didinginkan. Setelah dingin, ragi yang sudah dihaluskan sebelumnya ditaburkan merata keseluruh bagian ubi kayu, kemudian disimpan kedalam wadah besek yang telah dilapisi daun singkong. Ubi kayu akan disimpan selama $\pm 2-3$ hari untuk proses pemasakan melalui fermentasi ragi. Jika telah masak, tekstur ubi kayu akan lembut dan mengeluarkan aroma alkohol, maka tape telah dapat dikonsumsi.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pemberdayaan Industri Kecil Tape Dalam Meningkatkan Sektor Industri Unggulan di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

a. Peningkatan Kemampuan Finansial

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan dalam mengembangkan suatu unit usaha. Minimnya informasi dan akses kepada lembaga penyedia pinjaman permodalan menjadi kendala bagi para pelaku industri. Para pelaku industri masih membutuhkan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha. Namun pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) tidak memberikan bantuan permodalan, melainkan memberikan bantuan peralatan. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu NN selaku Kepala Seksi Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso :

“Bantuan modal memang tidak ada, tapi kita kasih alat penunjang produksi, seperti kompor gas, keranjang, *mixer*, *blower*, itu kita kasih. Diskoperindag tidak memberikan bantuan modal, walaupun mau pinjam itu bisa ke langsung koperasi atau kredit bank.” (wawancara 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Hal senada juga disampaikan Ibu IF selaku Analis Industri Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso :

“Kalau bantuan modal, dari dinas sendiri tidak ada. Sebenarnya kalau modal kan sumbernya APBD, dari tingkat I Propinsi terus ke kabupaten, atau bisa juga dari APBN, yang mengelola itu provinsi, kita cuma dapat pelatihannya, peralatannya. Jadi maksudnya modal itu tidak berbentuk uang, bisa pelatihan atau peralatan. Untuk bantuan peralatan, tidak ada syarat khusus hanya mengajukan proposal ke Dinas. Nanti kita survey, kalau layak bisa dapat bantuan. Kita juga sesuaikan anggaran.” (wawancara 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Beliau juga menambahkan :

“Dulu itu pernah ada kayak dana bergulir, tahun berapa lupa, ya tapi gitu, modalnya tidak balik karena mereka (pelaku usaha) menganggap dana itu dikasih sama pemerintah, padahal itu dana pinjaman. Sampai sekarang masih ada beberapa pelaku usaha yang belum mengembalikan modalnya. Jadi tidak ada lagi dan memang tidak ada bantuan modal karena kita tidak ada dana.” (wawancara 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Dari hasil wawancara diatas bahwa Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) tidak memberikan bantuan modal, salah satunya karena keterbatasan dana Diskoperindag. Bantuan yang diberikan berupa peralatan dan diberikan apabila telah dilakukan survey kelayakan usaha. Jika pada saat dilakukan survey dilihat bahwa industri

tersebut memerlukan beberapa alat untuk menunjang produksi, maka akan diberikan bantuan alat penunjang industri yang dibutuhkan. Hal ini juga disampaikan pelaku industri tape di sentra industri tape di Kecamatan Binakal dan di Kecamatan Wringin yang dijumpai oleh penulis. Bantuan yang diberikan pemerintah berupa peralatan produksi tape. Beberapa pengusaha mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman ke lembaga penyedia modal, seperti koperasi atau bank. Modal yang digunakan oleh masing-masing pelaku industri tape berasal dari modal sendiri. Mereka mengakui bahwa modal merupakan kesulitan yang menghambat produksi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu WD selaku pelaku industri tape di Kecamatan Wringin:

“ Modal tidak pernah dapat, dapatnya alat kayak keranjang untuk wadah tape, itu pernah dikasih tahun 2015 kemarin, sebelumnya tidak pernah dapat. Ditinjau kesini dari Dinkes (Dinas Kesehatan), terus diajukan bantuan sama Diskoperindag. Untuk permodalan sendiri, dinas tidak memberikan bantuan. Hanya bantuan berupa peralatan produksi, seperti saya dulu pernah dapet selep ragi, kipas angin, rak atau keranjang tempat tape, blender, sealer. Ya alhamdulillah lah. Hambatan ya modal sama alat. Bantuan modal tidak ada, terus bisa pinjam kemana kita juga tidak tahu. Biasanya kalau kita gak ada modal ya pinjam sendiri ke syariah (bank). Orang-orang bank itu yang datang ke kita, menawarkan pinjaman.”
(wawancara tanggal 6 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu EK selaku pelaku industri tape di Kecamatan Wringin:

“Modal tidak ada dari pemerintah, dari dulu memang. Sudah sering mengajukan tapi tidak ada. Jadi usaha sendiri, pinjam ke BTPN (bank) dan pinjam sama tetangga dek. Kalau bantuan alat itu dapat kompor dan gasnya, blender, *bejen* (wajan), pengepresan, empat

macam itu dapatnya. Ya bisa buat bantu-bantu buat tape. Kayak keranjang wadah tape itu , ya lumayanlah” (wawancara tanggal 30 Oktober 2016 pukul 12.00 WIB)

Tidak adanya bantuan permodalan dari pemerintah juga disampaikan oleh Bapak RD selaku pelaku industri tape di Kecamatan

Binakal:

“Tidak ada, tidak pernah dapat bantuan modal. Kalau disini modal sendiri. Salah satu hambatan produksi ya itu, modal. Karena modal sendiri jadi kadang ada kadang tidak ada. Pernah ada bantuan alat, seperti keranjang, kipas. Ya terbantulah sedikit-sedikit.” (wawancara tanggal 1 September 2016 pukul 14.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh ibu SM selaku pelaku industri tape di Kecamatan Binakal:

“Modal ya cukup lah. Kalau dibilang kurang, ya kurang terus. Tidak pernah dapat bantuan modal. Kalau bantuan alat dapat mesin, blender, keranjang, sealer, kipas angin. Untuk mendapat bantuan ini kita cuma didata sama ibu kampung-nya, dapat bantuan.” (wawancara tanggal 26 November 2016 pukul 09.00 WIB)



Gambar 8 Mesin Selep Ragi dan Kipas Angin, Bantuan Diskoperindag Bondowoso Tahun 2015

Sumber : Data primer hasil observasi peneliti 2016



Gambar 9 Sealer dan Blender, Bantuan Diskoperindag Bondowoso Tahun 2015

Sumber : Data primer hasil observasi peneliti 2016

Dari hasil wawancara diatas bahwa modal menjadi salah satu hambatan dalam proses produksi. Modal yang digunakan pelaku industri tape merupakan modal pribadi. Dalam hal ini, Diskoperindag tidak memberikan bantuan permodalan melainkan memberikan bantuan peralatan kepada pelaku industri tape berupa kompor dan gasnya, blender, sealer, keranjang, kipas angin dan mesin selep ragi. Terdapat pula pelaku industri yang tidak pernah mengajukan bantuan kepada pemerintah, dikarenakan lamanya respon bantuan yang diajukan pada dinas terkait. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu NR selaku pelaku industri tape di Kecamatan Binakal:

“Bantuan dari pemerintah kita tidak pernah dapat, modal dan bantuan peralatan tidak pernah dapat, juga tidak pernah mengajukan. Bukan apa-apa, males ngurusnya, ribet. Kalaupun modal tidak ada, ya tidak produksi. Tidak pernah ambil pinjaman.” (wawancara tanggal 1 September 2016 pukul 15.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan Bapak RH selaku pelaku industri tape di Kecamatan Binakal:

“Saya sudah sering mengajukan bantuan modal, bantuan alat. Bikin proposal, tapi ditunggu-tunggu kok tidak pernah dapat. Informasi pinjam kemana juga tidak ada. Jadi ya sekarang usaha sendiri saja, kalau dapat ya alhamdulillah, kalau engga ya, gak papa. (wawancara tanggal 1 September 2016 pukul 13.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam mengatasi kendala permodalan, pelaku industri tape memilih untuk mengajukan pinjaman kepada bank atau menghentikan proses produksi untuk sementara. Minimnya informasi mengenai prosedur dan akses lembaga penyedia modal menjadi alasan pelaku industri tape menggunakan dana pribadi dalam produksinya. Lamanya respon bantuan dari dinas terkait juga menjadi alasan pelaku industri tape enggan mengajukan bantuan kepada pemerintah.

Tabel 12 Data IKM Tape Penerima Bantuan Peralatan Tahun 2015-2016

No.	Nama	Alamat	Alat (jumlah unit)
1.	Widyawati	Ds. Wringin tengah RT 04/06	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
2.	Sugeng D	Ds. Pancoran RT 14/05	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
3.	Didik	Ds. Kerang	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
4.	Mutmainah	Ds. Tamanan	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
5.	Sutila	Ds. Sumber kalong Rt 15/05	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
6.	Abdurrohman	Ds. Sukodono RT 01/01	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
7.	Mustifah	Ds. Sumbertengah Rt	Kipas angin (1), Bak (2),

		01/01	Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
8.	Maati	Ds. Kembang RT. 06/02	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
9.	Nur Hasanah	Ds. Jambesari Rt 34/05	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
10.	Duha	Ds. Kembang RT 09/03	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
11.	Samsul	Ds. Kembang Rt 04/02	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
12.	Arfi'a	Ds. Wringin RT 02/09	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
13.	Suhdi	Ds. Jambeanom RT 26/07	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
14.	Sumiyati	Ds. Sumbertengah RT 03/02	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
15.	Sakur	Ds. Sumbertengah RT 03/02	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
16.	Hairiyah	Ds. Wringin RT 02/05	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
17.	Siti Ma'rifah	Ds. Sumbertengah RT 07/02	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
18.	Ali wafa	Ds. Wringin RT 3/16	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
19.	Surimah	Ds. Maskuning kulon RT 08/03 Kec. Pujer	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)
20.	Sunardi	Ds. Wringin RT 02/09	Kipas angin (1), Bak (2), Sealer(1), Timbangan kue (1), Mesin selep (1)

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan, 2016

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penerima bantuan peralatan yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2015/2016 kepada pelaku industri tape sebanyak 20 orang pelaku industri tape. Bantuan yang diberikan berupa kipas angin (1 unit), bak (2 unit), sealer(1 unit), timbangan kue (1 unit), mesin selep (1 unit). Selain permodalan, peralatan produksi yang memadai juga menjadi faktor bagi berkembangnya suatu usaha yang dijalankan oleh pengusaha tape. Peralatan yang maju dan tepat guna dapat menghasilkan kualitas produksi yang lebih baik. Sehingga peralatan menjadi salah satu faktor penting untuk perkembangan industri. Mayoritas pelaku industri tape masih menggunakan peralatan tradisional bahkan manual menggunakan tenaga manusia dalam proses produksi tape. Dalam pembuatan tape memang tidak dapat dilakukan tanpa menggunakan mesin/peralatan modern, namun peralatan modern dibutuhkan untuk mengolah produk-produk olahan tape, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu NN selaku Kepala Seksi Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“kalau tape kan buatnya sederhana ya, pake tangan (manual) bisa, tidak harus pakai mesin, kecuali olahan tape seperti brownis, proll itu baru pakai alat.” (wawancara tanggal 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB)

Hal ini senada juga disampaikan Bapak RD selaku pelaku industri tape di Kecamatan Binakal:

“Kendala utama dalam produksi tape sebenarnya alat sama modal. Kalau untuk produksi tape sendiri, kami masih memakai peralatan

sederhana bahkan masih dilakukan manual. Untuk peralatan yang lebih modern kami belum tahu ada tidaknya. Setahu saya, alat untuk mengupas singkong yang modern belum ada, jadi dilakukan secara manual. Ngupas sendiri. Terus pengukusan ya biasa pakai drum atau dandang. Tetapi untuk produk olahan tape seperti suwar-suwir, brownis dan lain-lainnya mungkin sudah ada alat yang lebih canggih. Ya walaupun ada alat yang lebih modern untuk membuat tape, untuk membelinya atau membuat alat tersebut pun kami tidak ada biaya. Karena harganya yang mahal. Jadi kami tetap menggunakan alat yang sederhana saja, kadang kalau bisa kita buat sendiri alatnya, meskipun bukan buatan pabrik, harganya masih terjangkau.” (wawancara tanggal 1 September 2016 pukul 14.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan Bapak RH selaku pelaku industri tape di Kecamatan Binakal:

“Kalau produksi tape kita tidak tahu ada alatnya apa tidak. Kalau produk olahan kayak tape bakar, brownis, proll itu kan masih bisa pakai oven. Tapi kalau tape nya sendiri, saya tidak tahu ada alatnya apa tidak. Bantuan alat ini yang paling dibutuhkan. Kalau bantuan yang dibutuhkan ya banyak, tapi yang paling butuh ya peralatan yang lebih efisien, seperti oven. Kalau pas ada pesenan banyak, tidak *nututi* kalau pake ovenan kue”. (wawancara tanggal 1 september 2016 pukul 13.00 wib)



Gambar 10 Pengupasan singkong bahan baku tape
Sumber : Data primer hasil observasi peneliti 2016

Dari hasil wawancara diatas bahwa disamping kendala permodalan, pelaku industri tape juga masih mengalami keterbatasan peralatan produksi. Peralatan produksi saat ini masih terbatas pada olahan tape saja, tetapi untuk produk tape sendiri masih belum ada peralatan penunjang produksi. Sebagian besar pelaku industri masih menggunakan peralatan tradisional/manual menggunakan tenaga manusia. Adapun bantuan peralatan yang diberikan Diskoperindag kepada pelaku industri seperti keranjang, selep ragi, *blower* (kipas angin), *sealer*, blender dan kompor gas. Terdapat 9 pelaku industri tape yang mendapatkan bantuan peralatan pada tahun 2015/2016 dari 157 unit pelaku industri tape yang tersebar di Kecamatan Binakal dan Kecamatan Wringin (Data Diskoperindag, 2015/2016). Adanya bantuan peralatan oleh pemerintah dapat membantu meningkatkan produktifitas industri tape di Kecamatan Binakal dan di Kecamatan Wringin

b. Pengembangan Pemasaran

1. Promosi

Pemasaran Promosi merupakan satu faktor penting agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Pasar adalah suatu tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan jasa. Pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui proses pertukaran. Produk tape yang dihasilkan di daerah penelitian sebagian besar dipasarkan ke daerah sekitar Kabupaten Bondowoso. Bagi pelaku industri kecil

pemasaran produk dilakukan dengan menjual langsung produk ke pasar-pasar di sekitar daerah Kabupaten Bondowoso. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu NR selaku pelaku industri tape di Kecamatan Binakal:

“Kalau kita industri kecil pasarannya ke pasar aja, di daerah Bondowoso saja. Jadi tiap pagi bawa keranjang trus dijual dipasar Rp. 7000-/kg. Kadang ada juga yang pesen dari luar daerah, kadang kita kirim berapa besek ke luar daerah. Kalau promosi kita tidak pernah lakukan. Biasanya orang tahu tape sini itu ya dari omongan orang- ke orang”. (wawancara tanggal 1 September 2016 pukul 15.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan Bapak RD selaku pelaku industri tape di Kecamatan Binakal:

“Kalau tape sini pasarannya biasanya ke pasar, seminggu sekali kita kirim keluar daerah juga seperti Situbondo, Jember, Surabaya dan Madura. Sini tidak pernah promosi, gak ngerti, ya biasanya orang taunya dari omongan orang yang pernah beli tape kesini.” (wawancara tanggal 1 September 2016 pukul 14.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu EK selaku pelaku industri tape di Kecamatan Wringin:

“Pasarannya ya kirim kepasar, seminggu tiga kali pakai keranjang, pakai besekan. Kalau pake keranjang itu Rp. 7000-/kg kalau pake besekan itu yang kecil-kecil isi 5 besek Rp.8000/besek, yang besar isi 2 kg harganya Rp. 16.000-” (wawancara tanggal 30 Oktober 2016 pukul 12.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas bahwa pelaku industri kecil tape selain memasarkan produknya ke pasar-pasar di dalam daerah Kabupaten Bondowoso juga mengirimkan produknya ke daerah diluar Kabupaten Bondowoso. Umumnya pemasaran dan promosi yang dilakukan masih sederhana, yakni promosi dari orang ke orang. Promosi adalah upaya

untuk mengenalkan suatu produk dan menarik minat konsumen terhadap produk yang dihasilkan, sehingga diharapkan terjadinya peningkatan penjualan. Dalam aspek promosi dan pemasaran, Diskoperindag mengikutsertakan pelaku industri tape melalui kegiatan pameran atau bazaar. Kegiatan pameran ini dilaksanakan oleh pemerintah maupun provinsi dan diikuti pelaku industri tape secara bergilir. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu IF selaku Analis Industri Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“Kalau pemasaran bisa mereka yang melapor sama kita, gimana pemasarannya, tapi tidak banyak juga yang melapor jadi kadang kita yang tanya sama mereka. Kami juga melaksanakan event-event atau bazar untuk mengenalkan produk UMKM kepada konsumen, salah satunya ya tape. Seperti kemarin ada festival tape untuk mengenalkan produk tape ke konsumen. Pesertanya semua pelaku industri yang terdaftar, yang kita kenal, *rolling* sih. Pelaku usahanya kan banyak ya, biasanya 4-5 pengusaha yang ikut, kita juga sesuaikan dengan tema pameran. Tapi biasanya yang ikut itu yang aktif.” (wawancara 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Hal senada juga disampaikan ibu ID selaku Kepala Seksi Bimbingan Usaha Sarana Perdagangan :

“Kalau pemasaran tape, pelaku usaha tape sudah punya outlet sendiri untuk penjualan pun, sudah pemiliknya sudah punya tokonya. Jadi tempat pembuatan sekaligus jualan disitu. Rata-rata sudah punya pangsa pasar sendiri. Kalau yang tradisional, yang *home* industri biasanya di pasar. Untuk bantuan pemasaran, kita ada anggaran untuk bidang promosi, jadi kalau mengadakan pameran-pameran kita selalu bawa produk-produk Bondowoso salah satunya tape, kita selalu bawa, memang tujuannya untuk mengenalkan produk Bondowoso dan membantu memasarkan, jadi mengenalkan produk Bondowoso ke masyarakat luas. Kita menawarkan terlebih dahulu kepada pelaku industri, kan tidak

semua pelaku usaha mau karena bekerja. Kita juga pilih ya, yang terbaik lah dari kualitasnya, dari produknya. Kalau pameran, kebetulan disini itu pameran dari luar kota dari Batam, Kediri. Kalau pameran lokal misalnya kemarin itu, festival tape masuk dalam kegiatan HARJABO (Hari Jadi Bondowoso). Kedepannya kita ingin ada event festival tape, khusus tape, kita masih menyiapkan itu. Jadi kita ingin menjaga identitas tape. Rata-rata pameran itu 8-12 kali setahun. Dengan pameran kita mengenalkan produk tape asli Bondowoso, karena banyak tape yang dijual di luar pakai nama tape bondowoso. Sedangkan kita tidak bisa kontrol kan, karena mereka tidak punya hak paten. Dengan adanya pameran, kita mengenalkan agar masyarakat dapat membedakan mana tape yang asli dari Bondowoso. Selain pameran, kita juga mengupayakan tape dan olahannya sebagai souvenir untuk tamu-tamu dari luar daerah.” (wawancara 21 November 2016 pukul 12.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Beliau juga menambahkan :

“Untuk pemasaran yang mengarah pada pembentukan kawasan destinasi wisata khususnya tape, kita belum ya, masih sedang dipikirkan, nanti kita akan menetapkan daerah-daerah sentra. Industri tape sendiri kan memang tersebar hampir di tiap kecamatan di Bondowoso, memang kebanyakan terdapat di daerah Wringin. Tapi saat ini masih belum ditetapkan satu daerah sentra tape dan belum ada kesepakatan dengan pengrajin tape juga.. Kalau pemasaran melalui media elektronik ada misalnya facebook, instragram tapi tidak hanya tape semua produk IKM.” (wawancara 21 November 2016 pukul 12.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Dari hasil wawancara diatas bahwa industri tape memiliki pangsa pasar sendiri. Pemasaran yang dilakukan industri tape skala kecil atau skala *home industri* yaitu dengan menjual tape curah di pasar dengan harga Rp. 7000-/kg . Dalam aspek promosi dan pemasaran, Diskoperindag mengikutsertakan pelaku industri tape melalui kegiatan pameran atau bazaar. Kegiatan ini membantu para pelaku industri tape untuk memasarkan produk tape kepada masyarakat baik didalam maupun diluar daerah Kabupaten Bondowoso dan memberikan peluang bagi para pelaku

industri tape untuk memperluas akses pemasaran produknya. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 8-12 kali dalam setahun dan diikuti pelaku industri tape secara bergiliran. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak RH selaku pelaku industri tape di Kecamatan Binakal:

“ya, kemarin itu ikut pas ada acara festival tape. Kita dikasih tau, ada festival tape, kirim tape berapa besek kesana, gitu. Biasanya itu giliran, jadi kalau ada pameran tanggal ini tape ini yang ikut, besok tape merk mana yang ikut, gitu. Ya aalhamdulillah, dibantu, ada pameran kan bisa mengenalkan produk tape”. (wawancara tanggal 1 September 2016 pukul 13.00 WIB)

Hal senada juga yang disampaikan oleh ibu WD selaku pelaku industri tape di Kecamatan Wringin:

“iya kemarin pas festival tape itu, kita ikut. Kalau ada acara-acara juga biasanya dari dinas itu telpon, ‘bu besok bawa tape ya sekian, ada pameran’ gitu. Jadi kita kirim. Kita tidak ada promosi, jual ya langsung ke pasar, jualan dipinggir jalan, ada yang kulakan kesini. Kalau ada pameran orang kan jadi tau, ada produk tape dari wringin. Terbantulah adanya pameran”. (wawancara tanggal 6 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu EK selaku pelaku industri tape di Kecamatan Wringin:

“Iya ada pameran-pameran itu juga dikasih tau, tapi saya tidak ikut. Ya repot, karena kan bikin tape disini, jadi tidak sempat.” -
.”(wawancara 30 Oktober 2016 pukul 12.00 WIB)

Tabel 13 Kegiatan Pameran yang diikuti pelaku IKM Tape:

No	Acara	Tanggal	Peserta
1.	Pameran Expo UMKM Bondowoso Kreatif 2015	29-31 Mei 2015	
2.	Pameran Batam, <i>Tourism, Trade And Export Commodity</i> (Batam WECEXPO 2016) Pada Kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional TA 2016.	8-14 Maret 2016	6 Orang

3.	Pameran Produk Unggulan Khas Daerah Dan PKBL Exspo 2016 Pada Kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional TA 2016	19-25 April 2016	4 Orang
4.	Pameran Batik, Bordir, Aksesoris <i>Fair</i> 2016 di Surabaya	10-15 Mei 2016	6 Orang
5.	Pameran Dekranasda Ke 36 Tahun 2016	16-22 Mei 2016	6 Orang
6.	Pameran Pekan Raya Situbondo	24 Mei-4 Juni 2016	6 Orang
7.	Pameran <i>Yogya Time Expo</i> 2016 Pada Kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan Internaisonal TA 2016 di Surabaya	27 Juli-1 Agustus 2016	7 Orang
8.	Pameran Exspo Koperasi Dan UMKM 2016 Pada Kegiatan Promosi Perdagangan Internasional TA 2016 di Surabaya	9-15 Agustus 2016	6 Orang
9.	Pameran UMKM Dan Exspo Perbankan Pada Kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional TA 2016 di Situbondo	30 Agustus-5 September 2016	7 Orang
10.	Festival Muharram	1 -15 Oktober 2016	
11.	Pameran Festival Kopi- <i>Shining Batu Nusantra Coffee Festival</i> di Malang	19-20 November 2016	6 Orang

(Sumber : Diskoperindag, 2016)

Selain pameran atau bazaar, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan pengenalan produk industri tape melalui media cetak berupa buku katalog produk-produk UMKM. Berikut seperti yang disampaikan oleh Ibu NN selaku Kepala Seksi Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“Selain pameran, kita juga ada katalog produk-produk UMKM Kabupaten Bondowoso. Kita bikin buku, produk-produk UMKM, profil usahanya. Kayak usaha tape itu ada beberapa yang kita masukkan di katalog. Jadi orang tau produk-produk UMKM-nya

Bondowoso”. (wawancara 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Hal senada juga disampaikan ibu ID Selaku Kasi Bimbingan Usaha

Sarana Perdagangan :

“Untuk katalog, ada beberapa yang kita masukkan. Biasanya itu yang memang sudah bagus ya, misalnya sudah punya ijin, PIRT. Karena banyak juga pelaku usaha belum punya ijin, jadi kalau mau dipromosikan mereka harus memenuhi kewajibannya, seperti ijin, merk dan sebagainya” (wawancara 21 november 2016 pukul 12.00 wib di dinas koperasi perindustrian dan perdagangan)



Gambar 11 Profil dan Katalog UMKM

Sumber : Data primer hasil observasi peneliti 2016

2. Kemitraan

Diskoperindag juga berupaya menjalin kerjasama dengan toko-toko besar dan minimarket agar produk tape dapat dipasarkan di toko-toko modern, namun masih terkendala dengan masalah ketahanan produk dan kemasan produk, seperti yang disampaikan Ibu IF selaku Analis Industri Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“Kita juga meng*link*-kan usaha kecil sama usaha besar. Jadikan, usaha tape itu ada yang kecil-kecil kita *link*-kan sama usaha tape yang sudah besar. Kayak PKK kabupaten ya, kita juga ada kolaborasi kesana, kita juga coba *link*-kan sama toko-toko kayak minimarket, cuma kalau tape belum, karena kan tidak tahan lama, terus masih wadahnya masih besekan, jadi masih kita usahakan terus”. (wawancara 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaku industri kecil tape memasarkan produknya ke pasar-pasar di dalam daerah Kabupaten Bondowoso dan juga mengirimkan produknya ke daerah diluar Kabupaten Bondowoso. Umumnya pemasaran dan promosi yang dilakukan masih sederhana, yakni promosi dari orang ke orang. Dalam aspek promosi dan pemasaran, Diskoperindag mengikutsertakan pelaku industri tape melalui kegiatan pameran atau bazaar. Selain pameran atau bazaar, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan pengenalan produk industri tape melalui media cetak berupa buku katalog produk-produk UMKM dan media elektronik. Diskoperindag juga berupaya menjalin kerjasama dengan toko-toko besar dan minimarket agar produk tape dapat dipasarkan di toko-toko modern, namun masih

terkendala dengan masalah ketahanan produk dan kemasan produk. Pemasaran produk tape belum dikembangkan sebagai salah satu kawasan wisata tape dan akses sarana prasarana seperti jalan ke tempat-tempat sentra industri masih kurang mendapat perhatian. Jangkauan pemasaran yang luas dapat mengenalkan produk unggulan, termasuk produk tape asli Bondowoso kepada masyarakat luas. Promosi yang menarik juga akan menarik minat konsumen, yang akan berdampak pada meningkatnya permintaan produk tape Bondowoso.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan usaha, karena merupakan faktor penggerak yang menentukan berkembangnya usaha yang dilakukan. Selama ini sumber daya manusia pelaku industri baik dalam hal tingkat pendidikan, kemampuan manajemen keuangan, kemampuan manajemen produksi maupun pemasaran masih minim. Sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal.

Meskipun sebagian besar pelaku industri tape mengetahui cara membuat tape, tetapi diadakannya program pengembangan sumber daya manusia ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku industri tape sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi 1) masih rendahnya pemahaman perajin IKM pangan mengenai tata cara

produksi yang baik dan benar, 2) masih kurangnya pemahaman perajin IKM mengenai perijinan usaha, seperti PIRT, sertifikasi halal, Merk dsb, 3) Kemasan produk kurang menarik, 4) Standarisasi mutu produk kurang, 5) kreativitas rendah dan 6) manajemen usaha yang masih tradisional (Diskoperindag, 2016). Oleh karena itu, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku industri tape terkait kewirausahaan, inovasi produk tape dan kemasan tape, berupa kegiatan pembinaan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu IF selaku Analis Industri Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“Diberikan pembinaan dan pelatihan, pendampingan mengenai inovasi produk tape, kemudian cara pengemasan produk tape kan macam-macam, bisa pakai besek, mika, atau kerdus kotakan itu. Kemudian mengenai pembukuan terkait produksi tape, pemasukan dan pengeluaran. Karena masih banyak pengusaha yang tidak membukukan proses produksinya. Terus mengenai ijin, PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), pentingnya PIRT, sertifikat halal. Kita juga kasih tau cara menjaga kebersihan produk.”. (wawancara 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Hal senada juga disampaikan Ibu WD selaku pelaku industri tape di Kecamatan Wringin:

“Ada pembinaan dari Dinas, sering, ikut pelatihan 6 bulan sekali ke Bondowoso, pelatihan bikin variasi produk tape, seperti tape bakar, brownis tape, proll tape. Kalau ada pembinaan gitu, dinas itu telpon kesini ‘bu bawa orang sekian ada pelatihan’ gitu. Saya yang cari perwakilan, orang sini kan rata-rata pengusaha tape semua, ada 60 KK (Kepala Keluarga) daerah sini saja. Belum Wringin yang bagian sana. Itu penjual tape dipinggir jalan juga hasil binaan dinas”. (wawancara tanggal 6 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu EK selaku pelaku industri tape di Kecamatan Wringin:

“ada pelatihan, pernah diundang pelatihan di Palm Hotel tentang tape trus dikasih uang transport Rp. 400.000-.”(wawancara 30 Oktober 2016 pukul 12.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas bahwa Diskoperindag melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku industri tape terkait inovasi dan variasi produk olahan tape, inovasi pengemasan produk tape, dan terkait perijinan usaha PIRT, serta mengenai menjaga kebersihan dan kualitas mutu produk yang dihasilkan. Pembinaan yang dilakukan dinas dilakukan dan diikuti oleh pelaku industri tape yang sudah mendapatkan bantuan peralatan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemberdayaan berkesinambungan. Tenaga pembina merupakan staff Diskoperindag sendiri, juga bekerja sama dengan beberapa ahli terkait bidang industri kecil. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu IF selaku Analis Industri Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“Pelaksanaan pembinaan setiap tahun ada, tetapi pelaksanaannya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dari Kabupaten. Untuk peserta pembinaan itu yang sudah mendapat bantuan peralatan. Jadi kegiatannya berkelanjutan. Setelah mendapat bantuan alat, kita kasih pembinaan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan pihak Diskoperindag sementara melaksanakan sendiri. Yang memberi pembinaan juga dari kita sendiri, tapi kadang juga mendatangkan narasumber dari luar, misalnya tentang bagaimana mengolah yang sehat, bahan yang sehat, dari Dinkes (Dinas Kesehatan) juga.” (wawancara 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Beberapa kegiatan pembinaan yang telah dilakukan, antara lain :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif : Pelatihan Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga Tahun Anggaran 2015
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2016
3. Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dan/Atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Melalui Pelatihan Teknis Ikm Pangan 2016, meliputi 6 kegiatan :
 - (1)Pelatihan IKM Tahun
 - (2)Pelatihan IKM Makanan Ringan
 - (3)Pelatihan IKM Tempe
 - (4)Pelatihan IKM Kue
 - (5)Pelatihan IKM Pengelolaan Bahan Pangan
 - (6)Pelatihan IKM Tape

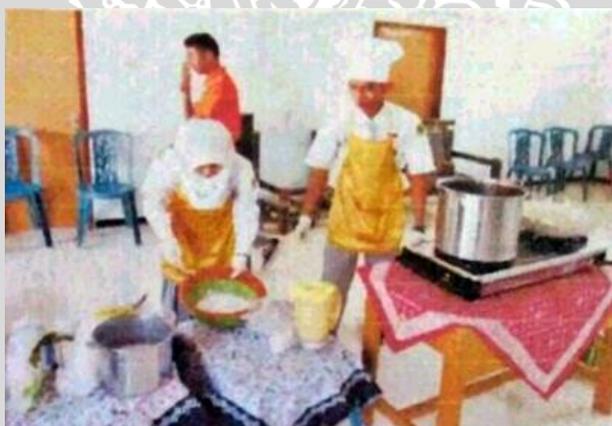
Pelatihan IKM Tape dilaksanakan Aula Sabha Graha Boenari (PWRI), Jl. Khairil Anwar No. 277 A Bondowoso. Pelatihan ini berupa pemberian materi mengenai a) Aspek hukum penerima bantuan hibah pada industri kecil dan menengah (IKM); b) Kemasan, merk, label pangan; c) Peningkatan nilai tambah produk melalui inovasi dan disverifikasi produk; dan d) Kewirausahaan; serta pelatihan berupa Praktek Proses Produksi Olahan Tape (Diskoperindag, 2016).



Gambar 12 Kegiatan Pelatihan IKM Tape 2016
 (Sumber : Data Sekunder Dokumen Diskoperindag, 2016)



Gambar 13 Kegiatan Pelatihan IKM Tape 2016
 (Sumber : Data Sekunder Dokumen Diskoperindag, 2016)



Gambar 14 Pelatihan Olahan Produk Tape (Jus Tape) 2016
 (Sumber : Data Sekunder Dokumen Diskoperindag, 2016)

Pembinaan tersebut bertujuan agar pelaku industri tape dapat menambah wawasan sehingga dapat berinovasi untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing di pasaran. Adanya pembinaan diakui pelaku industri tape bermanfaat untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Pembinaan yang diberikan Diskoperindag membantu pelaku industri untuk mengembangkan usaha yang dijalankan, seperti yang disampaikan Bapak RH selaku pelaku industri tape di Kecamatan Binakal:

“Ada bantuan berupa pembinaan dari dinas, sering, ada studi banding ke Malang juga, ya pembinaan tentang pengolahan tape, produk-produk tape seperti tape bakar, brownis, proll tape. Iya kita diundang sama dinas, trus dikasih pembinaan. Adanya pembinaan dan pelatihan dari dinas untuk saya pribadi sangat membantu, sangat bermanfaat bagi saya untuk mengembangkan usaha. Apalagi buat pedagang kecil seperti saya, ya sedikit-sedikit nambah ilmunya. Sekarang jadi tahu bungkus tape untuk gimana, biar menarik itu gimana, kan bungkusnya sekarang bisa pakai mika, pakai kerdus”. (wawancara tanggal 1 September 2016 pukul 13.00 WIB)

Pembinaan melalui kegiatan studi banding yang dilaksanakan, salah satunya yaitu pelaksanaan studi banding IKM Pangan Di Kab/Kota Malang dan Batu pada tanggal 28-30 April 2016 dengan jumlah peserta 40 orang perajin IKM Pangan termasuk pelaku industri tape, meliputi :

1. Kunjungan IKM Pangan Area Malang
2. Tempat Pelatihan di Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel
3. Kunjungan ke CV, Maju Terus
4. Kunjungan ke Rumah Kemas, CV. AA Packaging
5. Kunjungan ke Malang Strudel

(Sumber : Diskoperindag, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Diskoperindag melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku industri tape terkait inovasi dan variasi produk olahan tape, inovasi pengemasan produk tape, dan terkait perijinan usaha PIRT, serta mengenai menjaga kebersihan dan kualitas mutu produk yang dihasilkan. Pembinaan yang dilakukan dinas dilakukan dan diikuti oleh pelaku industri tape yang sudah mendapatkan bantuan peralatan. Kegiatan pembinaan dan pelatihan berdampak positif terhadap pelaku industri tape. Adanya pembinaan dan pelatihan akan memunculkan inovasi, kreasi dan motivasi kepada pelaku industri untuk lebih mengembangkan usahanya. Salah satunya ditunjukkan dengan banyak variasi produk olahan tape dan kemasan tape yang lebih menarik lebih barvariatif. Macam-macam produk olahan tape seperti suwar-suwir, tape bakar, proll tape, brownies tape, dodol tape, bolu tape, pia tape, bahkan jus tape. Sedangkan macam-macam kemasan tape antara lain menggunakan besek, mika atau kotak karton. Pembinaan dan pelatihan inovasi variasi produk dan inovasi kemasan diharapkan dapat menambah wawasan pelaku industri baik dalam meningkatkan kualitas produk maupun inovasi produk sehingga dapat meningkatkan minat pasar dan dapat meningkatkan penjualan produk tape di Kabupaten Bondowoso.

d. Pelayanan perijinan

Pengaturan perijinan dimaksudkan untuk memudahkan para pelaku usaha memasarkan hasil produknya. Karena masyarakat lebih menyukai produk yang aman dan terjamin kualitasnya. Namun masih banyak pelaku

industri tape yang belum memiliki ijin usaha perdagangan. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu IF selaku Analis Industri Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“ Masih banyak pelaku usaha yang belum mengurus ijinnya. Tapi kita terus informasikan kepada mereka untuk mengurus surat ijinnya. Dengan adanya surat ijin akan lebih mudah bagi kami untuk pendataan dan memberikan bantuan. Kami juga terus mengajak para pelaku usaha tape untuk mengurus dan mendaftarkan produknya. Mereka kadang juga tidak mendaftarkan merk dagangnya, kadang ganti nama dan tidak melapor misalnya sekarang tape 81, besok tape manis 81. Kan sudah beda.” (wawancara 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Hal senada juga disampaikan oleh ibu NN selaku Kepala Seksi Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“Kita juga mengajak pelaku industri untuk mendaftarkan produknya. Kalau ada merk dagangnya, ada ijinnya kan masyarakat lebih percaya sama produknya. Ada produk tape yang belum ada merknya. Jadi kalau kita tanya ‘ini tape merk apa, ya ini tape saya’ gitu. Jadi kita ajak pelaku usaha untuk mendaftarkan merknya”. (wawancara 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Beliau menambahkan :

“Sebenarnya untuk usaha tape tidak punya ijin tidak apa-apa, karena masa tahan produk yang pendek, kurang dari satu minggu. Jadi tidak harus punya ijin, kecuali untuk makanan atau produk olahan tape yang bertahan agak lama. Tetapi dengan adanya ijin, konsumen jadi lebih percaya, karena ada jaminan kualitas kan”. (wawancara 21 November 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Dari hasil wawancara diatas bahwa masih ada pelaku industri tape yang belum mengurus dan mendaftarkan merk dagangnya, Adanya perijinan juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk yang dihasilkan. Untuk itu, Diskoperindag terus menginformasikan dan mengajak pelaku industri tape untuk mengurus ijin dan mendaftarkan merk dagangnya.

Pelaku industri tape yang tidak memiliki atau belum mengurus ijin usahanya, umumnya dikarenakan ketidaktahuan pelaku industri akan pentingnya perijinan dan dirasa tidak perlu mengurus ijin industri karena industri tape yang dilakukan berskala kecil dan dikelola secara sederhana (tidak profesional). Hal tersebut juga disampaikan Ibu WD selaku pelaku industri tape di Kecamatan Wringin:

“Kalau perijinan, ya kalau disini ada, dikasih tahu. Biasanya kita bilang ke dinas, mau minta ijin, nanti disurvei tempatnya, dilihat tempat produksinya, gitu. Tapi kalau orang sini kan gak ngerti kayak gitu, buat apa ngurus ijin, yang penting usaha bisa jalan, jadi ya banyak yang gak ngurus ijin. Apalagi usaha kecil”. (wawancara tanggal 6 september 2016 pukul 11.00 wib)

Meskipun masih banyak pelaku industri tape yang belum mengurus ijin usahanya, namun pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sendiri tidak menerbitkan ijin usaha. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu IF selaku Analis Industri Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“Untuk pengurusan ijin usaha dagang SIUP mengurusnya bisa ke kantor pelayanan perijinan terpadu (KP2T). Biasanya yang dimiliki

pelaku usaha itu ijin industri itu IUI (Ijin Usaha Industri). Sedangkan ijin untuk usaha makanan PIRT, mengurusnya bisa ke Dinas. Untuk perijinan sebenarnya di kita tidak ada, adanya cuma rekom. Jadi misalnya nanti mereka mau survei ya, itu kan ada tim nya, HO, nanti dapat rekom dari sini.” (wawancara 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)



Gambar 15 Contoh Label Merk dengan P-IRT

Sumber : Data primer hasil observasi peneliti 2016

Dari hasil wawancara diatas bahwa pengurusan perijinan seperti SIUP, IUI dan beberapa ijin lainnya dilakukan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso. Sedangkan Diskoperindag Kabupaten Bondowoso hanya memberikan surat rekomendasi survey tempat usaha bagi pelaku industri tape yang ingin mengurus ijin usahanya, serta memfasilitasi pengurusan ijin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) untuk produk makanan dan minuman. Hal ini juga disampaikan bapak Bapak RH selaku pelaku industri tape di Kecamatan Binakal:

“Untuk perijinan sendiri, ya dinas memfasilitasi, misalnya ijin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) untuk produk makanan. Kalau mau mengurus ijin bisa ke Dinas, terus biasanya kalau ijinnya habis atau yang belum punya ijin itu diingatkan sama dinas untuk mengurus ijinnya”. (wawancara tanggal 1 September 2016 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Diskoperindag hanya memberikan rekomendasi survey bagi industri yang ingin mendapatkan ijin industri serta ijin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Adanya perijinan akan menjamin dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. Namun masih ada pelaku industri tape yang belum mendaftarkan merk dagangnya atau mengurus ijin industrinya, karena kegiatan produksi tape yang dilakukan dirasa belum profesional, sehingga tidak membutuhkan perijinan. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya perijinan, juga menjadi alasan banyaknya pelaku industri yang tidak mempunyai ijin industri. Dalam hal ini, Diskoperindag terus menghimbau dan menginformasikan pelaku industri untuk mengurus surat ijin industrinya.

2. Faktor penghambat dalam pemberdayaan industri kecil Tape di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Dalam pelaksanaan pemberdayaan industri kecil tape Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso mengalami beberapa hambatan-hambatan.

a. Faktor Penghambat Internal dalam pemberdayaan industri kecil Tape di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Faktor penghambat internal yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan pemberdayaan industri kecil,

adalah minimnya ketersediaan anggaran bagi kegiatan pembangunan sektor koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan dan minimnya ketersediaan aparatur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu IF selaku Analis Industri Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“Kalau bantuan modal, dari dinas sendiri tidak ada. Sebenarnya kalau modal kan sumbernya APBD, dari tingkat I Propinsi terus ke kabupaten, atau bisa juga dari APBN, yang mengelola itu provinsi, kita cuma dapat pelatihannya, peralatannya. Jadi maksudnya modal itu tidak berbentuk uang, bisa pelatihan atau peralatan. Jadi memang tidak ada bantuan modal karena kita tidak ada dana.” (wawancara 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Dari hasil wawancara diatas bahwa Diskoperindag tidak memberikan bantuan modal/dana kepada pelaku industri tape dikarenakan minimnya anggaran. Adapun dana yang diberikan baik dari pemerintah pusat, tidak selalu berupa dana utuh (uang) melainkan dapat berupa bantuan peralatan dan pelatihan. Sehingga Diskoperindag tidak memberikan bantuan modal berupa uang kepada pelaku industri tape. Selain minimnya anggaran, faktor penghambat lainnya dalam pemberdayaan adalah minimnya ketersediaan aparatur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Industri kecil yang beraneka ragam dan meningkat setiap tahunnya menyulitkan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai Diskoperindag, seperti yang disampaikan Ibu IF selaku Analis Industri Agro dan Hasil

Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“Dalam pendataan dan pengawasan industri tape yang sudah mengurus ijin, kami tidak bisa mengecek satu-persatu. Jumlah pegawainya tidak banyak, tugasnya kan tidak hanya mengurus usaha tape, tapi yang lainnya. Terus kadang pelaku usaha itu mendaftar, misalnya hari ini mendaftarkan usahanya atas nama bapaknya, nah besok si ibunya datang mendaftarkan usaha atas nama dia. Itu kita masih kesulitan untuk pendataannya”. (wawancara 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa terbatasnya sumber daya aparatur menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan, terutama dalam pendataan industri kecil yang sudah mempunyai ijin usaha. Jumlah sumber daya apartur dinas kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah industri kecil di Kabupaten Bondowoso, sehingga pengawasan terhadap pelaku industri kecil tidak maksimal.

b. Faktor Penghambat Eksternal dalam pemberdayaan industri kecil tape di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Beberapa faktor penghambat terkait pemberdayaan industri kecil tape, diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber daya Manusia (SDM)

Proses pemberdayaan industri tape yang dilakukan di Kecamatan Binakal dan Kecamatan Wringin mengalami beberapa kendala, salah satunya kurangnya jiwa kewirausahaan atau *entrepreneurship* para pelaku industri kecil. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu NN selaku Kepala Seksi

Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“Kalau kendalanya, mungkin ya jiwa kewirausahaannya kurang ya. *Entrepreneurship*-nya. Misalnya, kita pernah kasih pembinaan tentang kemasan atau variasi produknya, nanti tape itu bisa dibikin proll, brownis dan lain-lain, tapi ya gitu, mereka bilang ‘ya segini aja udah laku bu, gak papa’. Jadi masih hanya berorientasi pada penjualan, pokoknya produk laku di Bondowoso, sudah selesai.” (wawancara 2016 di dinas koperasi perindustrian dan perdagangan)

Beliau juga menambahkan :

“Kebanyakan dari mereka tidak mengikuti atau tidak mau ketika kita beri masukan untuk inovasi produk atau pengemasan. Padahal dengan inovasi kemasan akan semakin menarik minat pembeli. Sehingga tape tidak selalu dalam bentuk besek, bisa diganti pakai mika atau kerdus kotakan. Kan yang beli bukan dari sini saja, dari luar daerah juga ada. Jadi kemasannya lebih menarik”. (wawancara 30 Agustus 2016 di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Selain itu, terdapat pelaku industri yang lebih memilih bekerja daripada mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh dinas, seperti yang diungkapkan oleh Ibu WD, selaku pengusaha industri tape di Kecamatan

Wringin :

“ Ya kalau pembinaan atau pelatihan itu ada, tapi masyarakat sini (pelaku industri tape) biasanya tidak mau ikut kalau tidak ada bantuan. Kalau ada pelatihan-pelatihan seperti itu biasanya masyarakat tidak datang dan lebih memilih bekerja untuk produksi tape atau kerja yang lain-lain. Karena kalau ikut pelatihan kan cuma dikasih tau gimana buat variasi produk tape, bungkusnya gimana, transport dibiayai Rp. 30.000,- sedangkan kalau kerja kan mereka dapat uang, paling tidak Rp. 100.000,-. Jadi mereka mending kerja”. (wawancara tanggal 6 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Hal ini juga diungkapkan ibu SM selaku pelaku industri tape di Kecamatan Binakal:

“kalau pembinaan pernah ada, diundang juga sama dinas, tapi tidak datang karena ya repot. Disini kan buat tape tiap hari, jadi tidak sempat untuk ikut pembinaan”. (wawancara tanggal 23 November 2016 pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas bahwa kurangnya semangat kewirausahaan pelaku industri tape menjadi kendala dalam proses pemberdayaan. Pelaku industri tape yang kurang pro-aktif terhadap pembinaan yang dilaksanakan dinas, biasanya dikarenakan sudah cukup puas dengan pencapaian usahanya, sehingga tidak mau melakukan inovasi atau pengembangan-pengembangan produknya. Alasan lainnya adalah tidak adanya bantuan yang diberikan dalam kegiatan pembinaan. Karena pembinaan yang diberikan dinas hanya berupa informasi atau pengetahuan terkait pengembangan produk, namun tidak disertai pemberian bantuan baik modal maupun peralatan. Sehingga pelaku industri tape lebih memilih bekerja karena dapat menghasilkan pendapatan, daripada mengikuti pembinaan yang dilakukan dinas.

Hambatan lainnya dalam proses pemberdayaan adalah pola pikir masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu IF selaku Analis Industri Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“Hambatannya lainnya itu pola pikir masyarakat. Kayak kita kemarin sudah kasih tahu tentang pembukuan, jadi produksi tape itu di catat, di bukukan, tapi ya pelaku industrinya itu gak buat. Kalau kita datengi terus ditanya, ‘bu udah bikin pembukuan

belum?’ jawabnya belum, gitu. Padahal dengan adanya pembukuan, kita jadi tahu produksinya berapa, pemasukan berapa”. (wawancara 30 agustus 2016 pukul 10.00 di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu WD, selaku pengusaha industri tape di Kecamatan Wringin:

“Kalau pembukuan gitu, kita tidak ada. Ya dikasih tahu sama dinas, tapi kalau masyarakat sini tidak mengerti begituan, buat apa, ribet. Kita tidak paham gimana nulisnya, jadi ya tidak buat pembukuan, cuma oret-oretan biasa, produksi berapa, singkongnya berapa, transportnya berapa, gitu aja”. (wawancara tanggal 6 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa faktor penghambat dalam pemberdayaan adalah kurangnya semangat kewirausahaan dan pola pikir masyarakat. Kurangnya semangat kewirausahaan untuk mengikuti pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dan pola pikir masyarakat yang mudah puas terhadap pencapaian penjualan produknya sehingga terkadang menolak atau tidak mau berinovasi.

2. Bahan baku

Salah satu kendala yang dihadapi para pelaku industri tape di Kecamatan Binakal dan Kecamatan Wringin adalah masalah ketersediaan bahan baku, yakni ubi kayu (singkong). Ketersediaannya bahan baku merupakan faktor penting dalam proses produksi. Tanpa adanya bahan baku, proses produksi tidak akan berjalan. Ketersediaan bahan baku produksi yang tidak sebanding dengan permintaan pasar memaksa pelaku industri tape memasok ubi kayu dari daerah lain di dalam Kabupaten Bondowoso. Meskipun ketersediaan bahan baku singkong dapat dipasok

dari daerah lain di luar Kabupaten Bondowoso, tetapi kualitas singkong dari luar tidak sama dengan kualitas singkong khas Bondowoso, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas rasa tape yang diproduksi. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu NN selaku Kepala Seksi Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“Kendala produksi itu bahan baku, yaitu singkong. Produksi singkong sendiri menurun karena sekarang banyak petani singkong yang beralih menanam padi atau menanam yang lainnya selain singkong. Sehingga produksi singkong menurun. Biasanya para pelaku industri masuk dari daerah lain di luar Bondowoso, seperti jember. Tapi ya beda rasa tapenya. Makanya kadang ada tape, namanya sama-sama tape bondowoso tapi rasanya beda, agak kecut. Itu bisa jadi karena singkongnya bukan singkong Bondowoso”. (wawancara 30 Agustus 2016 di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Dari hasil wawancara diatas bahwa ketersediaan bahan baku yakni ubi kayu (singkong) menurun. Hal ini dikarenakan lahan yang digunakan untuk menanam singkong beralih ditanami tanaman lainnya selain singkong. Sehingga pelaku industri tape terkadang memasok singkong dari daerah lain. Tetapi singkong yang dipasok dari daerah diluar Kabupaten Bondowoso memiliki kualitas yang berbeda dari singkong Bondowoso.

Mengatasi ketersediaan ubi kayu (singkong) yang naik turun, sebagian pelaku industri tape menanam sendiri ubi kayu (singkong) yang digunakan untuk pembuatan tape untuk menjaga kualitas tape yang dihasilkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu NR selaku pelaku industri tape di Kecamatan Binakal:

“Salah satu kendala dalam produksi tape adalah bahan baku, yaitu singkong. Kalau kita biasanya tanam sendiri atau membeli dari daerah lain yang masih daerah Bondowoso, biasanya di daerah tamanan. Karena untuk tape sendiri singkongnya khusus, singkong kuning (singkong mentega), dan yang paling bagus itu dari daerah tamanan. Kalaupun pesanan lagi banyak, tetapi singkongnya tidak ada, ya tidak produksi daripada tape nya tidak enak, tidak Manis. Biasanya kita tanam sendiri, pokoknya tanahnya bagus, bukan tanah sawah. Kalau tanah sawah singkongnya tidak berkembang, tidak besar-besar. kalau untuk buat tape dipilih yang besar-besar, kira-kira 7-9 bulanan sudah panen”. (wawancara tanggal 1 September 2016 pukul 15.00 WIB)

Selain itu, faktor cuaca juga mempengaruhi kualitas bahan baku singkong, seperti yang diungkapkan Ibu WD selaku pelaku industri tape di Kecamatan Wringin:

“Cuaca itu juga berpengaruh, jadi kendala. Kalau pas musim kemarau itu singkongnya jadi kering, terus disini kadang pas musimnya orang tanam sengon, itu rusak ke tanahnya juga berpengaruh sama singkongnya, singkongnya jadi tidak enak”. (wawancara tanggal 6 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas bahwa terkadang pelaku industri tape menanam sendiri ubi kayu (singkong) yang digunakan untuk pembuatan tape. Hal ini untuk mengantisipasi ketersediaan singkong dipasaran dan untuk menjaga kualitas tape yang dihasilkan. Selain, peralihan lahan singkong, cuaca juga berpengaruh terhadap ketersediaan singkong.

Meskipun ubi kayu (singkong) merupakan faktor penting dalam produksi tape di Kabupaten Bondowoso, tetapi masih belum ada pemberdayaan untuk mengatasi ketersediaan singkong di Kabupaten Bondowoso. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu IF selaku Analis Industri Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso:

“Untuk kemitraan sama petani singkong, kita belum lakukan. Kami masih mencanangkan kerjasama dengan petani. tahun depan mungkin ya. Kita akan menetapkan daerah-daerah yang khusus untuk ditanami singkong. Nantinya bisa memenuhi kebutuhan singkong di Bondowoso. Kalau singkong Bondowoso kan khas, singkong kuning, jadi kita ingin menjaga kualitas rasa tape khas Bondowoso.” (wawancara 30 Agustus 2016 di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku ubi kayu (singkong) menjadi hambatan dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskoperindag. Mengatasi hal tersebut, pelaku industri tape memasok singkong dari daerah lain di luar Kabupaten Bondowoso. Ada pula pelaku industri tape yang menanam sendiri singkong untuk pembuatan tape. Biasanya singkong yang berasal dari luar daerah Kabupaten Bondowoso berbeda kualitasnya dengan singkong Bondowoso, sehingga akan berpengaruh terhadap rasa tape yang dihasilkan. Selain itu, cuaca dan jenis tanah juga berpengaruh terhadap ketersediaan singkong. Dalam hal ini Diskoperindag belum melaksanakan kemitraan dengan petani singkong guna menjaga ketersediaan singkong untuk pembuatan tape. Kemitraan dengan petani singkong dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan bahan baku singkong dan menjaga kualitas tape yang dihasilkan.

3. Modal

Hampir setiap pelaku industri menghadapi masalah permodalan, termasuk pelaku industri tape. Permodalan merupakan faktor penting untuk dapat mengembangkan suatu unit usaha. Sebagian besar pelaku industri tape menggunakan modal pribadi dalam usahanya, sehingga

kapasitas produksi bergantung pada besarnya modal yang dimiliki. Tidak adanya bantuan dari pemerintah dan kurangnya informasi mengenai permodalan menjadi alasan pelaku industri tape terhambat modal dalam proses produksinya. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu WD selaku pelaku industri tape di Kecamatan Wringin:

“Hambatan ya modal sama alat. Bantuan modal tidak ada, terus bisa pinjam kemana kita juga tidak tahu. Biasanya kalau kita gak ada modal ya pinjam sendiri ke syariah (bank). Orang-orang bank itu yang datang ke kita, menawarkan pinjaman”. (wawancara tanggal 6 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Beliau juga menambahkan :

“Informasi modal itu ya ke Disperindag, tapi ya gitu, kalau pas tanya ke Disperindag, kan saya kenalnya sama yang bagian kemasyarakatan saja, kalau masalah keuangan itu beda orang saya gak kenal. Kalau kenal kan bisa ngajukan pinjaman. Tapi kalau sudah tanya ke Disperindag bilangnya beda jalur. Kan repot, jadi disini itu sebetulnya usaha mandiri dek, usaha sendiri, cari uang dari mana aja yang penting kerja. Tidak pernah dapat bantuan. Ya itu, setelah ada peninjauan dari Dinkes baru dapat bantuan alat”. (wawancara tanggal 6 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui kendala permodalan yang dihadapi pelaku industri tape dikarenakan tidak ada bantuan permodalan dari pemerintah dan kurangnya informasi dinas terkait mengenai prosedur dan lembaga penyedia pinjaman. Sehingga pelaku industri tape yang terkendala modal mengatasi sendiri dengan melakukan pinjaman bank atau menghentikan sementara proses produksi.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pemberdayaan Industri Kecil Tape Dalam Meningkatkan Sektor Industri Unggulan di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab terhadap pembangunan daerah melalui pemberdayaan potensi yang ada di daerah. Potensi daerah juga akan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi potensi daerah dan bersama masyarakat harus bisa mengelola potensi daerahnya sebaik mungkin untuk kemajuan bersama. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mampu mendorong dan memfasilitasi munculnya produk unggulan daerah dengan mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimiliki daerah.

Salah satunya pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan selaku unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan industri kecil dan menengah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12 ayat 2 dijelaskan bahwa usaha kecil dan menengah merupakan salah satu urusan wajib pemerintah kabupaten/kota yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan

pasal 12 ayat 3 bahwa urusan pemerintahan pilihan salah satunya adalah perindustrian. Pemberdayaan industri kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 72 ayat 2, pemberdayaan dilakukan dengan :

- b) Perumusan kebijakan
- c) Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- d) Pemberian fasilitas

Termasuk industri kecil di Kabupaten Bondowoso yang beragam dan memiliki potensi untuk dikembangkan secara optimal, salah satunya adalah industri tape yang juga merupakan industri/produk unggulan Kabupaten Bondowoso. Adanya pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat membantu industri kecil menghadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses industri, dan diharapkan pemberdayaan oleh pemerintah dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, sebagaimana asas pemberdayaan yang disebutkan dalam Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso khususnya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kewajibannya sebagai pemberdaya khususnya kepada masyarakat pelaku industri tape dengan menekankan kepada proses yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Dalam hal ini pemerintah menggunakan pendekatan pemberdayaan sebagaimana yang diungkapkan Suharto (2009:67) yaitu pemungkinan dan

penyokongan. Pemungkinan ialah dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Dinas Koperasi dan Perindustrian Kabupaten Bondowoso telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku industri tape mengenai cara pengembangan produk, baik desain, kualitas, maupun kemasannya. Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Sedangkan, penyokongan ialah dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan

Adapun, proses pemberdayaan dilaksanakan secara terarah dan terus-menerus sampai masyarakat mampu untuk mandiri. Sebagai suatu proses, pemberdayaan melalui suatu masa yang bertahap mulai dari belajar hingga mencapai status mandiri, sebagaimana yang diungkapkan Sulistiyani (2004:83) sebagai berikut :

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses memberdayakan masyarakat, dimana tercipta pra kondisi supaya

dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.

- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan wawasan terbuka dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian ini dapat berupa inovasi, kreasi oleh masyarakat. Dalam tahapan ini pemerintah hanya menjadi fasilitator karena masyarakat sudah dapat mandiri.

Upaya pemberdayaan Diskoperindag Kabupaten Bondowoso dalam memberdayakan industri kecil mengacu pada proses dan tahap pemberdayaan yang diungkapkan Sulistiyani (2004:83), yakni pada tahap kesadaran dan pembentukan perilaku sadar diri, Diskoperindag Kabupaten Bondowoso memberikan motivasi serta pembinaan dan pelatihan bagi pelaku industri tape berupa pendampingan mengenai pemasaran dan menjaga kualitas produk tape yang dihasilkan. Pada tahap transformasi kemampuan kemampuan berupa wawasan pengetahuan, dan keterampilan dasar, Diskoperindag Kabupaten Bondowoso telah memberikan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan mengenai cara-cara mengembangkan produk industri tape baik dalam hal inovasi produk, kualitas produk, dan pemasaran. Pemberian wawasan,

pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku industri tape dimaksudkan agar pelaku industri tape dapat berinovasi dan berkreasi sehingga dapat meningkatkan pendapatannya dan mengembangkan usahanya. Pemberian wawasan dan keterampilan juga dimaksudkan agar pelaku industri tape memiliki jiwa kompetitif agar dapat bersaing di pasaran serta menjadi industri kecil yang tangguh dan mandiri.

Pada tahap terakhir, yaitu tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Upaya pemberdayaan industri kecil tape yang telah dilakukan Diskoperindag Kabupaten Bondowoso sudah diterima dan diterapkan oleh beberapa pelaku industri tape. Pemberian wawasan dan keterampilan yang dilakukan Diskoperindag Kabupaten Bondowoso, diakui pelaku industri tape sangat membantu pelaku industri untuk dapat mengembangkan usahanya.

Berdasarkan tahapan pemberdayaan yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan Diskoperindag sesuai dengan tahap-tahap pemberdayaan diatas. Adanya proses pemberdayaan akan menjadikan pelaku industri tape lebih inovatif dan kreatif sehingga dapat mengembangkan usahanya secara mandiri. Berikut pemberdayaan industri kecil tape yang dilakukan Diskoperindag Kabupaten Bondowoso, antara lain:

a. Peningkatan Kemampuan Finansial

Dana atau modal merupakan faktor yang cukup berpengaruh dalam suatu usaha untuk berkembang, khususnya bagi pelaku industri kecil.

Keberadaan suatu usaha yang cukup akan dana atau modal juga akan menjadi pendorong bagi kemajuan suatu kegiatan produksi. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai modal awal untuk melanjutkan produksinya kembali. Akan tetapi bila suatu usaha terhambat oleh faktor dana yang cukup, maka itu bisa juga akan menghambat proses produksinya dan bahkan proses produksi bisa terhenti akibat kurangnya dana untuk proses produksi berikutnya. Keterbatasan modal dialami oleh sebagian besar pelaku industri, termasuk pelaku industri tape di Kecamatan Binakal dan di Kecamatan Wringin. Modal yang digunakan pelaku industri tape sebagian besar merupakan modal pribadi, dan dalam mengatasi kendala permodalan, pelaku industri tape memilih untuk mengajukan pinjaman kepada bank atau menghentikan proses produksi untuk sementara.

Sebagai penyelenggara tata negara, pemerintah memiliki kewajiban memfasilitasi ataupun memberikan bantuan pembiayaan usaha, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 75 ayat 1h bahwa pemerintah memfasilitasi akses pembiayaan termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru. Bantuan modal dari pemerintah dapat menjadi penunjang dalam melaksanakan usaha yang akan dirintis. Hal ini juga disampaikan Syaifudin (1995 : 66-75) dalam Firmansyah (2014:43) pemberdayaan industri kecil salah satunya adalah melalui peningkatan kemampuan finansial. Upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui modal sementara. Selain pemberian

modal sementara, terdapat berbagai bentuk program bantuan modal usaha yang sudah dijalankan pemerintah, seperti bantuan modal kredit dan bantuan modal non kredit.

Bantuan modal kredit merupakan pinjaman modal dengan suku bunga rendah untuk mendorong aktifitas usaha yang membutuhkan suntikan modal, salah satu contohnya adalah kredit usaha rakyat (KUR). Sedangkan bantuan modal non-kredit yaitu bentuk dukungan dari pemerintah bagi pelaku usaha kecil dengan memberikan sarana penunjang untuk menjalankan usahanya atau modal usaha yang berupa barang, seperti yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso. Pemberdayaan industri kecil tape di Kecamatan Binakal dan di Kecamatan Wringin pada aspek peningkatan kemampuan finansial oleh Diskoperindag yaitu berupa pemberian bantuan modal non kredit. Bantuan modal kredit tidak dapat dilaksanakan oleh Diskoperindag Kabupaten Bondowoso karena minimnya anggaran dinas. Sehingga bantuan yang diberikan kepada pelaku industri tape di Kecamatan Binakal dan di Kecamatan Wringin berupa sarana penunjang usaha, antara lain: keranjang, selep ragi, *blower* (kipas angin), *sealer*, blender dan kompor gas. Bantuan ini diberikan kepada 9 pelaku industri dari 157 unit pelaku industri tape per tahun 2015/2016 yang tersebar di Kecamatan Binakal dan di Kecamatan Wringin (Diskoperindag, 2016). Bantuan berupa peralatan penunjang usaha diberikan kepada pelaku

industri dengan mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Diskoperindag dan telah dilakukan survey kelayakan usaha.

Bantuan yang diberikan sudah efektif digunakan oleh pelaku industri kecil tape. Adanya pemberian bantuan penunjang usaha yang diberikan oleh Diskoperindag Kabupaten Bondowoso memberikan dampak positif bagi pelaku industri kecil tape. Meskipun bantuan yang diberikan sebatas peralatan penunjang usaha saja, hal ini sangat membantu para pelaku industri tape di Kecamatan Binakal dan di Kecamatan Wringin untuk meningkatkan produktifitas tape. Meningkatnya produktifitas tape, dapat pula meningkatkan penjualan dan hasil yang didapatkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan industri kecil tape yang dilakukan Diskoperindag berupa pemberian bantuan peralatan penunjang usaha dapat meningkatkan produktifitas tape dan meningkatkan penjualan tape yang berdampak pada peningkatan kemampuan finansial pelaku industri tape.

b. Pengembangan Pemasaran

1. Promosi

Pemasaran yang inovatif akan meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan. Industri kecil akan sulit berkembang jika tidak mengetahui cara memasarkan suatu produk, meskipun produk yang dihasilkan memiliki kualitas baik. Lemahnya kemampuan pasar menjadi salah satu faktor penghambat industri kecil untuk berkembang. Jafar (2004:41) dalam Akbar (2014:20-35) mengemukakan bahwa usaha kecil yang umumnya merupakan unit usaha keluarga mempunyai

jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Sebagaimana yang juga diungkapkan William J. Stanton dalam Basu Swastha (2008:179), dengan adanya pasar maka suatu usaha dapat merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumennya. Melalui pasarlah produk unggulan daerah dapat dikenal oleh masyarakat luas, karena pasar menjadi bagian terpenting dalam proses perkembangan produk unggulan daerah.

Seringkali para pelaku industri kecil, termasuk industri tape di Kecamatan Binakal dan di Kecamatan Wringin tidak terlalu memperhatikan aspek pemasaran dan hanya berfokus untuk memproduksi saja. Pemasaran yang dilakukan pun masih sederhana, yakni dengan menjual produk langsung di pasar, toko atau menggunakan mobil keliling. Cara ini dianggap paling fleksibel dan murah karena hanya menjajakan produk di etalase atau di pinggir jalan. Selain memasarkan produknya ke pasar-pasar di dalam daerah Kabupaten Bondowoso juga mengirimkan produknya ke daerah diluar Kabupaten Bondowoso, seperti Situbondo, Probolinggo, Surabaya, Madura dan daerah-daerah lainnya.

Lemahnya pemasaran yang dialami oleh industri kecil dan menengah, diperlukan adanya peran pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan tersebut. Para pelaku industri kecil membutuhkan akses pasar yang mudah agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lain. Prawirokusumo (2001:97) menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran adalah dengan melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, penyediaan sarana serta dukungan promosi serta memasarkan produk usaha kecil. Promosi bertujuan untuk mengenalkan produk yang dihasilkan kepada masyarakat, sehingga dapat menarik minat konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Tingginya minat konsumen akan berpengaruh terhadap peningkatan permintaan produk yang dihasilkan. Selain menarik minat konsumen, adanya promosi yang inovatif akan memperluas cakupan pemasaran. Sebagaimana yang dikemukakan Mardikanto dan Soebianto (2013:111), salah satu tujuan pemberdayaan adalah memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, serta lembaga pemasaran. Sehingga dalam pemasaran juga diperlukan informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi agar industri kecil dapat bersaing di pasaran (Ishak 2005 dikutip <http://agungwybawa.blogspot.co.id>).

Dalam hal ini pemerintah melalui Diskoperindag melakukan pemberdayaan di bidang pemasaran yang bertujuan untuk membantu pelaku industri memperluas pasar. Pemerintah melalui Diskoperindag melaksanakan pemberdayaan di bidang pemasaran untuk mengenalkan produk tape kepada konsumen melalui kegiatan pameran yang dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah maupun provinsi, yang telah dilaksanakan sebanyak 8-12 kali pada tahun 2015/2016 dan diikuti pelaku industri tape secara bergiliran. Pelaku industri tape yang diikutkan dalam kegiatan pameran juga diseleksi, sehingga produk tape yang diikutsertakan dalam kegiatan pameran merupakan tape yang berkualitas baik.

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan pemasaran melalui promosi industri tape membantu pelaku industri untuk mengenalkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan pemasaran. Adanya kegiatan pameran, mengenalkan masyarakat terhadap produk tape yang dihasilkan di Kecamatan Binakal dan di Kecamatan Wringin. Jangkauan pasar yang luas dapat mengenalkan produk tape khas Bondowoso sehingga semakin dikenal oleh masyarakat luar dan berdampak pada luasnya distribusi penjualan produk tape dan meningkatnya permintaan produk tape. Kegiatan promosi juga membantu pelaku industri tape untuk lebih variatif dan inovatif dalam pengemasan produk.

Adanya kegiatan pemberdayaan pemasaran yang dilaksanakan pemerintah dapat membuka peluang dan tantangan bagi pelaku industri tape untuk dapat mengembangkan usahanya dan memotivasi pelaku industri tape untuk dapat bersaing dengan produk-produk lain. Disisi lain, industri kecil tape juga dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Sebagaimana yang dinyatakan Syaifudin (1995 : 66-75) dalam Firmansyah (2014:43) pada era pasarbebas dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. Hal ini merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi pengusaha kecil.

Selain kegiatan pameran, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengenalan produk industri kecil termasuk tape melalui media cetak berupa buku katalog produk-produk UMKM dan media elektronik. Sebagai salah satu produk unggulan yang cukup dikenal di masyarakat, pemasaran tape potensial untuk dikembangkan dan dipasarkan secara maksimal, terlebih lagi didukung dengan kemudahan teknologi informasi saat ini. Kemudahan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi produk unggulan tape Kabupaten Bondowoso. Selain melakukan promosi dan pemasaran melalui media elektronik, pemberian pelatihan bagi pelaku industri tape untuk dapat memanfaatkan teknologi sebagai salah satu media pemasaran juga diperlukan. Pemanfaatan teknologi sebagai media promosi akan

mempermudah promosi produk, karena lebih murah, praktis, efektif dan lebih efisien.

2. Kemitraan

Diskoperindag juga berupaya menjalin kerjasama dengan toko-toko besar dan minimarket agar produk tape dapat dipasarkan di toko-toko modern, namun masih terkendala dengan masalah ketahanan produk dan kemasan produk. Kemitraan diartikan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Hafsah, 2000:43). Sebagaimana yang disebutkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 75 ayat 1j agar pemerintah memfasilitasi pengembangan, penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, dan industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Dalam hal ini Diskoperindag Kabupaten Bondowoso terus berupaya menjalin kemitraan antara industri kecil tape dan industri tape yang lebih besar serta menjalin kemitraan dengan swasta agar produk tape dapat merambah toko-toko besar dan toko modern seperti minimarket. Menurut Kartasmita (1996:5) dalam Sulaksana (2014:36) bahwa kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan

telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat. Namun, sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang pendek, yaitu produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama (Jafar, 2004:41 dalam Akbar (2014:20-35). Begitu pula produk tape sebagai salah satu produk industri kecil yang memiliki ketahanan pendek dan pengemasan yang mayoritas menggunakan besek masih menjadi kendala bagi Diskoperindag untuk mengembangkan kemitraan antara industri kecil tape dan toko-toko besar. Ketahanan produk yang pendek membuat produk tape sulit dipasarkan di toko-toko besar seperti swalayan. Masalah lainnya adalah kurang menariknya tampilan produk yang dihasilkan. Sebagian besar produk tape dikemas menggunakan besek. Mengatasi hal tersebut, pihak Diskoperindag melakukan pembinaan kepada pelaku industri terkait pengemasan produk agar lebih menarik dan kreatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan pemasaran melalui aspek kemitraan industri kecil dengan industri menengah dan industri besar belum dilaksanakan oleh Diskoperindag, karena terhambat ketahanan produk tape yang tidak dapat bertahan lama. Sehingga belum dapat dipasarkan di toko-toko modern atau swalayan.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam setiap kegiatan industri karena manusia merupakan faktor penggerak yang menentukan berkembang tidaknya suatu usaha. Dalam mengembangkan industri diperlukan inovasi atau gagasan-gagasan baru sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah berdampak pada terbatasnya inovasi produk dan kemampuan bersaing. Menurut Tambunan (2002:78) bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kendala yang cukup kritis bagi banyak usaha kecil dan menengah (UKM), terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, desain rekayasa, pengendalian kualitas, organisasi bisnis akuntansi, pengelolaan data, teknik pemasaran dan penetrasi pasar. Sedangkan semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi, memperluas dan menembus pasar baru. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia pelaku industri perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan pemberdayaan sumber daya manusia. Sebagaimana model pemberdayaan *people center development* yang diungkapkan oleh Suryono (2010:264) yaitu model pembangunan kualitas manusia adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya dengan cara meningkatkan kualitas Sumber daya manusianya

(SDM) sehingga akan menempatkan manusia pada martabat yang lebih baik dan layak.

Pemberdayaan sumber daya manusia berupa pemberian pendidikan, pembinaan, motivasi, dan pelatihan bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada para pelaku usaha. Adanya pembinaan yang dilakukan akan meningkatkan wawasan dan keterampilan pelaku usaha agar bisa mengembangkan usahanya. Usaha yang berkembang dan maju akan meningkatkan tingkat pendapatannya serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang berdaya.

Selain adanya pembinaan juga diperlukan kegiatan pelatihan praktis untuk menerapkan pengetahuan yang sudah didapatkan. Hafshah (2004:43) menyatakan bahwa hal perlu diupayakan dalam perkembangan UKM salah satunya adalah pelatihan, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia diatur dalam Undang-undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 75 ayat 1a bahwa dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah pemerintah memberikan fasilitas berupa peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, dan pasal 75 ayat 1b fasilitas berupa bantuan dan bimbingan teknis.

Dalam hal ini pemerintah daerah melalui Dinas koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso melakukan pemberdayaan sumber daya manusia pelaku industri kecil melalui pembinaan dan pelatihan. Sebagaimana yang diungkapkan Syaifudin (1995 : 66-75) dalam Firmansyah (2014:43) pengembangan sumber daya manusia diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan pendidikan formal dan non formal. Sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar kerja melalui sistem permagangan pada pusat-pusat penelitian dan pengembangan SDM dan teknologi seperti melakukan pembinaan terhadap industri kecil secara rutin dan berkelanjutan harus ada dalam setiap program kerja pemerintah. Pengembangan sumber daya manusia inidapat dikatakan berupa pendidikan informal mellalui kegiatan pembinaan dan pelatihan ini dilaksanakan oleh Diskoperindag dan diikuti oleh pelaku industri tape yang sudah mendapatkan bantuan peralatan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemberdayaan tetap berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan Diskoperindag kepada pelaku industri tape terkait inovasi dan variasi produk olahan tape dan pengemasan produk tape agar produk yang dihasilkan tidak monoton dan juga meningkatkan nilai tambah produk tape, dan terkait perijinan usaha PIRT, serta mengenai menjaga kebersihan dan kualitas mutu produk yang dihasilkan. Pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh dinas dapat meningkatkan keterampilan pelaku industri seperti keterampilan pengemasan produk dan

pengolahan produk, yang ditunjukkan dengan semakin variatifnya produk olahan tape dan cara pengemasan tape. Adanya pembinaan dan pelatihan akan memunculkan inovasi, kreasi dan motivasi kepada pelaku industri untuk lebih mengembangkan usahanya. Sebagaimana yang diungkapkan Mardikanto dan Soebianto (2013:111) tujuan pemberdayaan yang meliputi berbagai upaya perbaikan salah satunya adalah perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai sesuatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup. Pembinaan yang dilakukan oleh Diskoperindag diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar sehingga dapat meningkatkan kualitas diri serta diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, pada akhirnya dapat memperbaiki memperbaiki kehidupan masyarakat.

Selain pembinaan, juga dibutuhkan dorongan semangat dan motivasi agar pelaku industri berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam hal ini, kegiatan pembinaan belum sepenuhnya diikuti oleh pelaku industri tape. Terdapat beberapa pelaku industri tape yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan, selain lebih memilih bekerja,

kesadaran untuk turut serta dalam pemberdayaan juga masih kurang. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan (Suharto, 2009:68-69). Pemberdayaan akan efektif jika ada kolaborasi atau partisipasi aktif dari kedua belah pihak, yakni pihak yang memberdayakan dan pihak yang diberdayakan.

Pembinaan dan pelatihan juga harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan pelaku industri, sehingga dapat langsung dipraktekkan oleh para pelaku industri. Pengembangan sumber daya yang tepat dapat meningkatkan produksi dan kualitas sumber daya manusia, seiring dengan penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang diberikan, akan merangsang kreasi dan inovasi pelaku industri, disamping juga dapat meningkatkan daya saing usaha.

d. Pelayanan Perijinan

Menurut Syaifudin (1995 : 66-75) dalam Firmansyah (2014:43) Perijinan secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memantau perkembangan usaha kecil. Terdapat tiga jenis perizinan yang harus dipenuhi, antara lain ijin tempat usaha (kelayakan, lokasi serta dampak terhadap lingkungan), Ijin Usaha Industri serta Ijin Perdagangan. Merujuk pada pendapat diatas, pelayanan perijinan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso terkait dengan pemberdayaan industri tape di Kecamatan Binakal dan Kecamatan Wringin pada aspek pelayanan perijinan yaitu dnegan

memberikan rekomendasi survey bagi industri yang ingin mendapatkan ijin industri serta ijin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Diskoperindag tidak memberikan perijinan usaha, melainkan hanya memberikan surat rekomendasi survey. Sedangkan perijinan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T).

Adanya perijinan akan menjamin dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Namun masih ada pelaku industri tape yang belum mendaftarkan merk dagangnya atau mengurus ijin industrinya, karena kegiatan produksi tape yang dilakukan dirasa belum profesional, sehingga tidak membutuhkan perijinan. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya perijinan, juga menjadi alasan banyaknya pelaku industri yang tidak mempunyai ijin industri. Dalam hal ini, Diskoperindag terus menghimbau dan menginformasikan pelaku industri untuk mengurus surat ijin industrinya. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan bagi pelaku industri untuk mengurus ijin usahanya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 98 tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu bentuk penumbuhan iklim usaha, dengan tujuan untuk:

- 4) Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- 5) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- 6) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan bank dan non bank; dan mendapatkan kemudahan

dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah/atau lembaga lainnya.

Selain itu, adanya perijinan juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Pada kenyataannya pada pengurusan ijin juga memiliki berbagai hambatan yang dapat berasal dari proses pengurusannya dan kemauan atau kesadaran dari pelaku usaha itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan industri kecil tape dalam meningkatkan sektor industri unggulan, ditinjau dari beberapa aspek pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskoperindag sudah baik namun kurang maksimal, karena terdapat beberapa faktor penghambat, baik secara internal maupun secara eksternal yang akan dijelaskan pada fokus selanjutnya.

2. Faktor penghambat dalam pemberdayaan industri kecil Tape di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan keadaan dilapangan peneliti menemukan beberapa faktor penghambat terkait pemberdayaan industri kecil tape, diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat Internal dalam pemberdayaan industri kecil Tape di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan penelitian faktor penghambat internal yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan pemberdayaan industri kecil adalah minimnya ketersediaan anggaran bagi kegiatan pembangunan sektor koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan serta minimnya ketersediaan aparatur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Diskoperindag tidak memberikan bantuan modal/dana kepada pelaku industri tape dikarenakan minimnya anggaran. Adapun dana yang diberikan baik dari pemerintah pusat, tidak selalu berupa dana utuh (uang) melainkan dapat berupa bantuan peralatan dan pelatihan. Sehingga Diskoperindag tidak memberikan bantuan modal berupa uang kepada pelaku industri tape.

Selain minimnya ketersediaan anggaran, faktor penghambat lainnya dalam pemberdayaan adalah minimnya ketersediaan aparatur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.. Industri kecil yang beraneka ragam dan meningkat setiap tahunnya menyulitkan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan pemberdayaan secara maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai Diskoperindag. Terbatasnya sumber daya aparatur menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan. Jumlah sumber daya aparatur dinas kurang jika dibandingkan dengan jumlah industri kecil di

Kabupaten Bondowoso, menyebabkan pembinaan dan pengawasan terhadap terhadap pelaku industri kecil tape tidak maksimal.

Selain kuantitas, kualitas sumber daya aparatur sebagai penyuluh pemberdayaan juga perlu diperhatikan. Sebagaimana dikemukakan Lipit (1958) dan Rogers (1983) dalam Mardikanto dan Soebianto (2013:139) yang menyebut penyuluh sebagai “agen perubahan (*change agent*) yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Karena itu, fasilitator haruslah profesional, dalam artian memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.

b. Faktor Penghambat Eksternal dalam pemberdayaan industri kecil Tape di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Faktor penghambat eksternal yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan pemberdayaan industri kecil tape , antara lain :

1. Sumber daya Manusia (SDM)

Proses pemberdayaan industri tape yang dilakukan di Kecamatan Binakal dan Kecamatan Wringin mengalami beberapa kendala, salah satunya kurangnya jiwa kewirausahaan atau *entrepreneurship* para pelaku

industri kecil. Terdapat pula pelaku industri yang lebih memilih bekerja daripada mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh dinas. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan kurangnya semangat kewirausahaan pelaku industri tape menjadi kendala dalam proses pemberdayaan. Pelaku industri tape yang kurang berpartisipasi terhadap pembinaan yang dilaksanakan dinas, biasanya dikarenakan sudah cukup puas dengan pencapaian usahanya, sehingga tidak mau melakukan inovasi atau pengembangan-pengembangan produknya. Alasan lainnya adalah tidak adanya bantuan yang diberikan dalam kegiatan pembinaan. Karena pembinaan yang diberikan dinas hanya berupa informasi atau pengetahuan terkait pengembangan produk, namun tidak disertai pemberian bantuan baik modal maupun peralatan. Sehingga pelaku industri tape lebih memilih bekerja karena dapat menghasilkan pendapatan, daripada mengikuti pembinaan yang dilakukan dinas. Hambatan lainnya dalam proses pemberdayaan adalah pola pikir masyarakat yang mudah puas terhadap pencapaian penjualan produknya sehingga terkadang menolak atau tidak mau berinovasi.

Upaya pemberdayaan melalui pembinaan SDM yang dilakukan Diskoperindag merupakan tahap transformasi kemampuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004:83) yaitu tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengatarkan pada kemandirian.

Namun, tahapan transformasi ini tidak disertai dengan tahap penyadaran, yakni pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap penyadaran merupakan tahap persiapan dalam proses memberdayakan masyarakat, dimana tercipta pra kondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif (Sulistiyani, 2004:83).

Pemerintah dalam hal ini, Diskoperindag Kabupaten Bondowoso perlu menciptakan prakondisi untuk memfasilitasi proses pemberdayaan misalnya dengan menggiatkan sosialisasi kepada pelaku industri. Sosialisai kepada pelaku industri dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa usaha yang dilakukan layak untuk dikembangkan, sehingga akan memotivasi pelaku industri untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas. Jika masyarakat pelaku industri sadar akan potensi usahanya dan memiliki semangat untuk maju, kegiatan pemberdayaan pada tahap selanjutnya akan berjalan efektif. Kesadaran, semangat kewirausahaan dan partisipasi aktif pelaku industri merupakan kunci proses pemberdayaan. Sebagaimana yang dikemukakan Kartasmita (1996:5) bahwa pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Namun, bersamaan juga perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha.

2. Bahan baku

Bahan baku merupakan faktor sentral dan proses produksi, sebab tanpa adanya bahan baku proses produksi tidak akan berjalan. Ketersediaan

bahan baku diiringin kualitas bahan baku yang baik akan meningkatkan mutu hasil produksi. Namun hal ini masih menjadi kendala bagi pelaku industri kecil, termasuk industri kecil tape di Kabupaten Bondowoso. Ketersediaan bahan baku yaitu ubi kayu masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses produksi. Jenis ubi kayu yang dapat ditemukan di Kabupaten Bondowoso salah satunya adalah ubi kayu kuning (singkong mentega) yang digunakan untuk membuat tape. Ubi kayu mentega dapat menghasilkan tape berwarna kuning, tidak berserat dan tidak berair sehingga daya tahan tape dapat terjaga. Selain itu ubi kayu mentega memiliki rasa manis sehingga tape yang dihasilkan juga memiliki rasa manis. Kualitas tape bergantung pada pemilihan bahan baku seperti ubi kayu dan ragi. Ubi kayu yang dipilih untuk pengolahan tape bergantung pada umur dan ukurannya. Ubi kayu yang dipilih adalah ubi kayu dengan umur panen cukup yaitu 7-9 bulan dan dengan ukuran yang sedang atau besar.

Faktor yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku selain faktor cuaca adalah beralihnya petani singkong ke tanaman lain. Petani yang biasanya menanam singkong beralih menanam pohon sengon atau jati pada musim-musim tertentu. Hal ini berdampak pada menurunnya ketersediaan bahan baku ubi kayu (singkong) di Kabupaten Bondowoso. Meskipun ubi kayu (singkong) dapat dipasok dari daerah lain diluar kabupaten bondowoso, tetapi ubi kayu yang dipasok dari daerah luar

kabupaten bondowoso akan berpengaruh terhadap kualitas rasa tape yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak Diskoperindag belum melaksanakan kemitraan dengan petani ubi kayu (singkong) sebagai salah satu upaya pemberdayaan pada aspek penyediaan bahan baku. Kemitraan dapat menjadi pilihan alternatif untuk menjaga ketersediaan dan kualitas bahan baku produksi. Sebagaimana dikemukakan Kartasmita (1996:5) kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat. Kemitraan yang dimaksud adalah dengan melakukan perjanjian kerjasama atau MoU (*memorandum of understanding*) dengan petani singkong unggulan, agar petani singkong tidak beralih menanam lahaninya dengan tanaman lain selain singkong. Sebagai gantinya pemerintah dapat memberikan kompensasi atas lahan yang digunakan serta memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga petani singkong juga diuntungkan dalam kemitraan.

3. Modal

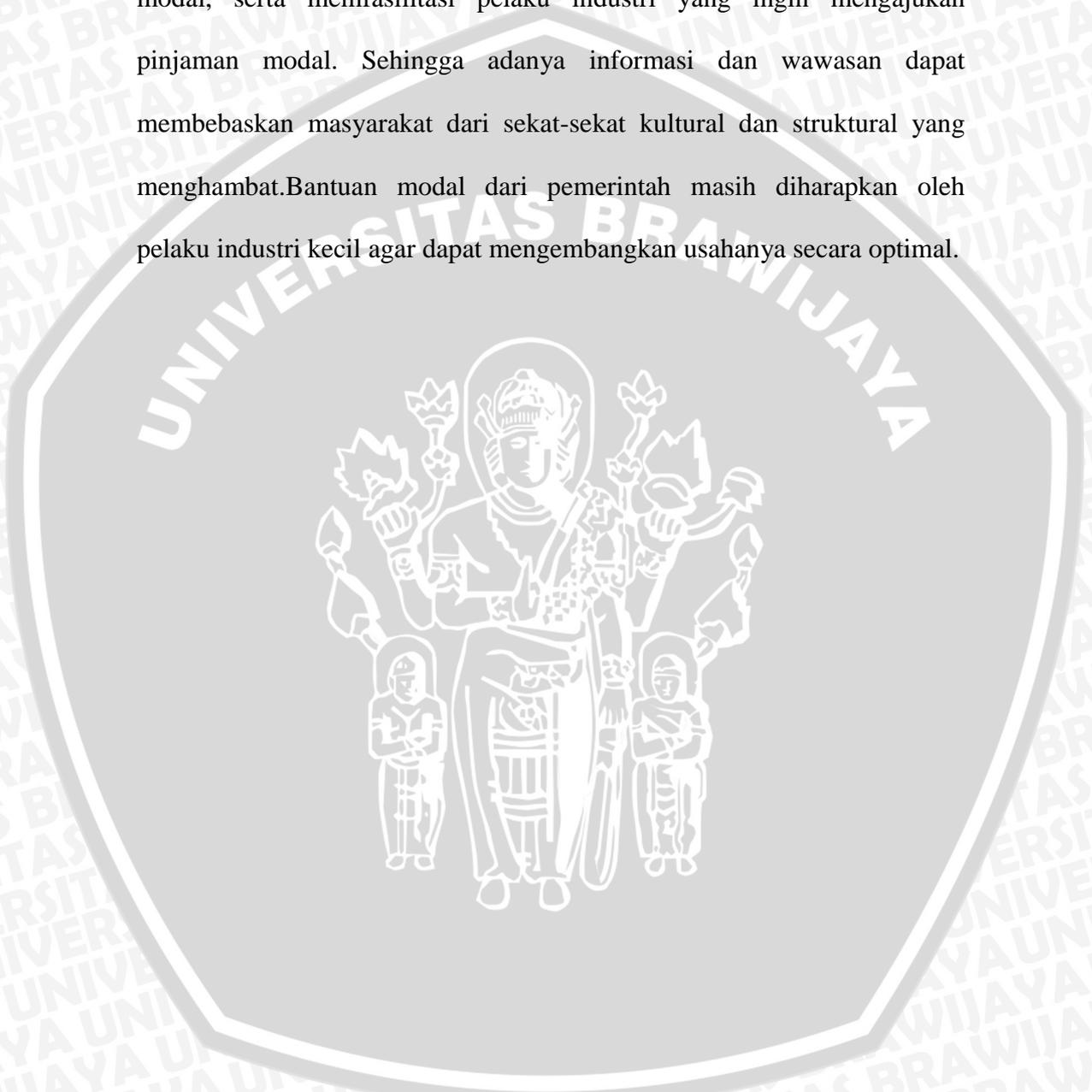
Permodalan seringkali menjadi masalah bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, termasuk pelaku industri tape di Kecamatan Binakal dan di Kecamatan Wringin. Sebagaimana di jelaskan Tambunan (2002:74), UKM (usaha kecil dan menengah) khususnya usaha kecil di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, yaitu mobilisasi modal awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja dan

finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Umumnya dalam memulai dan menjalankan usahanya, pelaku usaha menggunakan modal pribadi. Modal pribadi yang terbatas menghambat peningkatan kapasitas produksi dan mengembangkan aspek-aspek usaha, seperti peningkatan peralatan produksi.

Hambatan permodalan yang dihadapi pelaku industri tape, disebabkan tidak adanya bantuan modal dari pemerintah, kurangnya informasi lembaga dan prosedur pinjaman modal dari dinas terkait. Sehingga pelaku industri tape yang terkendala modal mengatasi sendiri dengan melakukan pinjaman bank atau menghentikan sementara prose produksi. Hardjanto (2009:61) juga menyatakan bahwa kelemahan industri kecil adalah pada kelemahan kultural kurangnya akses informasi dan lemahnya berbagai persyaratan lain guna memperoleh akses permodalan. Akibat rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal, mereka cenderung menggantung pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang, perantara bahkan rentenir (Kuncoro,1997:325).

Dalam hal ini Diskoperindag kabupaten bondowoso dapat melakukan pemberdayaan melalui pendekatan pemungkinan, yakni dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Diskoperindag Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan

potensi masyarakat berkembang, salah satunya dengan memberikan informasi yang memadai terkait lembaga penyedia dan kemudahan akses modal, serta memfasilitasi pelaku industri yang ingin mengajukan pinjaman modal. Sehingga adanya informasi dan wawasan dapat membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Bantuan modal dari pemerintah masih diharapkan oleh pelaku industri kecil agar dapat mengembangkan usahanya secara optimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemberdayaan industri kecil tape dalam meningkatkan industri unggulan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan industri kecil dan menengah (IKM) menjadi salah satu yang berperan dalam pembangunan ekonomi, khususnya industri kecil yang memanfaatkan potensi daerah. Pemanfaatan potensi ubi kayu (singkong) menjadi industri tape di Kabupaten Bondowoso perlu diberdayakan, karena selain dapat mengangkat potensi daerah menjadi potensi unggulan, industri kecil berbasis potensi daerah juga dapat meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja yang juga secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kendala dalam industri kecil tape menyebabkan masih rendahnya skala ekonomis yang menghambat masuknya produk unggulan daerah ke dalam pangsa pasar yang lebih luas, meliputi regional, nasional dan internasional. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku industri kecil tape dan agar dapat mengangkat industri kecil tape di Kabupaten Bondowoso sebagai produk unggulan .

2. Pemberdayaan industri kecil tape dalam meningkatkan sektor industri unggulan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, antara lain : 1. peningkatan kemampuan finansial, yaitu pemberian bantuan peralatan penunjang usaha kepada pelaku industri tape di Kecamatan Binakal dan Industri Tape di Kecamatan Wringin dapat membantu meningkatkan produktifitas yang berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha; 2. pengembangan pemasaran, melalui kegiatan pameran secara bergilir, promosi melalui media cetak serta media eletronik. Adanya pameran dapat mengenalkan industri tape di Kecamatan Binakal dan di Kecamatan Wringin kepada masyarakat luas dan memperluas jangkauan pemasaran tape; 3. pengembangan sumber daya manusia, melalui pembinaan dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku industri tape, yang ditunjukkan dengan produk olahan dan pengemasan tape yang semakin variatif dan menarik sehingga meningkatkan nilai tambah produk tape; 4. pelayanan perijinan berupa pemberian rekomendasi survey bagi pelaku usaha yang akan mengurus ijin usahanya dan menginformasikan kepada pelaku usaha terkait perijinan usaha, tetapi masih terdapat pelaku usaha yang belum mengurus ijin usahanya.

3. Pemberdayaan industri kecil tape yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan sektor industri unggulan sudah baik, tetapi kurang

maksimal karena terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan. Faktor penghambat internal yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan pemberdayaan industri kecil tape, adalah minimnya anggaran dan minimnya ketersediaan aparatur Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso. Sedangkan, faktor penghambat eksternal dari pelaksanaan pemberdayaan industri kecil tape di Kecamatan Binakal dan di Kecamatan Wringin, antara lain 1) sumber daya manusia, yaitu kurangnya semangat kewirausahaan pelaku industri ditunjukkan dengan kurangnya partisipasi pelaku industri dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan pemerintah dan pola pikir masyarakat yang mudah puas terhadap pencapaian penjualan produknya sehingga terkadang menolak atau tidak mau berinovasi; 2) bahan baku. Ketersediaan bahan baku yakni ubi kayu (singkong) menurun. Faktor cuaca dan alih tanam lahan serta belum terciptanya kemitraaan dengan petani singkong mempengaruhi ketersediaan bahan baku tape; dan 3) modal. Tidak adanya bantuan dan sosialisasi permodalan dari pemerintah. Kendala permodalan yang dihadapi pelaku industri tape dikarenakan tidak ada bantuan permodalan dari pemerintah dan kurangnya informasi terkait prosedur dan lembaga penyedia pinjaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang diharapkan mampu

memberikan masukan dalam mengembangkan potensi lokal daerah, khususnya industri tape di Kecamatan Binakal dan Kecamatan Wringin. Saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya menciptakan iklim usaha yang kondusif oleh pemerintah, misalnya berupa kemudahan pendanaan, kemudahan informasi pasar, pengendalian dan pengaturan persaingan yang sehat, proteksi, keamanan usaha, sarana dan prasarana yang memadai dan kemitraan. Iklim yang kondusif dapat menumbuhkan semangat untuk berwirausaha. Semangat berwirausaha dapat mendorong pengembangan usaha melalui penerapan inovasi-inovasi dan penciptaan inovasi kreatif pelaku usaha..
2. Perlunya pemerintah melaksanakan kemitraan dengan petani ubi kayu, khususnya ubi kayu bahan baku tape untuk menjaga ketersediaan dan kualitas ubi kayu, misalnya melalui proteksi lahan ubi kayu atau sistem kontrak lahan potensial yang dapat menghasilkan ubi kayu bahan baku tape unggulan, melaksanakan pendampingan petani, memberikan sarana-prasarana penunjang yang memadai dan menyediakan kemudahan informasi akses modal, akses distribusi ubi kayu, serta meningkatkan kesejahteraan petani ubi kayu sehingga tidak beralih tanam ke tanaman yang lain.
3. Pemberdayaan yang dilakukan diharapkan dapat menyeluruh, meliputi industri tape dan industri-industri pendukung, baik industri pengrajin besek, petani bambu, maupun pelaku industri hasil olahan tape, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri.

4. Perlunya sosialisasi, informasi, pemberian bantuan fasilitasi, kemudahan akses dan penjaminan keamanan permodalan bagi pelaku industri tape. Serta perlunya mencermati fasilitasi permodalan yang akan diberikan tidak menimbulkan ketergantungan pelaku usaha terhadap pemerintah. Sehingga tujuan pemberdayaan dapat tercapai, yaitu memandirikan masyarakat.
5. Perlunya peningkatan aparatur pemberdaya, baik secara kuantitas maupun kualitas agar pemberdayaan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara maksimal.
6. Sebaiknya dilakukan pembentukan asosiasi pengrajin atau pelaku industri tape di Kabupaten Bondowoso. Adanya asosiasi dapat menjadi sumber informasi, memperluas jaringan, media pemberdayaan dan dapat mengakomodir aspirasi pelaku industri tape di Kabupaen Bondowoso.
7. Perlunya pembentukan branding tape sebagai icon Kota Bondowoso sebagai bentuk proteksi terhadap produk lokal, sekaligus sebagai bentuk pengembangan pariwisata yang dapat menarik wisatawan domestik maupun asing.
8. Bagi masyarakat sendiri, perannya juga sangat membantu dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah. Maka dari itu masyarakat industri kecil terutama masyarakat industri kecil tape diharapkan juga aktif dalam upaya pengembangan potensi daerahnya. Hal tersebut dibutuhkan kesadaran dari dalam diri masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta .
- Akbar, M.Taufiq. 2014. *Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Krupuk Rengginang*. Universitas Brawijaya, Malang : Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE – YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2015 <https://www.bps.go.id> diakses tanggal 30 September 2016
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016 <https://jatim.bps.go.id> diakses tanggal 30 September 2016
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. 2013. <https://bondowosokab.bps.go.id/> diakses tanggal 30 September 2016
- Basu, Swastha DH., Irawan. 2008. *Manajemen Pemasaran Modern*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-tigabelas, Yogyakarta: Liberty Offset
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Firmansyah, Robby. 2014. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Madiun*. Universitas Brawijaya, Malang : Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Hafsah, Muhammad jaffar. (2004) *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Infokop, Nomor 25 Tahun XXX: 40 44.
- Hardjanto, Imam. 2009. *Enterpreneurship Kewirausahaan*. Malang: Universitas Brawijaya
- InfoBondowoso.net. 2014. Perajin Tape Bondowoso Ngluruk Kantor Diskoperindag (Online) <http://www.infobondowoso.net/2014/10/perajin-tape-bondowoso-ngluruk-kantor.html> Diakses tanggal 4 Januari 2017
- Kabupaten Bondowoso diakses melalui <http://Kabupatenbondowoso.go.id> tanggal 30 September 2016
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

_____.1997. *Administrasi Pembangunan : Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.

Kementrian Perdagangan. Kemendagri.go.id diakses tanggal 4 Januari 2017

Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan*, Cetakan pertama. Yogyakarta : Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN.

Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Martodireso, S dan Widada, AS.2001. *Terobosan Kemitraan Usaha Dalam Era Globalisasi Kanisius* : Yogyakarta

Miles, Matthew B,A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Arizona State University. SAGE Publications,Inc.

Mindarti, Lely Indah. 2007. *Revolusi Administrasi Publik Aneka Pendekatan dan teori Dasar*. Malang : Banumedia Publishing

Moleong, L. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mujiyanti, Dwi Desi.2005. *Kontribusi Agroindustri tape Terhadap Perekonomian Kabupaten Bondowoso*. Universitas Jember : Skripsi

Octaviani, Anggi Prayoga. 2014. *Dinamika Agroindustri Tape Di Kabupaten Bondowoso Tahun 1960-2014*, Artikel Ilmiah Mahasiswa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

_____.2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Bupati Bondowoso No. 45 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Peraturan Presiden No 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Prawirokusumo, Soeharto. 2001. *Prawiro, Kusumo. 2001. Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan, dan Strategi*. Yogyakarta: BPFE
- Prijono, O.S & Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS
- Rachbini, DJ.2001. *Pengembangan Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Grasindo
- Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2015.
- Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso tahun 2014-2018
- Rochmawati, Alfi. 2014.*Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Tenun Ikat Bandar Kidul Sebagai Produk Unggulan Daerah*. Universitas Brawijaya : Skripsi Tidak Diterbitkan
- Saleh, Irsyan Ansyhari. 1986. *Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*. Jakarta : Bina Aksara
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____.2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiatno. 2011. *Pengembangan Produk Unggulan Sapu Ijuk Dalam Percepatan Ekonomi Lokal Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus Di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)*. Universitas Sumatera Utara : Tesis
- Sugiyono, Prof. Dr. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Cetakan Keempat Belas. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sulaksana, Tedja Bagus. 2014. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Industri Lokal (Studi Kasus Pada Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)*. Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan.

- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pembangunan*. Yogyakarta : Gaya Media
- Sumodiningrat, G. 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara.
- _____.2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Suryono, Agus. 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang : UM Press.
- _____.2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang : UB Press.
- Tambunan, Tulus T. H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia : Beberapa Isu Penting*. Jakarta : Salemba Empat
- _____.2009. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Bogor : Ghabia Indonesia
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan A.R, Mustopadidjaja. 1980. *Pengantar Dan Pemikiran Tentang Teori Dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : Gunung Agung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Wywaba, Agung. 2012. Mengenal Akses Informasi Bagi UMKM.(online) <http://agungwywaba.blogspot.co.id/2012/07/mengenal-akses-informasi-bagi-umkm.html> Diakses tanggal 4 Januari 2017



LAMPIRAN



Lampiran 1 Surat Pengantar Riset

167



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 10489 /UN10.3/Pg/2016
Lampiran : -
Hal : Pengantar Kegiatan Riset/Survey

Kepada : Yth. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bondowoso
Jl. KIS Mangunsarkoro No. 136B
Bondowoso

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Klara Pristika Anggraini
Alamat : Jl. Kertoraharjo 69 RT 3 RW 2 Kec. Lowokwaru Kel. Ketawanggede
Malang
NIM : 125030100111140
Program Studi : Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : -
Tema : Strategi Pemberdayaan Industri Kecil Tape di Kabupaten Bondowoso dalam peningkatan sektor industri unggulan (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso)
Tempat : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso
Lamanya : 1 Bulan (08 Agustus 2016 – 08 September 2016)
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 03 Agustus 2016

an. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Cherul Saleh, M.Si

NIP. 19600112 198701 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor . 136 B Telp. 431678/ Fax. 424495

BONDOWOSO

Bondowoso, 11 Agustus 2016

Nomor : 072/ *Slb* /430.11.3 /2016
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
 Yth.Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian Dan
 Perdagangan Kabupaten Bondowoso
 di - **BONDOWOSO**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 03 Agustus 2016 Nomor : 10489/UN10.3/PG/2016 perihal Rekomendasi Penelitian.

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **Klara Pristika Anggraini**
 NIM : 125030100111140
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Untuk melakukan Penelitian dengan :

Judul Proposal : " Strategi Pemberdayaan Industri Kecil Tape Di Kabupaten Bondowoso Dalam Peningkatan Sektor Industri Unggulan (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso) "
 Waktu : Satu bulan (08 Agustus s.d 08 September 2016)
 Lokasi : Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diharapkan saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

a.n.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BONDOWOSO
 Kabid. Integrasi Bangsa



Tembusan :
 Yth. 1. Bupati Bondowoso (sebagai laporan)
 2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Malang
 3. Arsip

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan atau Wawancara

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan atau Wawancara Kepada Dinas Koperasi

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso

1. Bagaimana awal mula munculnya industri tape?
2. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi industri kecil tape di Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimanakah strategi Diskoperindag Kabupaten Bondowoso dalam pemberdayaan industri kecil tape di Kabupaten Bondowoso?
4. Sejak kapan pelaksanaan pemberdayaan industri tape dilakukan?
5. Apakah ada perda atau perbup yang mengatur tentang pemberdayaan industri di kabupaten bondowoso?
6. Bagaimana proses pemberdayaan industri tape yang dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Bondowoso?
7. Berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia apakah ada pelatihan khusus untuk meningkatkan keahlian para pelaku industri maupun masyarakat sekitar industri?
8. Apakah ada bantuan permodalan kepada pelaku industri?
9. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Bondowoso dalam hal ini kaitannya dengan pemberdayaan sarana dan prasana penunjang industri tape?
10. Apa saja yang telah dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan pemasaran produk?
11. terkait pemalsuan produk tape, apa yang dilakukan oleh dinas?
12. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan industri kecil?

B. Daftar Pertanyaan atau Wawancara dengan pelaku industri tape

1. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha tape?
2. Apa saja permasalahan yang sering dihadapi oleh pengusaha tape dalam mengembangkan usahanya?
3. Apa saja jenis bahan baku dan peralatan yang diperlukan dalam pembuatan tape?
4. Apakah semua bahan baku dapat diperoleh di dalam kabupaten bondowoso? Jika tidak, bahan baku apa yang didatangkan dari daerah lain?
5. Apa saja yang pernah dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Bondowoso dalam pemberdayaan industri tape?
6. Apakah ada kendala permodalan? Jika ada bagaimana mengatasinya?
7. Bagaimana bentuk bantuan pemasaran yang pernah dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Bondowoso?
8. Kemana saja produk ini dipasarkan?
9. Apakah ada bantuan lain yang berasal dari swasta atau dari luar pemerintah?
10. Pembinaan dan pelatihan di bidang apa saja yang pernah dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Bondowoso dalam pemberdayaan industri tape?
11. Apakah Diskoperindag Kabupaten Bondowoso memfasilitasi pengusaha tape untuk mendapatkan kemudahan mendapatkan ijin usaha perdagangan?

Lampiran 3 Foto-Foto dan Data

3. Bantuan Peralatan



Gambar. Sealer dan Blender



Gambar. Bak Keranjang



Gambar. Mesin Selep



Gambar. Kipas angin



4. Daftar Pelaku Usaha Tape Di Kecamatan Binakal dan di Kecamatan Wringin Tahun 2015/2016

DAFTAR PELAKU USAHA TAPE DI KECAMATAN BINAKAL					
TAHUN 2015					
NO	NAMA PERUSAHAAN	PEMILIK	ALAMAT		PRODUKSI TAPE
			JALAN DESA	KECAMATAN	
1	ABDUL LATIF	ABDUL LATIF	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	TAPE, SUWAR SUWIR
2	ABDURRAHMAN	ABDURRAHMAN	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	SUWAR SUWIR
3	B KUNNA	B KUNNA	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	DODOL
4	B KURMA	B KURMA	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	TAPE
5	B SUNNARTI	BU SUNARTI	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	TAPE
6	B TARM	B TARM	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	DODOL
7	BU DUMI	B DUMI	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
8	DODOL TAPE S KHOLIFAH	S. KHOLIFAH	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	DODOL TAPE
9	IFA	IFA	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	TAPE
10	INDUSTRI TAPE H HOIRILLAH	H HOIRILLAH	SUMBER TENGAH	BINAKAL	PRODUKSI TAPE
11	INDUSTRI TAPE HAMM	HAMM	SUMBER TENGAH	BINAKAL	PRODUKSI TAPE
12	INDUSTRI TAPE HASAN	HASAN	SUMBER TENGAH	BINAKAL	PRODUKSI TAPE
13	INDUSTRI TAPE NIPA	NIPA B SUN	SUMBER TENGAH	BINAKAL	PRODUKSI TAPE
14	P IK	P IK	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
15	P IM	P IM	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	DODOL
16	P JON	P JON	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	DODOL
17	P KUSNADI	PKUSNADI	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	DODOL
18	P LUT	P LUT	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	DODOL
19	P SAHA	P SAHA	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
20	TAPE 36	ZAENUDDIN	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
21	TAPE 32	MARWAH	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
22	TAPE 64	SENIMA	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
23	TAPE 79	GAZALI HOESAEN	DS. SUMBER TENGAH RT 09/03	BINAKAL	TAPE
24	TAPE 811	MUNAWWAROH	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
25	TAPE 811	MULYADI	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	TAPE
26	TAPE 85	BUAWI	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
27	TAPE B EDI	B EDI	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
28	TAPE B HERUL	B HERUL MARYATUN	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
29	TAPE B NAWARA	B NAWARA	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
30	TAPE B SUNYANI	B SUNYANI	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
31	TAPE BU JON	BU JON	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	TAPE
32	TAPE FAFI IAYA 71	RAHMATULLAH	DS. SUMBER TENGAH RT 09/03	BINAKAL	TAPE, SUWAR SUWIR, DODOL
33	TAPE LEGIAN	ALI MANSYUR	JERUK SOK-SOK RT 04/02	BINAKAL	TAPE
34	TAPE LUTFIYAH	LUTFIYAH	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
35	TAPE MANIS 32	MATRAWI	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
36	TAPE MANIS 76	P. SUN'AMIN	DS. SUMBERTENGAH RT 01/01	BINAKAL	TAPE
37	TAPE MANIS 79	B MARWAH	DS. SUMBER TENGAH RT 18/03	BINAKAL	TAPE
38	TAPE MARZUKI	MARZUKI	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	TAPE
39	TAPE OBAITULLAH	OBAITULLAH	SUMBER TENGAH	BINAKAL	PRODUKSI TAPE
40	TAPE P KUSNADI	P KUSNADI	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	TAPE
41	TAPE RABBINI	RABBINI	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	TAPE
42	TAPE RUKYANTI	RUKYANTI	SUMBER TENGAH	BINAKAL	TAPE
43	TAPE SAHRANI	SAHRANI	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	TAPE
44	TAPE SITI NUR AZIZAH	SITI NUR AZIZAH	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	TAPE
45	TAPE SITI RAMLAH	SITI RAMLAH	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	TAPE
46	UD BAROKAH	UD BAROKAH	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	TAPE
47	UD FARIS	UD FARIS	JERUK SOK-SOK	BINAKAL	TAPE

DAFTAR NAMA PENGUSAHA TAPE			
DESA SUMBER TENGAH KECAMATAN BINAKAL			
KABUPATEN BONDOWOSO			
TAHUN 2016			
NO	NAMA	KAPASITAS PRODUKSI PERHARI	ALAMAT
1	ANI/B SRI	5 KWINTAL	KRAJAN RT 01/01
2	ASIA/B IPA KELANA	15 KWINTAL	KRAJAN RT 01/01
3	BUHARI/ P AP	7 KWINTAL	KRAJAN RT 01/01
4	H ABDUL WAHID	8 KWINTAL	KRAJAN RT 01/01
5	MARIPA/B ANA	5 KWINTAL	KRAJAN RT 01/01
6	NIDA/B HAR	5 KWINTAL	KRAJAN RT 01/01
7	SAKUR/P SUGIK	15KWINTAL	KRAJAN RT 01/01
8	TUTIK/B LIA	5 KWINTAL	KRAJAN RT 01/01
9	SANUSI/P HAFID	5 KWINTAL	KRAJAN RT 03/02
10	BABUN/B MAR	5 KWINTAL	KRAJAN RT 11/03
11	H AINUL YAQIN/AMIR	5 KWINTAL	KRAJAN RT 11/03
12	H SAIFUL HADI	7 KWINTAL	KRAJAN RT 11/03
13	B MUNTAMA	5 KWINTAL	KRAJAN RT 12/02
14	SATORI/P WAFI	4 KWINTAL	KRAJAN RT 12/02
15	ABU ZAIRI/P MUZANNI	15 KWINTAL	PAL 16 RT 05/04
16	AHMADIAYANTO/P YUL	10 KWINTAL	PAL 16 RT 05/04
17	MISYA/B ARIS	6 KWINTAL	PAL 16 RT 05/04
18	SUKI/P SUS	10 KWINTAL	PAL 16 RT 05/04
19	TOMIN/P NASIA	5 KWINTAL	PAL 16 RT 05/04
20	MASTURI	10 KWINTAL	TAMBIRITAN RT 09/07

Sumber : Data Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, 2015



**DATA INDUSTRI KECIL TAPE DAN OLAHANNYA DI KECAMATAN WRINGIN
TAHUN 2015/2016**

NO	NAMA PERUSAHAAN	PEMILIK	ALAMAT		PRODUKSI TAPE
			JALAN DESA	KECAMATAN	
1	DIDIK	DIDIK	RT 01 RW 16	WRINGIN	TAPE
2	NUHI	NUHI	RT 02 RW 05	WRINGIN	TAPE
3	IWAN	IWAN	RT 02 RW 12	WRINGIN	TAPE
4	ZAINUL ARIFIN	ZAINUL ARIFIN	RT 03 RW 05	WRINGIN	TAPE
5	SUHARTONO	SUHARTONO	RT 04 RW 07	WRINGIN	TAPE
6	SUHERMAN	SUHERMAN	RT 04 RW 07	WRINGIN	TAPE
7	BU UMAR	BU UMAR	WRINGIN KRAJAN RT 02/05	WRINGIN	TAPE
8	MURTINI	MURTINI	WRINGIN KRAJAN RT 02/06	WRINGIN	TAPE
9	BU NO/MIKENONG	BU NO/MIKENONG	WRINGIN KRAJAN RT 03/05	WRINGIN	TAPE
10	BU BAHUL	BU BAHUL	WRINGIN KRAJAN RT 03/06	WRINGIN	TAPE
11	BU IM/TUN	BU IM/TUN	WRINGIN TENGAH RT 01/07	WRINGIN	TAPE
12	BU LELI	BU LELI	WRINGIN TENGAH RT 01/07	WRINGIN	TAPE
13	BU LIWAPA	BU LIWAPA	WRINGIN TENGAH RT 01/07	WRINGIN	TAPE
14	MUNIPA	MUNIPA	WRINGIN TENGAH RT 02/09	WRINGIN	TAPE
15	BU FAID/HOS	BU FAID/HOS	WRINGIN TENGAH RT 02/11	WRINGIN	TAPE
16	BU SUS	BU SUS	WRINGIN TENGAH RT 03/07	WRINGIN	TAPE
17	SAFII	SAFII	WRINGIN TENGAH RT 03/07	WRINGIN	TAPE
18	KOS	KOS	WRINGIN TENGAH RT 03/08	WRINGIN	TAPE
19	SRI	SRI	WRINGIN TENGAH RT 03/08	WRINGIN	TAPE
20	SUARNA	SUARNA	WRINGIN TENGAH RT 03/08	WRINGIN	TAPE
21	BU MINA	BU MINA	WRINGIN TENGAH RT 07/08	WRINGIN	TAPE
22	BU SUNIA	BU SUNIA	WRINGIN TENGAH RT 07/08	WRINGIN	TAPE
23	RUKMINI/B FATIM	RUKMINI/B FATIM	WRINGIN UTARA RT 01/14	WRINGIN	TAPE
24	BU ANDRIK/PI	BU ANDRIK/PI	WRINGIN UTARA RT 02/11	WRINGIN	TAPE
25	BU FEN/BABUN	BU FEN/BABUN	WRINGIN UTARA RT 02/11	WRINGIN	TAPE
26	BU HELMI	BU HELMI	WRINGIN UTARA RT 02/11	WRINGIN	TAPE
27	BU NOVI	BU NOVI	WRINGIN UTARA RT 02/12	WRINGIN	TAPE
28	ANI	ANI	WRINGIN UTARA RT 03/11	WRINGIN	TAPE
29	MUNAWI	MUNAWI	WRINGIN UTARA RT 03/11	WRINGIN	TAPE
30	NAHRAWI	NAHRAWI	WRINGIN UTARA RT 03/11	WRINGIN	TAPE
31	PAK SULIK/SUDAHNAN	PAK SULIK/SUDAHNAN	WRINGIN UTARA RT 03/11	WRINGIN	TAPE
32	ROKAYA	ROKAYA	WRINGIN UTARA RT 03/11	WRINGIN	TAPE

Sumber : Data Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, 2015

**DATA INDUSTRI KECIL TAPE DAN OLAHANNYA DI KECAMATAN WRINGIN
TAHUN 2015/2016**

NO	NAMA PERUSAHAAN	PEMILIK	ALAMAT		PRODUKSI TAPE		
			JALAN DESA	KECAMATAN			
1	1	1	AMYANI	AMYANI	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
2		2	ARDHA	ARDHA	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
3		3	ARYATI	ARYATI	WRINGIN TENGAH RT 03/07	WRINGIN	TAPE
4		4	BU DELA	BU DELA	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
5		5	BU DI	BU DI	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
6		6	BU EKO	BU EKO	WRINGIN TENGAH RT 01/07	WRINGIN	TAPE
7		7	BU FIRA	BU FIRA	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
8		8	BU HJ NARTI	BU HJ NARTI	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
9		9	BU IVON	BU IVON	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
10		10	BU KIFLI	BU KIFLI	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
11		11	BU LIJA	BU LIJA	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
12		12	BU LILIK	BU LILIK	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
13		13	BU LIWADA	BU LIWADA	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
14		14	BU RIM/SUS	BU RIM/SUS	WRINGIN TENGAH RT 01/07	WRINGIN	TAPE
15		15	BU RIS	BU RIS	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
16		16	BU ROHEMAH	BU ROHEMAH	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
17		17	BU RUK	BU RUK	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
18		18	BU SEY	BU SEY	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
19		19	BU SIDAH	BU SIDAH	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
20		20	BU SIPUL	BU SIPUL	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
21		21	BU SU AIB	BU SU AIB	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
22		22	BU SUNARDI	BU SUNARDI	WRINGIN TENGAH RT 03/07	WRINGIN	TAPE
23		23	BU SUP	BU SUP	WRINGIN KRAJAN RT 03/06	WRINGIN	TAPE
24		24	BU SUS	BU SUS	WRINGIN TENGAH RT 03/08	WRINGIN	TAPE
25		25	BU TON	BU TON	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
26		26	BU YOPI	BU YOPI	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
27		27	FATMA	FATMA	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
28		28	FATIMAH /B LELY	FATIMAH /B LELY	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
29		29	HAIRIYAH	HAIRIYAH	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
30		30	HARTONO	HARTONO	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
31		31	JUMAATI	JUMAATI	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
32		32	PAK ABDUL WAFI	ABDUL WAFI	RT 03 RW 05	WRINGIN	TAPE
33		33	PAK ADEL	PAK ADEL	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
34		34	SANIMAH	SANIMAH	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
35		35	SITI	SITI	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
36		36	SUPIAH	SUPIAH	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
37		37	SUPIYATUN	SUPIYATUN	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
38		38	SURINA	SURINA	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
39		39	SULASTRI	SULASTRI	WRINGIN TENGAH RT 01/07	WRINGIN	TAPE
40		40	TOYAMI	TOYAMI	WRINGIN TENGAH RT 01/07	WRINGIN	TAPE
41		41	TAPE MARYAM	TAPE BU MARYAM	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
42		42	TAPE BU SUIP	TAPE BU SUIP	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
43		43	TAPE BU ZENOL	TAPE BU ZENOL	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
44		44	TAPE MULYANI	TAPE MULYANI	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
45		45	TAPE SULIHA	TAPE SULIHA	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
46		46	TAPE TAYAMI	TAPE TAYAMI	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
47		47	TI/ BU DAUS	TI/ BU DAUS	WRINGIN TENGAH RT 01/07	WRINGIN	TAPE
48		48	NA RIRIN	NA RIRIN	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
49		49	TAPE BU INTAN	BU INTAN	WRINGIN	WRINGIN	TAPE
50		50	WIDIAWATI	WIDIAWATI	WRINGIN KRAJAN RT 04/07	WRINGIN	TAPE
51	2	1	PAK ARIK	PAK ARIK	JATITAMBAN	WRINGIN	TAPE
52		2	PAK IRA	PAK IRA	JATITAMBAN	WRINGIN	TAPE
53		3	PAK ISFAN	PAK ISFAN	JATITAMBAN	WRINGIN	TAPE
54		4	PAK MITA	PAK MITA	JATITAMBAN	WRINGIN	TAPE
55		5	PAK YENI	PAK YENI	JATITAMBAN	WRINGIN	TAPE
56		6	RUKMINI B HIT	RUKMINI B HIT	JATITAMBAN	WRINGIN	TAPE
57		7	RUMIYATI BRIZAL	RUMIYATI BRIZAL	JATITAMBAN	WRINGIN	TAPE
58		8	SAHRIT	SAHRIT	JATITAMBAN	WRINGIN	TAPE

Sumber : Data Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, 2015